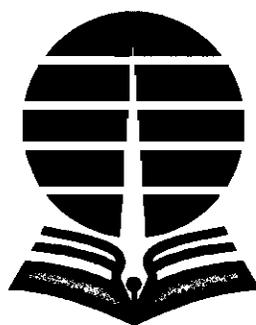


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KOMODITAS UNGGULAN JAMBU METE
DI KABUPATEN BUTON**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Administrasi Publik

Disusun Oleh :

MA'MUL DJAMAL,SP
NIM. 015541219

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011**

ABSTRAK**Analisis Strategi Kebijakan Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete di Kabupaten Buton****Ma'mul Djamal,SP.****Universitas Terbuka**

mamuld@yahoo.co.id

Kata Kunci : Strategi Kebijakan , Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya strategi-strategi kebijakan pemerintah Kabupaten Buton dalam pengembangan komoditas unggulan Jambu Mete di Kabupaten Buton masih belum sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat dari skala usaha atau tingkat sentra-sentra produksi petani perorangan masih kecil; produktivitasnya tersebar diberbagai tempat sehingga menyulitkan proses distribusi pemasaran; kualitas produk perkebunan bervariasi; produk perkebunan bervariasi; dukungan permodalan dan lembaga keuangan sangat terbatas; SDM petani masih terbatas; penerapan teknologi masih terbatas; kondisi sarana dan prasarana juga terbatas serta belum terintegrasinya secara optimal dengan industri pengolahan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana mendapatkan strategi yang tepat dalam pengembangan sektor komoditas unggulan Jambu Mete di Kabupaten Buton.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kebijakan pengembangan komoditas unggulan Jambu Mete di Kabupaten Buton.

Penelitian ini dilakukan di sentra produksi komoditas unggulan Jambu Mete, di Kabupaten Buton dengan populasi penelitian meliputi kelompok tani komoditas unggulan Jambu Mete, mitra usaha/pengusaha, pihak pemerintah dan informasi kunci yaitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan teknik pengambilan data yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk *snowball sampling*.

Metode yang digunakan untuk mengetahui hal tersebut di atas adalah dengan menggunakan pendekatan manajemen strategis dengan analisis SWOT. Selanjutnya pada tahap perumusan isu-isu strategis, setelah melalui *litmus test*, maka diperoleh strategi dominan atau prioritas tentang pengembangan komoditas unggulan Jambu Mete di Kabupaten Buton yaitu : penguatan kelembagaan, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap ancaman iklim ekstrim, penguatan modal usaha untuk pengembangan komoditas unggulan Jambu Mete, pengembangan sentra produksi sektor unggulan Jambu Mete.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pengembangan komoditas unggulan Jambu Mete di Kabupaten Buton ternyata belum menunjang pengembangan komoditas unggulan Jambu Mete.

ABSTRACK**The Policy Strategy Analysis of Main Commodity Development of Jambu Mete in Buton Regency****Ma'mul Djamal, SP.****Universitas Terbuka**

mamuld@yahoo.co.id

Key Word : Policy Strategy, Main Commodity, Jambu Mete

This research was back grounded by existence of Buton Regency government policy strategies for developing the regions main commodity of Jambu Mete in Buton Regency that has not suitable expectation yet. This case can be seen from effort scale or productivity centers level of individual farmer was stills little; its productivity was spread at many place as make hard the marketing distribution process; garden product quality varied; financial institution; capital supporting; and farmer human resources were still limited; likewise technology applied and condition of equipment was also limited and did not integrated optimally with industrial processing.

The problem of this research is how to get the right strategy of regions main commodity development of Jambu Mete in Buton Regency that used the strategy management technique implementation.

This research aimed to know the policy strategy of main commodity development of Jambu Mete in Buton Regency.

This research was done in main commodity production center of Jambu Mete in Buton Regency, with research population consisted of farmer group of main commodity, effort partner/entrepreneur, key information and government side namely the head of Buton Regency agricultural. The Data collecting technique was done through the interview, with used non probability and snowball sampling.

The method of this research used SWOT analysis with strategy management approach. Furthermore on strategy issue formulation step through *litmus test* was gotten the dominant strategy or priority about region main commodity development of Jambu Mete in Buton regency, namely; institution reinforcement, to increase the knowledge and comprehension toward the threaten of extreme climate, effort capital support of Jambu Mete main commodity development, production center development of Jambu Mete main sector.

Based on the result of research could be concluded that the strategy implementation of region main commodity development of Jambu Mete in Buton regency did not supporting yet the main commodity development of Jambu Mete.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Strategi Kebijakan Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete di Kabupaten Buton
Nama : Ma'mul Djamal,SP
NIM : 015541219
Program Studi : Magister Administrasi Publik

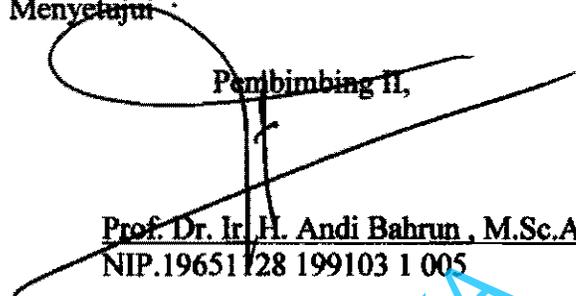
Menyetujui :

Pembimbing I,



Prof. Dr. Wenny Banga, M.Si.
NIP. 19561110198501 1001

Pembimbing II,



Prof. Dr. Ir. H. Andi Bahrun, M.Sc.Agric
NIP.19651128 199103 1 005

Mengetahui :

Ketua Bidang ISIP
Program Magister Administrasi Publik



Dra. Susanti, M.Si.
NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana,



Suciati, Ph.D
NIP. 1520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Ma'mul Djamal,SP.
 NIM : 015541219
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Analisis Strategi Kebijakan Pengembangan
 Komoditas Unggulan Jambu Mete di Kabupaten
 Buton

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : 20 Mei 2011
 Waktu : 21.25 – 22.55 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

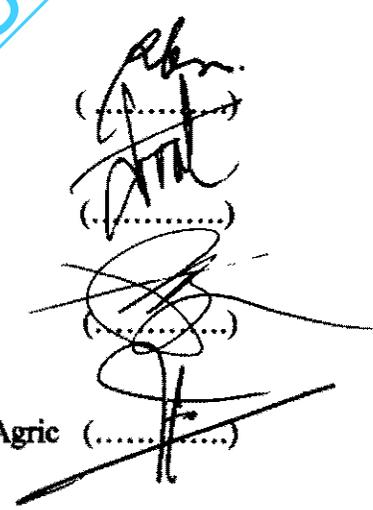
PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Drs. Wawan Ruswanto, M.Si

Penguji Ahli : M. Qudrat Nugraha, Ph.D

Pembimbing I : Prof. Dr. Wempy Banga, M. Si

Pembimbing II : Prof. Dr. Ir. H. Andi Bahrun , M.Sc.Agric (.....)



Handwritten signatures of the panel members, including the Chairman, Expert, and Supervisors I and II, with dotted lines indicating the names of the signatories.

UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Strategi Kebijakan Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete di Kabupaten Buton adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Baubau, Desember 2011

Yang Menyatakan,

82B60AAF829584484


(HAMID JAMAL)
NIM. 015541219

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sain Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan/penyusunan TAPM ini, sangatlah sulita bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed.Ph.D.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Susiati, Ph.D.
3. Kepala UPBJJ-UT Kendari selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
4. Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si., sebagai Pembimbing I dan Prof. Dr.Ir.H. Andi Bahrun, M.Sc., Agric. sebagai Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
5. Kepala Bidang ISIP selaku penanggungjawab program Magister Administrasi Publik;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton beserta seluruh staf yang telah membantu saya dalam proses penelitian;

7. Orang tua dan seluruh keluarga saya terutama istri dan anak-anak tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan materil dan moral;
8. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Saya menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu maka kritikan dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan dari TAPM ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga TAPM ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi kesejahteraan masyarakat.

Baubau, Desember 2011

Penulis

MA'MUL DJAMAL

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Teoritik	7
1. Konsep Strategis	7
2. Konsep Kebijakan	9
3. Strategi Kebijakan	11
4. Manajemen Strategik.....	16
a. Arti Stakeholder, Visi dan misi	22
1) Stakeholder	22
2) Visi	23
3) Misi	24
b. Analisis Lingkungan Strategis.....	25
1) Lingkungan Internal.....	25
2) Lingkungan Eksternal	25
c. Identifikasi Isu Strategis	26
d. Keputusan strategis	29
5. Komoditas Unggulan	32
6. Pengembangan Komoditas Unggulan	35
7. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	44
B. Kerangka Berpikir	46
C. Definisi Konsep Dan Operasional	48
BAB III. METODE PENELITIAN	50
A. Desain Penelitian	50
B. Populasi dan Teknik Penentuan Informan	51
C. Instrumen Penelitian	51

D. Prosedur Pengumpulan Data	51
E. Metode Analisa Data	51
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Kabupaten Buton	58
B. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Buton	60
C. Gambaran Umum Sektor Perkebunan	72
1. Renstra Perkebunan	74
2. Komoditas Perkebunan Unggulan Jambu Mete.....	75
3. Luas Lahan Perkebunan Sektor Unggulan	76
4. Sarana dan Prasarana Perkebunan	77
D. Temuan dan Pembahasan	79
1. Analisis Isu Strategis	79
a. Pengembangan Sektor Perkebunan	79
b. Visi	81
c. Misi	82
d. Analisis SWOT dalam Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete	83
2. Analisis lingkungan Eksternal	83
a. Aspek politik	84
b. Aspek Ekonomi	87
c. Aspek Sosial Budaya	93
d. Aspek Teknologi	95
3. Analisis lingkungan Internal	98
a. Faktor-Faktor Kekuatan Internal	100
b. Faktor-Faktor Kelemahan Internal	104
c. Matriks SWOT dan Isu Strategis	101
d. Identifikasi Isu strategis	118
e. Strategi Kebijakan Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete.....	113
1. Penguatan Kelembagaan	124
2. Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan terhadap Ancaman Iklim Ekstrem	124
3. Penguatan Modal Usaha Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete	124
4. Pengembangan Sentra Produksi Sektor Unggulan Jambu Mete...	125
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	126
A. Simpulan	119
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Mata Rantai Kegiatan Agribisnis	39
Bagan 2. Kerangka Analisa Yang Digunakan	48
Bagan 3. Diagram Matriks SWOT	52

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Pertanyaan dan Skor Litmus tets	54
Tabel 2.	Susunan Prioritas Isu Kebijakan Strategis.....	57
Tabel 3.	Komoditas Sektor Perkebunan Yang Dikembangkan di Kabupaten Buton	79
Tabel 4.	Data Permintaan Pasar Komoditas Perkebunan Kabupaten Buton Tahun 2010.....	88
Tabel 5.	Bantuan Alat Dan Mesin Pengolahan Komoditas Jambu Mete	96
Tabel 6.	Data Tentang Sumber Daya Komoditas Jambu Mete Yang Dimiliki Kabupaten Buton Tahun 2010	98
Tabel 7.	Data Kinerja Komoditas Unggulan Jambu Mete Dalam Kurun Waktu Tiga Tahun Terakhir	99
Tabel 8.	Data Luas Lahan Tanaman Jambu Mete Dengan Jarak Tanam Rapat	107
Tabel 9.	Data Produksi Tanaman Jambu Mete Yang di Panen Dini	109
Tabel 10.	Ringkasan Matriks SWOT	102
Tabel 11.	Matriks SWOT Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete di Kabupaten Buton	111
Tabel 12.	Matriks Dominan Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete di Kabupaten Buton	118
Tabel 13.	Susunan Prioritas Isu Strategis Menurut Skor litmus Tets	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perkebunan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian yang harus berpijak pada nilai dan ruh yang bersih dan peduli. Bersih dimaksudkan agar pembangunan perkebunan dapat bebas dari KKN, amanah, transparan dan akuntabel. Sedangkan peduli berarti memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat perkebunan di atas kepentingan pribadi dan golongan serta aspiratif.

Pembangunan perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas azas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan. Dengan demikian perkebunan dapat berfungsi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional, berfungsi ekologi untuk meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung, serta berfungsi sosial budaya sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Disisi lain, sebagai konsekuensi dari diterbitkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, berimplikasi pada terjadinya perubahan sistem pemerintahan Indonesia kearah yang lebih demokratis. Pada pelaksanaannya, terjadi desentralisasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pembangunan nasional. Perubahan ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan perkebunan.

Peran sektor pertanian/perkebunan disamping sebagai sumber penghasil devisa yang besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia, dan bila dilihat dari jumlah orang yang bekerja, maka sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja yang pada umumnya adalah tenaga kerja tidak terdidik, tidak memiliki keterampilan dan pemerataan pendapatan yang tidak merata. Atas kondisi ini sehingga bargaining power yang dimiliki oleh para petani kita sangat lemah, sehingga nilai jual sangat berpengaruh terhadap kondisi saat ini.

Pengalaman pahit krisis moneter dan ekonomi terus memberikan bukti empiris bahwa sektor pertanian secara umum merupakan sektor yang paling tangguh menghadapi terpaan krisis global. Bahkan hanya sektor pertanian satu-satunya yang masih mampu bertumbuh positif 0,03% (1998) sementara sektor lain bertumbuh negatif sebesar -13,7% (1998). Kekeliruan mendasar dalam pembangunan selama ini adalah sektor pertanian hanya diperlakukan sebagai sektor pendukung yang cenderung hanya untuk mengamankan kebijakan makro. Sektor pertanian hanya pengemban tugas penyediaan pangan dan bahan baku industri serta menampung tenaga kerja dalam rangka menjamin stabilitas ekonomi nasional. Sementara sisi lain, disadari atau tidak, petani yang menjadi pelaku utama pembangunan pertanian secara umum sering terabaikan kesejahteraannya (Hafsan, 2009 : 1).

Konsep utama dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 adalah penerapan asas desentralisasi dan pemberdayaan pemerintah daerah yang otonom. Konsekwensi dalil ini adalah kemandirian dari pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangga dan sumber daya lainnya yang digunakan bagi kesejahteraan masyarakat yang ada. Otonomi berarti penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu urusan rumah tangga

yang otonom, dan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Tujuan yang ingin dicapai adalah usaha sistematis dan terpadu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan asas demokratis, keadilan, pemerataan dan menjaga keselarasan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (penjelasan pasal 1, huruf h UU No.22 / 1999).

Tuntutan atas penerapan Undang-Undang tersebut adalah kesiapan dari pemerintah daerah untuk mengelola dan menata secara baik semua perangkat organisasi dan manajemen yang dimiliki dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan dan perubahan lingkungan eksternal yang terjadi agar pemerintah daerah mampu melaksanakan amanat yang dibebani padanya. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan ini amat dibutuhkan bagi suksesnya visi dan misi pemberdayaan masyarakat melalui penerapan prinsip otonomi.

Kabupaten Buton mau tidak mau bersiap diri dengan segala kemampuan yang ada untuk menggerakkan semua sektor komoditas unggulan yang dimiliki dan dengan strategi khusus mengembangkannya bagi kesejahteraan rakyat yang ada di Kabupaten Buton. Semua potensi dan kendala harus diinventarisir dan diidentifikasi sehingga penanganan dan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu.

Kontribusi yang diberikan oleh sektor Perkebunan cukup tinggi terhadap GDP Indonesia. Sektor perkebunan memberikan kontribusi sebesar 5,48% pada tahun 2008 dari PDRB pertanian sebesar 47,08%, kemudian menyusul sektor jasa lain-

Jain.(Buton Dalam Angka, 2009).

Sektor pertanian termasuk sektor Perkebunan mempunyai kedudukan yang strategis dan peranan yang penting terlihat dari kontribusinya terhadap pendapatan kotor domestik (PDB = Produkt Domestik Bruto) sebesar 46,82% pada tahun 1983 dan mencapai 20,2 % pada tahun 1990 dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,4 % per tahun. Azhari, (2000 : 186).

Luas areal perkebunan di Kabupaten Buton pada tahun 2008 adalah seluas 31.480,46 ha, hal ini tentunya sangat potensial bagi pengembangan tanaman perkebunan. Ada 12 jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Buton saat ini yaitu aren/enau, asam jawa, cengkeh, jambu mete, kakao, kapuk, kelapa dalam, kelapa hybrida, kemiri, kopi, lada dan pala. Salah satu andalan/unggulan komoditas perkebunan di wilayah ini adalah komoditas Jambu Mete. Tanaman jambu mete dikembangkan hampir semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Buton sementara luas lahan tanaman ini sekitar 22,593.00 Ha. dengan produksi 7,208.00 Ton. Produktivitas tanaman jambu mete yang rata-rata hanya mencapai 250 – 350 kg/ha sementara produktivitas rata-rata nasional adalah sekitar 800 kg/ha dalam bentuk gelondongan. Statistik Perkebunan, (2007 : 3)

Permasalahan yang dihadapi dalam sektor perkebunan di Kabupaten Buton antara lain: Skala usaha atau tingkat produktivitas petani perorangan kecil, sumber produksi tersebar diberbagai tempat sehingga menyulitkan proses distribusi dan pemasaran, kualitas produk perkebunan tersebut bervariasi, produksi tanaman dipengaruhi oleh musim, dukungan permodalan dan lembaga keuangan sangat terbatas, penerapan teknologi yang masih terbatas, kondisi sarana dan prasarana yang

terbatas pula dan belum terintegrasi secara optimal dengan industri pengolahan, kualitas sumber daya manusia masih rendah, strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Fenomena-fenomena yang dikemukakan tersebut mengungkapkan bahwa strategi-strategi kebijakan pemerintah Kabupaten Buton dalam pengembangan komoditas jambu mete belum sesuai harapan, artinya belum ada suatu kebijakan/aturan-aturan yang baku yang dapat dipedomani oleh masyarakat/petani dan oleh pengambil kebijakan dalam rangka pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton. Sehubungan dengan hal tersebut, maka analisis strategi pengembangan komoditas jambu mete di Kabupaten Buton menjadi urgen untuk dilakukan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang mengungkapkan bahwa strategi-strategi kebijakan pemerintah Kabupaten Buton dalam pengembangan komoditas unggulan daerah belum sesuai harapan. Oleh karena itu maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana mendapatkan strategi kebijakan yang tepat dalam pengembangan sektor komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton .

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk :

Untuk menemukan strategi kebijakan yang tepat dalam pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton .

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan ilmu administrasi publik.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada pemerintah daerah tentang analisis strategi kebijakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton khususnya kepada para pengambil kebijakan guna memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan masyarakat khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Buton.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Konsep Strategis

Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, bagaimana cara terbaik untuk mencapai organisasi. Qudrat (2007:1.5). Pendapat tersebut dipertegas oleh Salusu, (1996:101) bahwa strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Oleh karena itu strategi dapat dikatakan sebagai penjabaran misi guna menjembatani organisasi dan lingkungannya dalam pencapaian tujuan. Strategi dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang menjelaskan tentang respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok.

Dalam organisasi publik/perusahaan publik terdapat tiga hirarki strategi, yaitu tingkat korporasi/organisasi, tingkat unit bisnis atau organisasi dan tingkat fungsional. Dari ke tiga tingkat tersebut, yang melakukan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi yaitu tingkat puncak, tingkat menengah dan tingkat bawah. Pada tingkat puncak dirumuskan strategi untuk tingkat korporasi atau organisasi, kemudian pada tingkat menengah dirumuskan strategi untuk tingkat bisnis, sedangkan pada tingkat menengah dirumuskan strategi untuk tingkat fungsional. Qudrat (2007 : 1.4).

Konsep strategi yang dikemukakan oleh Stoner (1995:21), berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu :

- a. Perspektif apa yang organisasi lakukan (*intends to do*) dan
 - b. Perspektif apa yang seharusnya organisasi lakukan (*eventually does*)
- Perspektif yang pertama, menjelaskan strategi didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Para manajer dapat memainkan peranan

aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Perspektif pertama ini sering digunakan dalam situasi bisnis yang tidak pasti dalam lingkungan yang selalu mengalami perubahan. Perspektif kedua, menjelaskan strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Setiap organisasi diyakini memiliki suatu strategi meskipun hal tersebut tidak pernah dinyatakan secara eksplisit. Perspektif ini sering digunakan oleh para manajer bersifat reaktif. Mereka hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan pasif bila diperlukan.

Jadi dengan adanya perspektif yang dilahirkan baik itu perspektif pertama mengenai apa yang organisasi lakukan dan perspektif kedua mengenai apa yang seharusnya organisasi lakukan adalah acuan dalam mencapai tujuan organisasi dan lingkungannya dalam melaksanakan strategi-strategi organisasi, sehingga berdasarkan dua perspektif itu, strategi yang dinyatakan secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan bisnis. Strategi merupakan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi, bila strategi tidak dirumuskan dalam konsep yang jelas maka keputusan yang diambil sering bersifat subjektif.

Lebih lanjut Hax dan Majluf dalam Salusu (1996 : 100-101) menawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut :

1. strategi adalah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral;
2. menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya;
3. menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi;
4. mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya;
5. melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Dengan defnisi ini, strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital, sementara pada

saat yang bersamaan organisasi akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.

2. Konsep Kebijakan

Kebijakan publik pada dasarnya berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat, oleh karena itu kebijakan publik dapat dikatakan sebagai ilmu sosial terapan yang berperan sebagai *problem solver*. Dalam konteks ini kebijakan publik dan penentu kebijakan sendiri haruslah berorientasi pada kepentingan publik, harus mempunyai semangat kepublikan dan berpegang pada konsep demokrasi. Untuk keperluan inilah diperlukan kegiatan analisis kebijakan publik sebagai upaya untuk mendapatkan kebijakan publik yang aktual. Selanjutnya beliau memberikan pengertian tentang analisis kebijakan publik adalah merupakan sebuah seni di dalam memahami sebuah rencana kebijakan publik yang akan diterapkan oleh sebuah otoritas publik. Analisis kebijakan publik memerlukan sebuah uraian tentang data, informasi dan berbagai alternatif yang memungkinkan ditempuh untuk menentukan sebuah kajian publik. Kismartini (2009 : 2.3)

Dunn (1998 : 2.5) mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argument untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Badjuri dan Yuwono (2002 : 66) mengemukakan lima argument tentang arti penting analisis kebijakan publik, yakni:

- a. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang ilmiah, rasional dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik. Ini artinya bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan

pertimbangan ilmiah yang rasional dan obyektif bukan semata-mata pertimbangan sempit, misalnya pertimbangan untuk mengamankan kepentingan politik tertentu.

- b. Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (*public Welfare*). Hal ini karena analisis kebijakan harus mendasarkan diri pada visi dan misi yang jelas, yaitu mengatur sebuah persoalan agar tercipta tertib sosial menuju masyarakat yang sejahtera.
- c. Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan bersifat multidimensional, saling terkait dan berkorelasi satu dengan lainnya. Oleh karena itu kenyataan ini maka pihak analisis kebijakan mestinya berupa sebuah tim yang multidisiplin yang meliputi berbagai bidang keahlian (*expertise*).
- d. Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksana dan evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan itu mencakup dua hal pokok, yaitu hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategis yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang.
- e. Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat ini dapat diperoleh dari berbagai mekanisme, seperti melalui konsultasi publik, debat publik, curah pikir bersama berbagai pihak terkait (*stakeholders*), delibrasi publik.

Kebijakan publik merupakan bagian bahkan inti dari administrasi publik, sebagaimana batasan-batasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Kebijakan publik terdiri dari keputusan politik untuk mengimplementasikan program untuk mencapai tujuan sosial. Pilihan-pilihan kebijakan publik selama ini sarat dengan muatan politik yang acapkali mengesampingkan tujuan kebijakan publik untuk melayani kebutuhan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan publik tidak berada dalam ruang hampa, sebaliknya dia berada dalam ranah yang sarat dengan konflik kepentingan dan konflik politik. Kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang

dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-inastansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam kaitan ini aktor-aktor bukan pemerintah atau swasta tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan Negara. Wahab (1990 : 15).

Mendekatkan kebijakan publik kearah kepentingan publik menjadi sebuah keharusan jika tujuan reformasi administrasi ingin dapat tercapai. Muatan label publik menurut Denhard (1984 : 24), perlu ditandai dengan kinerja-kinerja yang bersyarat bertalian dengan komitmen terhadap nilai-nilai sosial politik yang telah disepakati bersama, implementasi nilai-nilai sosial politik yang berlandaskan etika dalam tataran manajemen publik, realisasi nilai-nilai sosial politik, penekanan pada pekerjaan publik dalam rangka melaksanakan mandat pemerintah, keterlibatan dalam pelayanan publik dan bekerjasama dalam rangka penanganan kepentingan umum Denhard dalam Hariyoso (2002:49).

3. Strategi Kebijakan

Unsur-unsur yang merupakan faktor yang menentukan atau determinan strategi, yaitu : *pertama*, tujuan dan sasaran. Tujuan (*objektif*) berbeda dengan sasaran (*goal*). Sasaran organisasi (*organizational*) adalah keinginan yang hendak dicapai, sedangkan tujuan organisasi adalah pernyataan yang sudah mengarah ke kegiatan untuk mencapai goals; *kedua* adalah lingkungan (*environment*). Sasaran organisasi senantiasa berhubungan dengan lingkungan yang bisa mengubah sasaran. Sebaliknya, sasaran organisasi dapat mengontrol lingkungan. Lingkungan di sini adalah lingkungan eksternal dan kendala-kendala eksternal. Peluang eksternal meliputi

faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, hukum, dan teknologi yang menyediakan ruang gerak bagi organisasi; *ketiga*, yaitu kapabilitas internal. Faktor ini meliputi struktur dan besarnya organisasi, sumber daya, program, kegiatan, kepemimpinan, iklim, dan lain-lain yang selalu memperhitungkan kekuatan dan kelemahan. Dengan demikian organisasi dapat menentukan bagaimana ia harus berkompetisi di dalam lingkungan eksternal; *keempat*, adalah komunikasi. Strategi bisa berhasil baik apabila komunikasi berjalan dengan baik. Bagaimanapun juga, informasi haruslah dikomunikasikan sebab hanya dengan berkomunikasi yang efektif peluang yang ada dalam lingkungan sekitar dapat bermanfaat bagi organisasi, karena peluang yang ada dalam lingkungan sekitar dapat bermanfaat bagi organisasi, karena peluang tidak setiap saat ada dan tidak akan berada disana sepanjang waktu Salusu (1996 : 1-2).

Menurut Islamy (2000 : 1.4), terdapat beraneka ragam pengertian kebijakan yaitu sebagai berikut :

- a. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.
- b. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usaha kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.
- c. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

- d. Amara Raksataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu; (1) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; (2) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; (3) penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Dalam menghadapi berbagai kondisi yang ada, administrasi negara dituntut untuk melakukan pembaharuan dengan reformasi atau revitalisasi. Reformasi ini bisa telah melekat pada diri administrasi negara tersebut (*inherent*) dan dapat pula berasal dari luar (*inducement*). Menurut Warella (2005:42), sesungguhnya reformasi administrasi negara telah inherent dalam tubuh administrasi negara itu sendiri sejak lahir, namun demikian faktor-faktor luar juga berpengaruh.

Rendahnya kemampuan birokrasi dalam merespon dan memformulasikan kebijakan sebagaimana yang dikehendaki publik acap kali melahirkan ketidakpercayaan terhadap birokrasi publik. Reformasi administrasi publik pada hakekatnya menyangkut tiga hal yaitu perbaikan administrasi, perubahan administrasi, dan kemajuan administrasi. Reformasi dengan ketiga hal yang termasuk di dalamnya tersebut dilakukan untuk menghadapi berbagai perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi. Menurut Warsito (2005:13) pada kondisi upheaval dan turbulence, yang diperlukan tidak saja kesadaran untuk berubah tetapi juga perlu interconnection dan interdependence. Oleh karena itu diperlukan *strategi* yang matang yang berorientasi pada *integrated approach*.

Menurut Osborn (2000: 45) bahwa ada lima strategi untuk meningkatkan kinerja pemerintah yaitu : *Pertama*, strategi inti yaitu bagian yang menentukan tujuan sistem organisasi pemerintah. *Kedua*, strategi konsekuensi yang menentukan sistem insentif pemerintah. *Ketiga*, strategi pelanggan yaitu terutama memusatkan pada akuntabilitas, pertanggungjawaban, kepada siapa seharusnya bertanggung jawab. *Keempat*, strategi kontrol yang menentukan letak pengambilan keputusan. Dalam sistem birokrasi sebagian besar kekuasaan tetap ada di sekitar puncak hirarki. Dan strategi *kelima* strategi budaya yang menentukan budaya organisasi pemerintah: nilai-nilai, norma, sikap dan harapan pegawai.

Penggunaan asumsi strategi yang lama/tradisional dalam ilmu administrasi dimana sisten administrasi merupakan instrumental yang lebih murui sebagai mesin pelaksana keputusan, organisasi pemerintah yang sangat besar tidak akan dapat bekerja dengan baik. Ceiden (1982:15).

Lebih lanjut Ceiden mengemukakan trend yang lebih meyakinkan dalam pencapaian reformasi administrasi. *Pertama*, Pengurangan volume urusan publik membuat perjanjian dengan lebih banyak fraksi kecil. Ketika pemerintahan lebih kecil, maka memungkinkan pemimpin untuk mengetahui lebih banyak apa yang harus dilakukan. Dengan demikian pemerintah akan dapat menangani berbagai permasalahan secara lebih spesifik dari berbagai isu dan untuk membuat keputusan. *Kedua*, peran administrasi publik akan mentransformasikan dari permasalahan yang lebih besar menjadi lebih kecil dalam implementasi kebijakan untuk mempertanggungjawabkan pilihan dari inisiatif kebijakan, manajemen yang sangat besar, organisasi yang sangat kompleks, dan personifikasi dari pemerintah untuk memerintah. *Ketiga*, eksistensi untuk organisasi publik dalam periode ini tidak memiliki instrumental yang lebih besar melainkan institusional. Mereka

mengembangkan kekuasaan independen. Mereka memiliki suara dominan untuk membuat aturan yang diinginkan. *Keempat*, beberapa organisasi publik tidak memiliki kompetitor, tidak memiliki pesaing, tidak ada pihak swasta yang mampu mengalahkannya. Mereka memiliki kecenderungan monopoli, kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan dalam batas kekuasaannya. *Kelima*, subyek reformasi administrasi merupakan organisasi yang berskala besar yang cenderung kaku, konservatif, mengikuti kebiasaan dan lambat dalam bergerak. Keenam, reformasi lebih berat untuk dilakukan Ceiden (1982:89).

Disamping strategi reformasi, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, sebaliknya juga dapat dilakukan strategi *self-reform*, yang merupakan proses memperbaharui dari dalam diri atau revitalisasi. Konsep revitalisasi kurang mendapat perhatian dalam administrasi publik dibanding dalam dunia bisnis. Revitalisasi merupakan proses membuat inisiatif, kreasi dan konfrontasi yang diperlukan dalam perubahan, dan untuk memungkinkan organisasi tetap bertahan, beradaptasi dengan kondisi baru, memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, dan bergerak ke arah organisasi yang lebih dewasa Lippitt dalam Ceiden (1982:89). Lebih lanjut dikatakan organisasi privat dan publik, mengerjakan kembali bidang garapannya, memperbaharui struktur, meningkatkan hubungan, dan menangani kembali tanggungjawabnya terhadap anggota, clientsm atau pekerja. Mereka juga mengerjakan inisiatif mereka, lebih kontinyu, dengan atau tanpa bantuan dari luar. Mereka beranggapan bahwa tanggung jawab perubahan ada pada diri mereka.

Revitalisasi merupakan strategi yang meyakinkan dan dapat diterima. Sebelumnya revitalisasi memiliki kekurangan yang serius dalam sektor publik. Dibandingkan dengan reformasi yang dipengaruhi dari luar, revitalisasi kurang ideal, kurang praktek dan juga lebih praktis, lebih kompromi dan kurang berani, kurang visioner, kurang inklusif. Revitalisasi tidak cukup secara sendiri untuk mentransformasi administrasi publik. Reformasi dan revitalisasi harus berjalan bersama dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki nilai kelebihan dan kekurangan. Keduanya diperlukan untuk menjamin *good government*, meningkatkan kinerja sektor publik, dan mengurangi kesalahan administrasi. Organisasi dalam skala besar tidak merespon dengan mudah untuk melakukan perubahan dengan cepat.

4. Manajemen Strategik

Qudrat (2007 : 1.2) mengemukakan bahwa manajemen strategik adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan dalam suatu organisasi publik atau organisasi yang berkaitan dengan perlunya penerapan strategi. Manajemen strategi senantiasa diperlukan oleh suatu organisasi publik, dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan organisasi akan dapat dicapai secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Manajemen strategik adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi publik/perusahaan publik, karena melibatkan pengambilan keputusan yang rumit, berjangka panjang dan berorientasi ke masa depan serta membutuhkan sumber daya

yang besar, maka partisipasi manajemen puncak tentunya menjadi sangat penting artinya.

Manajemen strategik juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan pada tingkat (jenjang) yang melibatkan para perencana pada tingkat korporasi atau pusat (organisasi publik/perusahaan publik), unit bisnis (satuan organisasi) dan fungsional serta personil-personil pendukung. Makin rendah tingkatannya, kegiatan strategik makin bersifat spesifik, sempit, berjangka pendek dan berorientasi ke tindakan dengan resiko yang lebih kecil tetapi peluangnya untuk memberikan dampak juga relatif kecil.

Nawawi (2000 : 147-148) menginventarisir 4 (empat) definisi dari manajemen strategik sebagai berikut :

- a. Manajemen strategik adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.
- b. Manajemen strategik adalah usaha manajemen menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan.
- c. Manajemen strategik adalah suatu keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi.

- d. Manajemen strategik adalah perencanaan berskala besar (perencanaan strategik) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil).

Manfaat dari manajemen strategik Nawawi (2000 : 183-186) adalah sebagai berikut :

- a. Institusi atau organisasi akan menjadi dinamis dalam berproses atau beraktivitas.
- b. Mampu menjadi pengendali dalam mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki secara terpadu dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen secara efisien dan efektif.
- c. Penerapan manajemen strategik dapat dilakukan dengan memilih dan menetapkan strategi sebagai pendekatan yang logis, rasional dan sistematis sebagai acuan dalam perumusan dan pelaksanaannya.
- d. Berfungsi sebagai sarana dan mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, prakarsa, inovasi dan informasi baru, serta cara merespon perubahan lingkungan yang ada.
- e. Mampu mendorong semua pihak (stakeholder) yang ada untuk ikut serta terlibat sesuai dengan wewenang dan posisi yang dimilikinya.
- f. Menuntut semua pihak yang ada atau terlibat untuk ikut berpartisipasi secara penuh terhadap keberhasilan yang ingin di capai.

Jadi manajemen strategis memberikan gambaran kepada pengambilan keputusan mengenai bagaimana suatu institusi dapat digerakan untuk mencapai suatu

tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diembannya, dengan mengolah secara efektif faktor-faktor strategis yang ada.

Untuk menerapkan teknik manajemen strategis secara baik dan berhasil, maka harus mempertimbangkan delapan langkah pokok berikut ini menurut Bryson (1999 : 55-71) :

- a. Kesepakatan awal terhadap suatu proses manajemen strategik. Untuk itu perlu dilakukan negosiasi dengan para pembuat keputusan (decision maker) agar diperoleh dukungan dan komitmen dalam implementasinya kemudian.
- b. Mengidentifikasi permasalahan yang ada, baik yang bersifat formal maupun informal secara jelas dan transparan, karena mandat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan suatu institusi.
- c. Memperjelas misi dan nilai-nilai institusi, karena posisinya penting sebagai tujuan bagi kebutuhan sosial atau politik yang ingin diraih.
- d. Menilai lingkungan eksternal yang menyangkut peluang maupun ancaman yang ada. Faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan eksternal ini adalah meliputi politik, ekonomi, sosial dan teknologi.
- e. Menilai lingkungan internal yang berhubungan dengan kekuatan yang dimiliki institusi maupun kelemahan yang ada. Dalam hal ini institusi dapat memonitor sumber daya sebagai input, strategi saat ini sebagai konversi dan kinerja yang diperoleh sebagai output.
- f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi, antara lain yang menyangkut tujuan, cara, falsafah, lokasi, ketepatan waktu, pihak-pihak

mendapat keuntungan atau mengalami kerugian jika strategi baru diimplementasikan.

- g. Merumuskan strategi baru dan tepat untuk mengelola isu-isu strategis yang ada dan muncul kemudian.
- h. Membangun suatu visi institusi yang tepat dimasa yang akan datang.

Hal ini erat kaitannya dengan manajemen strategis yang dungkapkan oleh Suwarsono (1994:6) yaitu dapat diartikan sebagai usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Komponen pokok dari manajemen strategis adalah:

1. Analisis lingkungan yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman;
2. Analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan;
3. Strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan misi.

Menurut Salusu (1996:493), manajemen strategis adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sarannya tercapai. Menurut Wahyudi (1996:15) manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) terhadap keputusan strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai masa depan. Siagian (1995:15-42) mengatakan bahwa merumuskan manajemen strategis sebagai rangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan berkembangnya organisasi menjadi sangat kompleks, di mana pengelolaan sumber daya organisasi menjadi semakin rumit. Keadaan ini menyebabkan semakin pentingnya suatu manajemen strategi agar organisasi

berkembang secara sehat dan mampu mempertahankan eksistensinya. Membahas konsep manajemen strategis berarti membicarakan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Dalam lingkungan organisasi, manajemen strategis mampu menciptakan sinergi dan *l'esprit de corps* yaitu semangat korps yang penuh integritas sehingga dapat melicinkan jalan menuju sasaran organisasi. Semangat itu diharapkan akan meningkatkan produktivitas mereka. Dengan begitu organisasi akan mampu bertahan lama, bebas dari perasaan curiga antar karyawan. Hasilnya akan lebih mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya.

Manajemen strategis di lingkungan pemerintahan akan banyak berkaitan dengan pengalokasian kekuasaan dan sumber daya, pendelegasian wewenang mengambil keputusan, penggalian sumber-sumber keuangan pemanfaatan dana yang diperoleh dari rakyat berupa pajak dengan cara yang paling efisien dan paling efektif. Manajemen strategis tidak terlepas dari strategi itu sendiri. Strategi secara luas dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi itu melakukannya. Bryson (1999:5).

Adanya manajemen strategis, organisasi dimungkinkan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dalam lingkungan eksternal dan sekaligus memanfaatkannya. Ancaman dari lingkungan dapat dihindari seminimal mungkin dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

Dengan peluang dan kekuatan, organisasi pun dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Bahkan manajemen strategis dapat memberi petunjuk awal bagaimana mengantisipasi perubahan-perubahan awal dari lingkungan eksternal. Salusu (1996:495).

Manfaat dari penggunaan manajemen strategis menurut Yoo dan Digman dalam Salusu (1996:498):

1. Manajemen strategis mampu memberikan petunjuk bagaimana mengantisipasi masalah-masalah dan peluang di masa yang akan datang;
2. Memungkinkan para karyawan memahami tujuan dan sasaran organisasi;
3. Meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan;
4. Menyediakan informasi kepada para pengambil keputusan tepat pada waktunya;
5. Mempercepat pengambilan keputusan yang bermutu dan bisa menghemat biaya.

Dengan konsep manajemen strategis, inilah pada akhirnya akan dihasilkan sejumlah alternatif strategi dalam kebijakan pengembangan komoditas unggulan sektor perkebunan di Kabupaten Buton.

a. Stakeholder, Visi dan Misi

Qudrat (2007 : 2.4-2.5) Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi baru secara tepat adalah sebagai berikut :

(1) Stakeholders

Stakeholder adalah siapapun yang memperhatikan atau harus memperhatikan organisasi. Pengertian lain dari stakeholder yang dapat digunakan untuk memantapkan pemahaman adalah semua pihak atau siapapun yang memiliki taruhan

dalam keberhasilan organisasi tersebut. Sedangkan Stoner (1995 : 45) memberikan pengertian sebagai kelompok yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh cara organisasi berusaha mencapai sasarannya. Organisasi publik seperti pemerintahan melalui proses pemilihan yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dengan jalannya organisasi pemerintahan tersebut. Sebaliknya, organisasi pemerintahan itu harus bertanggungjawab atas pekerjaannya kepada banyak pihak. Para pihak yang biasanya mengoreksi perjalanan organisasi publik diantaranya adalah penyandang dana, klien, masyarakat luas, organisasi lain, dan pembuat undang-undang. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, semua pihak ini disebut dengan external stakeholders. Sedangkan para pihak yang ada dalam organisasi seperti anggota dewan direktur, staf, relawan dan pegawai/karyawan disebut dengan internal stakeholders.

(2) Visi

Visi menggambarkan masa depan yang lebih baik, memberikan harapan dan mimpi, tetapi juga menggambarkan hasil-hasil yang memuaskan. Visi adalah gambaran kata-kata yang menampakkan kekokohan dan kesatuan organisasi. Visi memiliki kekuatan yang mampu mengundang, memanggil, dan menyerukan kepada setiap orang untuk beramai-ramai memasuki masa depan. Para perencana strategik akan lebih muda menjabarkan rencana-rencananya manakala pemimpin juga mendapatkan petunjuk yang jelas bagaimana harus mengendalikan organisasi. Inilah visi keberhasilan yang seringkali disebut sebagai visi inspirasional. Sebagaimana yang dijelaskan Naisbitt, (1984 : 23), bahwa visi strategik merupakan suatu gambaran

yang jelas tentang apa yang ingin dicapai, ikut rincian dan instruksi tentang setiap langkah untuk mencapai tujuan itu.

(3) Misi

Misi merupakan serangkaian langkah yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran jangka pendek organisasi. Rumusan misi biasanya disusun untuk jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Pernyataan misi merupakan pernyataan sasaran secara tertulis, yang disusun untuk mengilhami pekerja agar mempunyai komitmen terhadap organisasi.

Hal-hal yang ingin dicapai melalui rumusan misi seperti yang diuraikan di muka adalah :

- a. Dengan rumusan misi yang tepat, setiap anggota organisasi mempunyai persamaan persepsi tentang maksud keberadaan organisasi.
- b. Dengan rumusan misi yang baik, akan mempunyai daya tarik bagi stakeholders untuk memberikan kontribusinya secara maksimal demi terembannya misi organisasi.
- c. Dengan rumusan misi, pengambil keputusan strategis dapat menentukan skala prioritas organisasi.
- d. Dengan rumusan misi yang baik, organisasi dapat memberikan petunjuk tentang iklim organisasi yang bagaimana yang akan ditumbuhkan, dikembangkan dan dipelihara dalam organisasi.
- e. Dengan rumusan misi yang tepat dapat diketahui tentang besaran organisasi yang tepat, pembagian tugas yang jelas, keseimbangan antara wewenang dan tanggung

jawab, pengambilan keputusan yang sentralisasi atau desentralisasi, kesatuan arah, rentang kendali, diversifikasi atau konsentrasi produk, teknologi yang digunakan, dan bentuk-bentuk spesialisasi dan keterampilan anggota organisasi.

- f. Dengan rumusan misi yang tepat, dapat mengidentifikasi secara umum hal-hal yang ingin dicapai, yang dapat diukur dan dikendalikan berdasarkan kriteria yang rasional dan objektif.

b. Analisis Lingkungan Strategis

(1) Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah analisa yang diadakan pada level internal organisasi dalam rangka menilai kekuatan (*strength*) dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Dengan demikian proses analisa lingkungan internal merupakan proses yang sangat penting dan harus dilakukan, karena dengan analisa lingkungan internal maka akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada dan selanjutnya berguna untuk mengetahui isu-isu strategis. Rangkyu (1997 : 28). Adapun yang tercakup dalam lingkungan internal adalah faktor sumber daya, strategi yang digunakan dan faktor kinerjanya.

(2) Lingkungan Eksternal

Analisa lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang mengekspresikan diri sebagai kekuatan atau kelemahan yang berada di luar organisasi, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suatu organisasi secara paksa dan pada akhirnya memberikan dampak pengaruh timbal balik antara organisasi dengan lingkungan tersebut.

Pada hakekatnya lingkungan eksternal mengandung dua aspek yaitu peluang dan ancaman. Lingkungan eksternal suatu institusi atau organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap pencapaian misi yang disepakati. Pengaruhnya yang cukup kuat ini menyebabkan perlunya perhatian yang serius terhadap dimensi yang terkandung di dalamnya, meskipun berada di luar organisasi. Adapun faktor-faktor yang tercakup dalam faktor eksternal tersebut adalah ; aspek politik, ekonomi, social dan teknologi.

c. Identifikasi Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan pengertiannya adalah konflik. Konflik bisa terjadi pada arah tujuan, cara, prinsip, lokasi, waktu dan kelompok-kelompok yang memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian akibat dampak atau hasil dari pemecahan isu tersebut. Untuk memunculkan dan memecahkan isu secara efektif, institusi atau organisasi harus dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan akan terjadinya konflik yang biasanya tidak dapat dihindari. Bryson (1995 : 65).

Untuk menyeleksi dan memilih isu strategis secara tepat, maka dapat digunakan 5 teknik analisa. Nawawi (2000 : 175-176), sebagai berikut :

1. Teknik matriks faktor internal dan eksternal (*The Internal And External Factor Matrix*) yang dilakukan dengan analisis dan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan serta mengkaji peluang dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan suatu misi, baik yang bersumber dari faktor dari dalam maupun dari luar institusi.

2. Teknis matriks profil kompetitif (*The competitive Profile Matrix*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan institusi yang sejenis, agar dapat diadaptasi atau digunakan strateginya.
3. Teknik matriks memperkuat dan mengevaluasi posisi (*The Strength Position And Evaluation Matrix*), yang dilakukan dengan mencocokkan kemampuan sumber daya internal yang dimiliki (kinerja institusi) untuk memperkuat posisi dengan peluang yang ada, dan mengatasi atau menghindari resiko faktor eksternal.
4. Teknis matriks dari kelompok konsultan Boston (*The Boston Consulting Group Matrix*), dilakukan dengan menetapkan strategi yang berbeda-beda untuk setiap biro atau bidang sebagai unit atau satuan kerja.
5. Teknik matriks strategi induk (*The Grand Strategy Matrix*), yang dilakukan dengan menetapkan posisi yang kompetitif diukur dari tingkat keunggulan atau keberhasilan maksimum yang dapat dicapai.

Model analisis situasi yang paling populer adalah "analisis SWOT". Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Rangkuti (1999:11). Kekuatan dan kelemahan berada dan dimiliki oleh organisasi sedangkan peluang dan ancaman berada di luar organisasi. Kekuatan dan kelemahan adalah kondisi internal organisasi, adapun peluang dan ancaman adalah situasi eksternal organisasi yang akan dihadapi oleh setiap organisasi.

Analisis SWOT adalah salah satu alat, cara, dan instrumen dalam mengambil suatu keputusan terutama keputusan strategis agar organisasi dapat mengemban misi, program, tujuan, dan sasaran organisasi dengan tepat. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan melakukan analisis strategis, kemampuan memaksimalkan peranan faktor kekuatan, dan pemanfaatan peluang, sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Siagian (2005:22).

Analisis SWOT dapat diterapkan paling sedikit dalam tiga bentuk untuk membuat keputusan yang sifatnya strategis pula. Pertama, analisis SWOT memungkinkan para pengambil keputusan kunci menggunakan kerangka berpikir logis dalam pembahasan yang mereka lakukan yang menyangkut situasi tempat organisasi berada, identifikasi, dan analisis berbagai alternatif yang layak untuk dipertimbangkan, dan akhirnya, menjatuhkan pilihan pada alternatif yang diperkirakan paling ampuh. Kedua, melalui perbandingan secara sistematis antara peluang dan ancaman eksternal di satu pihak dan kekuatan serta kelemahan internal di lain pihak. Ketiga, menyadari bahwa tantangan utama dalam penerapan analisis SWOT terletak pada identifikasi dan posisi sebenarnya suatu organisasi. Siagian (1995:23).

d. Keputusan Strategis

Keputusan adalah upaya memilih alternatif terbaik dan merupakan inti kepemimpinan dan manajemen yang menjadi sub-sistem administrasi sebagai suatu sistem. Keputusan yang dihasilkan oleh manajemen dan kepemimpinan organisasi pada dasarnya terdiri atas keputusan strategis, keputusan teknis, dan keputusan operasional. Keputusan strategis sangat terkait dengan strategi dan manajemen strategis. Konflik yang terjadi di lingkungan aparatur pemerintahan umumnya disebabkan adanya ketiadakejelasan kewenangan yang dimiliki oleh para aparatur pemerintahan terutama wewenang pembuatan keputusan-keputusan administrasi yang rawan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan-keputusan administrasi yang abu-abu tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan administrasi sehingga perlu diawasi. Jika selama ini sistem akuntabilitas lebih berdasarkan pendekatan pengawasan keuangan/anggaran, maka sudah waktunya untuk mengutamakan suatu mekanisme pengawasan akuntabilitas dengan pendekatan administrasi negara dan hukum terutama terhadap diskusi yang dikeluarkan oleh para aparatur penyelenggara pemerintahan. Hal ini amat penting untuk segera dilakukan mengingat salah satu sumber konflik di lingkungan aparatur penyelenggara pemerintahan timbul akibat adanya keputusan administrasi ini demikian juga dengan masalah-masalah korupsi di lingkungan aparatur penyelenggara negara, khusus mengenai pengawasan terhadap keputusan administrasi, hal ini bersifat mendesak. Berdasarkan fakta pengabaian terhadap penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh keputusan administrasi ini seringkali

diabaikan. Pengabaian ini menimbulkan suatu beban yang harus dipikul kembali oleh rakyat, rakyat kembali dirugikan dengan adanya pengabaian penyelesaian ini. Dwiyana (2008 : 1-2)

Menurut Kuntoro (1987:6), untuk memperoleh keputusan yang signifikan dengan kondisi yang ada merupakan rangkaian proses dari analisis kasus yang memformulasikan semua keputusan yang akan diambil berdasarkan justifikasi yang dibuat secara kualitatif maupun kuantitatif, terstruktur maupun tidak terstruktur. Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategis. Salah satu model pemecahan masalah yang dapat digunakan adalah model matriks SWOT dan matrik internal-eksternal.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Rangkiti (1999:17).

Selanjutnya Salusu (1986:27), mengatakan bahwa strategi adalah seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Adapun unsur-unsur yang merupakan faktor yang menentukan atau determinan strategi, yaitu: pertama, tujuan dan sasaran. Tujuan (*objective*) berbeda dengan sasaran (*goal*). Sasaran organisasi (*organizational goals*) adalah keinginan yang hendak dicapai, sedangkan tujuan organisasi (*organizational objective*) adalah pernyataan yang sudah mengarah ke kegiatan untuk mencapai goals. Kedua adalah

lingkungan (*environment*). Sasaran organisasi senantiasa berhubungan dengan lingkungan yang bisa mengubah sasaran. Sebaliknya, sasaran organisasi dapat mengontrol lingkungan. Lingkungan disini adalah lingkungan eksternal dan kendala-kendala eksternal. Peluang eksternal meliputi faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, hukum, dan teknologi yang menyediakan ruang gerak bagi organisasi. Sedangkan kendala-kendala eksternal adalah apa yang tidak dapat dilakukan, yang juga berasal dari lingkungan makro dan mikro. Ketiga, yaitu, kapabilitas internal. Faktor ini meliputi struktur dan besarnya organisasi, sumber daya, program, kegiatan, kepemimpinan, iklim, dan lain-lain dan selalu memperhitungkan kekuatan dan kelemahan. Dengan demikian, organisasi dapat menentukan bagaimana ia harus berkompetisi di dalam lingkungan eksternal. Keempat adalah komunikasi. Strategi bisa berhasil baik apabila komunikasi berjalan dengan baik. Bagaimanapun juga, informasi haruslah dikomunikasikan sebab hanya dengan komunikasi yang efektif peluang yang ada dalam lingkungan sekitar dapat bermanfaat bagi organisasi, karena peluang tidak setiap saat ada dan tidak akan berada di sana sepanjang waktu. Salusu (1986:29).

Pembahasan strategi berkaitan dengan organisasi baik organisasi bisnis, organisasi publik, maupun organisasi non-profit/non-publik, sangat penting karena pimpinan organisasi seharusnya memahami posisinya dalam menentukan kebijakan organisasi, apakah kebijakan itu bersifat operasional teknis atau bersifat strategis. Yang dimaksud dengan strategi bagi manajemen organisasi pada umumnya, dan

manajemen organisasi bisnis pada khususnya, adalah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh, serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dalam kondisi persaingan yang ke semuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan. Siagian (2005:43).

Konsep strategi tidak hanya berlaku dalam organisasi dan aktivitas kemiliteran namun strategi dapat berada dan berlaku pada semua jenis organisasi dan kegiatan. Dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi Siagian (2005:44). Dengan konsep strategi itu, seseorang dapat memilih yang paling tepat, memahami keunggulan dan kekurangannya, dan dengan dasar itu roda organisasi dapat berjalan secara optimal dengan hasil yang maksimal pula. Berbagai jenis organisasi, baik organisasi politik, organisasi publik dan organisasi bisnis, yang berfikir strategis, berusaha untuk melakukan analisis situasi, dengan berusaha mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh secara sistimatis, untuk merumuskan suatu kebijakan organisasi.

5. Komoditas Unggulan

Penentuan komoditas unggulan nasional dan daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komperatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan. Langkah menuju efisiensi dapat ditempuh dengan mengembangkan komoditas yang mempunyai unggulan komperatif baik ditinjau dari segi penawaran maupun

permintaan. Dari sisi penawaran komoditas unggulan dicirikan oleh superioritas dan pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah. Sedangkan dari sisi permintaan, komoditas unggulan dicirikan oleh kuatnya permintaan di pasar baik pasar domestic maupun internasional. Syafaat (2000:2)

Menurut Hendriana (2003 : 1), mengatakan bahwa analisis komoditas pertanian unggulan berdasarkan tujuh (7) kriteria, yaitu dilihat dari perkembangan produksi, tingkat produktivitas dan nilai produksi yang semakin diperkuat oleh hasil pengelompokan potensi, kebijakan pemerintah daerah, merupakan komoditas yang telah diusahakan oleh masyarakat setempat, penyerapan tenaga kerja, kedudukan dan fungsi wilayah.

Konsep kawasan komoditas unggulan sebenarnya akan mereplikasi keberhasilan masyarakat dan pemerintah Jepang juga Thailand yang sudah membuktikan kehandalan model satu desa satu komoditas. Di Jepang, konsep ini dikenal dengan istilah *One Village One Commodity (OVOC) atau One Village One Product (OVOP)*. Bermula di Propinsi Oita-Jepang, Gerakan Satu Desa Satu Komoditas ini sukses mengangkat harkat desa miskin Oyama berkat adanya hasil pertanian unggulan meskipun dengan skala kecil. Tambunan (2003 : 33)

Kawasan unggulan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian kawasan (*prime mover*) yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh, mempunyai sektor unggulan dan memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitar. Royat (1996 : 3). Penetapan suatu daerah menjadi kawasan unggulan karena

diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan suatu daerah. Ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Todaro (2000 :5).

Pengembangan kawasan komoditi unggulan tidak lepas dari pengembangan kawasan agropolitan. Suatu kawasan agropolitan yang sudah berjalan dan berkembang mempunyai ciri-ciri:

- a. sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan pertanian;
- b. kegiatan di kawasan tersebut sebagian besar di dominasi oleh kegiatan pertanian, termasuk di dalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian, perdagangan pertanian hulu, agrowisata dan jasa pelayanan; dan
- c. hubungan antara kota dan daerah *hinterland* di kawasan agropolitan bersifat interdependensi yang harmonis, dan saling membutuhkan;

Aswandi (2002:34) mengatakan bahwa keterkaitan perekonomian kawasan unggulan dengan daerah sekitar sebagai salah satu kriteria penetapannya relevan dengan konsep spesialisasi. Adanya spesialisasi komoditi sesuai dengan sektor dan atau subsektor unggulan yang dimiliki masing-masing daerah, hal ini sejalan dengan pemikiran dari Samuelson (1996:13) bahwa masyarakat dapat lebih efektif dan efisien jika terdapat pembagian kerja, yang membagi keseluruhan proses produksi menjadi unit-unit khusus yang terspesialisasi.

6. Pengembangan Komoditas Unggulan

Penerapan otonomi daerah dengan mengacu pada undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberi peluang untuk melaksanakan pembangunan secara lebih baik, mengarah dan tepat sasaran. Namun, untuk mencapai keadaan tersebut daerah perlu mempersiapkan diri sedini mungkin. Persiapan-persiapan yang dilakukan antara lain adalah dengan lebih memperhatikan dan mengembangkan potensi, produk/komoditi unggulan masing-masing daerah. Hal ini disertai pula upaya-upaya pemerintah untuk menciptakan situasi yang kondusif melalui kebijakan pemerintah daerah. Grace (1998 : 3)

Ekonomi pertanian merupakan salah satu disiplin dalam ilmu ekonomi yang menerangkan dan mempelajari masalah-masalah pembangunan pertanian, dan diharapkan dapat memberikan alternatif-alternatif baru baik untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang timbul maupun untuk mewujudkan cita-cita bangsa, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat petani khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Peran sektor pertanian di samping sebagai sumber penghasil devisa yang besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia, dan bila dilihat dari jumlah orang yang bekerja, maka sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja yang pada umumnya adalah tenaga kerja tidak terdidik, tidak

memiliki ketrampilan dan pemerataan pendapatan yang tidak merata. Atas kondisi ini sehingga *bargaining power* yang dimiliki oleh para petani kita sangat lemah, sehingga nilai jual dari produk juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ini.

Agroindustri sebagai subsistem pertanian mempunyai potensi sebagai pendorong pertumbuhan kawasan ekonomi, karena memiliki peluang pasar yang lebih luas dan nilai tambah (*value added*) yang besar. Disamping itu pengembangan agroindustri dapat menjadi “pintu masuk” (*entry point*) proses transformasi struktur ekonomi dari pertanian ke industri. Kegiatan pertanian menghasilkan produk-produk yang sangat strategis bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, pakaian dan perumahan. Pemenuhan kebutuhan seperti pangan apabila mengandalkan dari negara lain atau impor tentu akan sangat riskan, karena dapat menimbulkan masalah yang rumit dan biaya mahal dikemudian hari. Habibie (1995:2).

Pembangunan kawasan (*regional development*) secara konvensional lebih cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi dasar bahwa proses pembangunan berlangsung dalam suatu keseimbangan matrik lokasi yang terdiri dari beberapa pusat pertumbuhan (*growth poles*) dan kawasan penyangga atau *hinterland*. Tjokrowinoto (1995:4).

Konsep, prinsip, dan instrumen kebijakan di dalam model pada perencanaan ekonomi kawasan adalah konsep kutub pertumbuhan, yang pada awalnya dirumuskan oleh Perroux (1955:3) dengan pertumbuhan yang dirangsang oleh suatu kombinasi dari inter-industri.

Aswandi (2002:3) mengatakan bahwa keterkaitan perekonomian kawasan unggulan dengan daerah sekitar sebagai salah satu kriteria penetapannya relevan dengan konsep spesialisasi. Adanya spesialisasi komoditi sesuai dengan sektor dan atau subsektor unggulan yang dimiliki masing-masing daerah, hal ini sejalan dengan pemikiran dari Samuelson (1996:5) bahwa masyarakat dapat lebih efektif dan efisien jika terdapat pembagian kerja, yang membagi keseluruhan proses produksi menjadi unit-unit khusus yang terspesialisasi.

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor dari Dinas Pertanian dalam arti luas yang meliputi sub sektor lainnya seperti tanaman pangan, hortikultura, peternakan. Berbicara mengenai konsep peningkatan perkebunan, maka tak lain adalah suatu usaha secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dalam arti luas, baik dari segi produksi, pemasaran dan aktivitas penunjang lainnya.

Berangkat dari konsep dasar mengenai peningkatan nilai tambah ini, maka usaha peningkatan perkebunan itu sendiri dapat menggunakan konsep yang dikembangkan dalam dunia agribisnis yang pada dasarnya berangkat dari perkembangan kondisi pertanian tradisional ke suatu sistem pertanian yang bersifat komersial atau berorientasi pada keuntungan pihak-pihak yang mengusahakannya, baik petani, para penyalur komoditi, bahan penunjang sampai pada sistem pengolahannya.

Dalam dunia agribisnis, maka yang menjadi fokus perhatian adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada bidang perkebunan atau bidang yang berkaitan dengan perkebunan.

Goldberg dan Mc. Ginity dalam Damiri (2001 : 12) mengemukakan definisi dari agribisnis sebagai berikut :

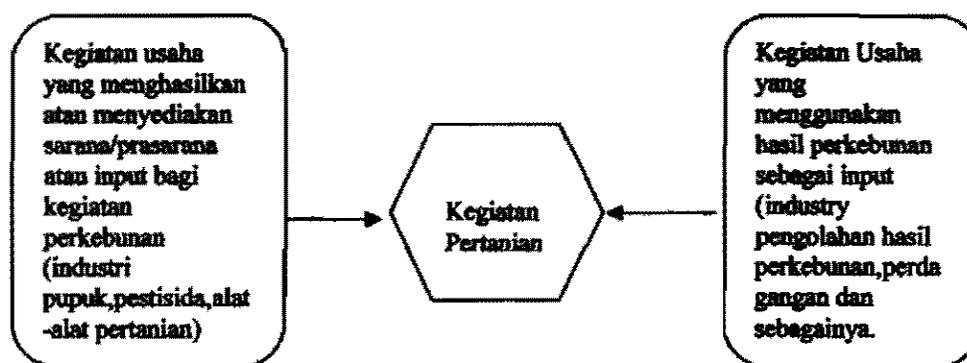
“Agribusiness, as developed at Harvard Business School, includes all of the interrelated private and public policy making enterprises from farm supply, farming and processing through distribution to the ultimate consumer including all the private and public coordinating mechanism that hold the commodity system together and enable them to adjust, to technological, political, social and economic change. Unfortunately, many writers have mistakenly used word “agribusiness” to mean large-scale entities in the food system. Using this incorrect definition of agribusiness would pit them large-scale entities against small, subsisten entities, and farm supplier, processors, and distributors against farmer and ultimately each other. Agribusiness is in fact a descriptive term indicating that the food system is vertically integrated, interdependent, constanly changing system”.

Dengan demikian kegiatan agribisnis merupakan suatu sistem yang terintegrasi secara vertikal. Sebagai suatu usaha yang berorientasi komersial atau pasar, bisa saja hanya mengerjakan salah satu dari komponen atau segmen dalam sistem kegiatan agribisnis.

Arsyad dkk. dalam Damiri (2001 : 12) mendefinisikan agribisnis sebagai suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Maksudnya adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

Untuk memperjelas pengertian di atas, Soekartawi, (2001 : 3) memberikan bagan berikut ini sebagai gambaran mata rantai kegiatan agribisnis

Bagan 1. Mata Rantai Kegiatan Agribisnis



Sumber : Arsyad dkk. dalam Soekartawi (2001 : 3)

Azahari (1987:34), mengemukakan bahwa sebagai suatu sistem agribisnis terdiri dari sub-sistem sebagai berikut :

- 1) Sub-sistem input produksi pertanian yang meliputi usaha pengadaan pupuk, pestisida, bibit, mesin dan alat-alat pertanian.
- 2) Sub-sistem produksi pertanian yang meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan kehutanan.
- 3) Sub-sistem pengolahan hasil-hasil pertanian yang meliputi penanganan pasca panen di tingkat petani sampai pengolahan hasil pertanian tingkat lanjut yang dilakukan oleh para pengusaha (industriawan).
- 4) Sub-sistem pemasaran yang meliputi hasil-hasil pertanian dan hasil olahannya (sub-sistem produksi) termasuk pemasaran pupuk, pestisida, bibit dan mesin (sub-sistem input pertanian).
- 5) Sub-sistem penunjang yang meliputi kegiatan konsultasi, pelatihan dan penyuluhan, kredit usaha, transportasi dan pengembangan riset pertanian.

Pelaku dan sistem tersebut di atas dikelompokkan dalam 3 bagian sebagai berikut :

- a) Organisasi operasional atau pelaksana (petani, pengumpul, pengolah dan penyalur) yang secara fisik menangani komoditas yang berada dan bergerak dalam sistem tersebut.
- b) Lembaga pendukung (pengadaan kebutuhan pertanian atau fasilitator, bank dan pusat-pusat penelitian) yang memberikan masukan penting kepada sistem.
- c) Meskipun koordinator (pemerintah, pengurusan kontrak, pemasaran, asosiasi industry) yang memberikan fasilitas atau kemudahan terhadap interaksi dan integrasi dari berbagai tahapan sistem.

Dari berbagai pengertian dan ulasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa konsep peningkatan pertanian adalah identik dengan konsep agribisnis dipandang dari pendekatan proses, pelaku (stake-holder) maupun dari sudut pandang komoditi atau bahan baku dan peralatan penunjang yang ada di sekitar lingkungan sektor perkebunan.

Jika diklasifikasikan, maka yang meliputi usaha peningkatan sektor perkebunan adalah sebagai berikut :

- 1). Sub-sistem input yang meliputi pengadaan komoditi berikut :

Benih/bibit bermutu, pupuk organik maupun anorganik, pestisida, peralatan dan mesin pengolahan hasil perkebunan

- 2). Sub sistem produksi perkebunan yang meliputi komoditas sebagai berikut :

Jambu Mete, kelapa, kakao, kopi, kapas, lada, cengkeh, asam, pala, jarak pagar.

3). **Sum-sistem pengolahan yang meliputi :**

Pembuatan kacang mete bebas CNSL, pembuatan kopi, pembuatan *Virgin Coconut Oil (VCO)* dan pembuatan minyak kelapa.

4). **Sub –sistem pemasaran komoditi yang meliputi :**

Pembelian oleh pedagang pengumpul, pembelian oleh pedagang pengecer dan pembelian oleh pedagang besar

5). **Sub-sistem jasa penunjang yaitu meliputi kegiatan :**

Kemitraan usaha, penyuluhan pertanian dan sarana transportasi

Menurut Wahyudi (2009:6) mengatakan bahwa ada empat kaitan pokok yang dapat disebutkan sebagai wacana analisa peningkatan sektor perkebunan dalam rangka otonomi daerah, yaitu sebagai berikut :

- a. Otonomi Daerah yang merupakan implementasi dari konsep desentralisasi kewenangan pusat ke daerah, akan memberikan dampak yang luas dari segi perekonomian daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas maka diharapkan akan terjadi penyebaran kegiatan perekonomian yang lebih merata diseluruh daerah dan tumbuhnya potensi ekonomi di daerah. Berbagai perundangan dan kebijakan operasional yang berkenaan dengan otonomi daerah merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendistribusikan sumber daya pembangunan dan kewenangan pengelolaannya. Khusus untuk peningkatan perkebunan, maka dibutuhkan adanya dukungan peraturan perundangan yang mengatur kebijakan peningkatan perkebunan sehingga sektor ini mampu menggerakkan perekonomian daerah secara positif dan signifikan.

- b. Konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah adalah ikatan tanggung jawab kepada daerah secara lebih proposional dalam meningkatkan peran masyarakat untuk bersama-sama mampu menggali semua potensi sumber daya yang tersedia didaerahnya semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pada akhirnya pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat akan lebih mampu membiayai jalannya roda pemerintahan daerah serta pembangunan sarana dan prasarana publik semaksimal mungkin di daerah yang bersangkutan. Konsekwensi dan wacana ini adalah tanggung jawab semua pihak (stakeholder) yang ada di daerah untuk bersama-sama menggali potensi perkebunan menjadi sektor yang mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah, peningkatan pendapatan masyarakat dan ketersediaan bahan perkebunan bagi wilayah lokal dan wilayah sekitarnya.
- c. Adanya otonomi dalam arti luas, maka diharapkan pemerintah daerah menjadi regulator yang adil, fasilitator dan motivator yang handal, sehingga tercipta sinergi yang lebih besar antara pemerintah daerah dan masyarakat, atau antara komponen masyarakat untuk berfungsi sebagai 'agent of development' yang tangguh bagi penyelenggaraan pembangunan. Sektor perkebunan akan berhasil dikelola jika terdapat sinergi yang kuat antara para pelaku (stakeholder) dengan menampilkan keunggulan masing-masing dan berkolaborasi mengembangkan sektor perkebunan.
- d. Melalui otonomi daerah maka diharapkan secara nasional maupun regional, pemerintah dan masyarakat khususnya pihak swasta mampu mengoptimalkan

seluruh potensi sumber daya yang ada menjadi suatu usaha yang mandiri dan unggul, sehingga akan mampu dan siap untuk berkompetisi di era pasar bebas dan pada lingkungan globalisasi. Orientasi pasar perlu dipikirkan melalui peningkatan produk perkebunan yang datang dari luar, baik dari segi kualitas maupun kuantitas produksi.

Untuk tujuan penelitian ini maka hanya para pelaku yang berada di Kabupaten Buton atau para pelaku yang memiliki lahan langsung atau memiliki relevansi kaitan langsung yang akan diikutsertakan sebagai unit analisis atau nara sumber dalam penelitian ini dalam rangka menemukan strategi yang tepat dan handal untuk meningkatkan sektor perkebunan di Kabupaten Buton. Jadi para pelaku (*stakeholder*) yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah para petani yang berada pada hampir semua sub-sistem yang ada, anggota organisasi Dinas Pertanian, pemilik toko, pengurus koperasi, dan para pebisnis hasil perkebunan, terutama para kelompok tani yang terlibat langsung dalam pengelolaan perkebunan.

Untuk menemukan strategi yang tepat dan handal maka akan dilakukan analisa dengan menggunakan teknik dalam manajemen strategik dengan mengelaborasi visi dan misi yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam upaya peningkatan sektor perkebunan. Menganalisis faktor-faktor yang relevan sebagai faktor internal maupun eksternal dalam suatu sistem lingkungan yang saling pengaruh mempengaruhi terhadap kinerja peningkatan perkebunan di Kabupaten Buton. Temuan-temuan yang akan dipengaruhi berada dalam suatu kerangka analisa dengan menggunakan metode manajemen strategik terutama teknik analisa data

dengan menggunakan analisa Matriks SWOT (*Strength, Weakness, Oppurtunity Threat*).

7. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Damiri (2001) yang meneliti tentang Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Wonogiri Dalam Rangka Otonomi Daerah. Dimana hasil penelitian ditemukan bahwa pengembangan sektor pertanian tanaman pangan pada komoditi yang harus sesuai dengan karakter tanah dan iklim setempat, penyuluhan, dan peningkatan sarana serta prasarana yang ada, dan kemudian bagi investor. Mengintegrasikan semua komponen institusi atau lembaga pemerintahan yang ada dalam pengembangan pertanian tanaman pangan. Program Cergas Desa yang terbukti berhasil meningkatkan sektor ini mengintegrasikan aspek lingkungan, perdagangan, institusi, dan kesinambungan pembangunan pertanian, khususnya tanaman pangan.

Isnaini (2009) yang meneliti tentang Analisis Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Agribisnis Berbasis Perkebunan di Kabupaten Serang Bagian Timur Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan matriks SWOT kuantitatif dengan hasil penelitian yaitu diperoleh enam strategi alternatif dalam pengembangan komoditas unggulan kelapa dalam di Kabupaten Serang Bagian Timur, yang merupakan kombinasi antara kekuatan-peluang, kekuatan-ancaman, kelemahan-ancaman dan kelemahan-peluang. Strategi alternatif tersebut adalah : (1) menjalin

dan meningkatkan kemitraan, (2) pengembangan kawasan sentra produksi,(3) peningkatan kualitas produksi dan penanganan SDA secara baik, (4) sosialisasi dan pembinaan masyarakat, (5) penumbuhan dan pengembangan kelompok tani, (6) sosialisasi dan pembinaan masyarakat/petani. Strategi prioritas ini harus tetap terintegrasi dengan lima strategi alternatif lain, guna keberhasilan pengembangan komoditas unggulan kelapa dalam di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku di masa datang.

Menurut Dapamerang (2003), yang meneliti tentang Analisis Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan Jambu Mete di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan analisis Faktor Strategi Internal (*IFE*), Faktor Strategi Eksternal (*EFE*), *Strengths Weaknesses Opportunities dan Threats (SWOT)*. Dari hasil analisis *IFE* terlihat bahwa faktor internal yang dinilai paling penting terhadap keberhasilan pengembangan agribisnis jambu mete adalah faktor sumber daya manusia petani yang merupakan kelemahan utama bagi pengembangan agribisnis jambu mete di Kabupaten Sumba Barat. Faktor internal lain setelah SDM berturut-turut adalah faktor kuantitas/kualitas produksi komoditas unggulan, ketersediaan/kesesuaian lahan, informasi pasar, penerapan teknologi pengolahan, kebijakan pemerintah, ketersediaan benih, infrastruktur penunjang, modal, skala kepemilikan lahan dan kelembagaan. Dari hasil analisis *EFE* diperoleh faktor eksternal adalah potensi pasar sebagai peringkat pertama yang diikuti oleh fluktuasi harga, hama penyakit, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemitraan, otonomi daerah, daerah lain penghasil dan kondisi sosial

budaya. Berdasarkan analisis SWOT diperoleh lima strategi alternatif pengembangan agribisnis jambu mete di Kabupaten Sumba Barat yaitu : strategi S-O pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Pedesaan Perkebunan (KINBUN), strategi S-T peningkatan kualitas hasil jambu mete, pembangunan fasilitas, dan pembangunan fasilitas pergudangan jambu mete.

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori yang ada serta latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan alur pikir untuk menjelaskan masalah yang merupakan kerangka pikir sebagai berikut:

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah maka dengan adanya perubahan politik dan ekonomi yang melanda negara kita sebagaimana dijelaskan dalam perumusan masalah terutama dalam era otonomi daerah, maka dibutuhkan kesiapan dan penerapan strategi yang tepat dari daerah untuk mengimplementasikan proses pembangunan secara efektif bagi kesejahteraan rakyat.

Sektor Perkebunan mempunyai kedudukan yang strategis dan peranan yang penting terlihat dari kontribusi terhadap pendapatan daerah, namun Dinas Pertanian dalam melaksanakan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat selalu mengalami kendala antara lain skala usaha atau tingkat produktivitas petani perorangan kecil, pusat-pusat produksi tersebar diberbagai tempat sehingga menyulitkan proses distribusi dan pemasaran, kualitas produk perkebunan bervariasi, varietas tanaman atau produk perkebunan juga bervariasi, dukungan permodalan dan lembaga keuangan sangat terbatas, penerapan teknologi

yang masih terbatas, kondisi sarana prasarana yang terbatas pula, belum terintegrasi secara optimal dengan industri pengolahan.

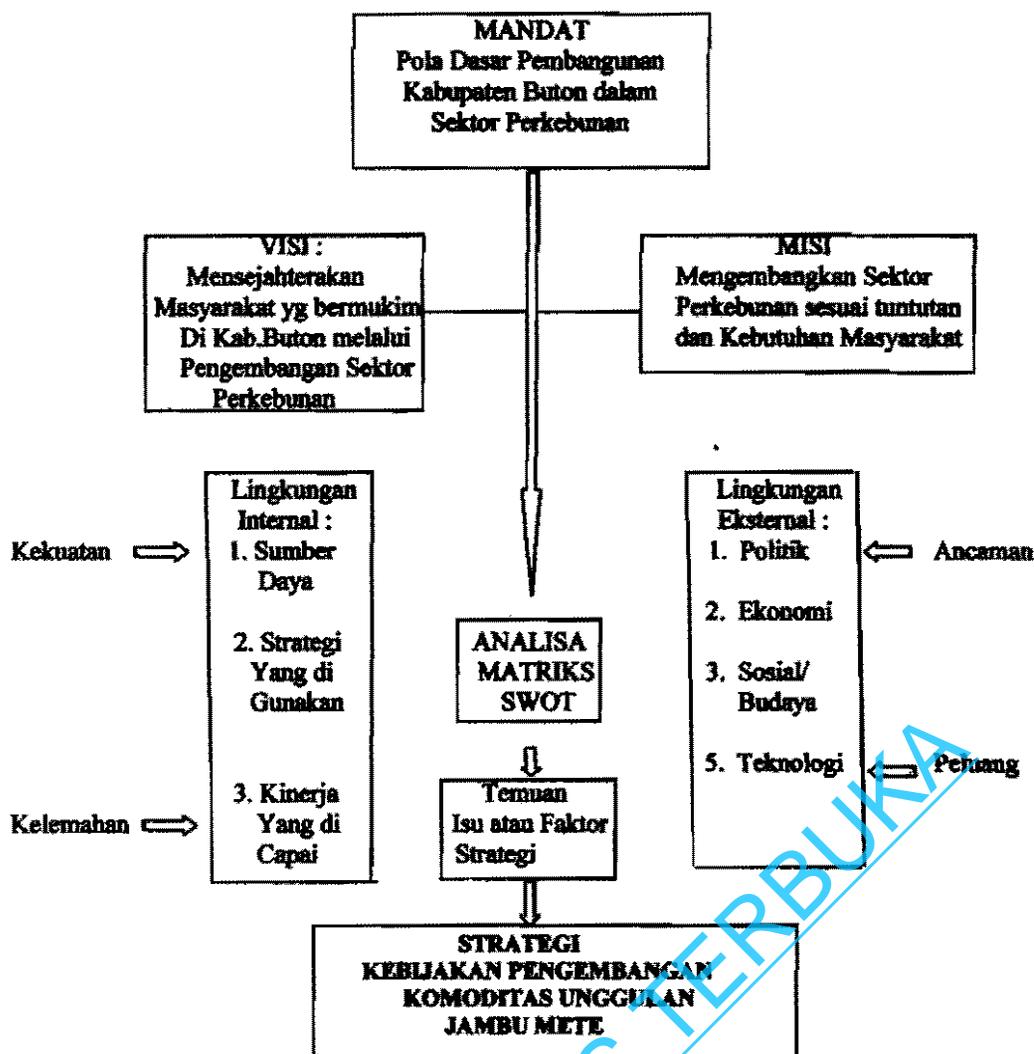
Oleh karena itu kondisi saat ini dibutuhkan kesiapan dan penerapan strategi yang tepat dari daerah untuk mengimplementasikan proses pengembangan kebijakan komoditas Jambu Mete sehingga Kabupaten Buton mampu mengoptimalkannya sebagai salah satu komponen pembangunan yang dapat digunakan bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam mewujudkan hal-hal yang dimaksud maka penelitian ini menerapkan strategi yang digunakan oleh kalangan bisnis maupun kalangan penyelenggaran pembangunan (pemerintah maupun LSM), yang pada perkembangannya dikemas dalam suatu metode Manajemen Strategis untuk mengungkapkan isu-isu strategis secara obyektif, mendalam dan komprehensif, untuk kemudian ditentukan strategi kebijakan yang tepat bagi pengembangan komoditas Jambu Mete di Kabupaten Buton dengan menggunakan teknik analisa matriks SWOT.

Berikut disajikan kerangka berpikir mengenai isi dari analisa manajemen strategis dimaksud yaitu :

UNIVERSITAS TERBUKA

Bagan 2. Kerangka Analisa Yang Digunakan



Sumber : Modifikasi Konsep Bryson & Zoerling (John M. Bryson, 1988 : 59)

C. Definisi Konsep Dan Operasional

Dalam penelitian ini terdapat konsep-konsep yang perlu didefinisi operasionalkan, sehingga membantu dan memudahkan dalam pengumpulan data di lapangan. Adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah :

1. Strategi adalah merupakan suatu pendekatan, alat atau pola kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan yang difokuskan pada *a few key or critical areas*, atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa strategi merupakan suatu pilihan tindakan kebijakan yang betul-betul mampu memecahkan masalah yang dihadapi.
2. Kebijakan komoditas unggulan adalah usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian melalui pengembangan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, yang berkaitan erat dengan program pembangunan lima tahun ke depan yaitu; (a) mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis kemampuan produksi, diversifikasi pangan serta kelembagaan dan budaya lokal; (b) mengembangkan agribisnis yang berorientasi global dengan pengembangan produk-produk unggulan daerah yang kompetitif dan keunggulan sumber daya alam yang komparatif.
3. Manajemen strategi adalah mencari jalan keluar bagi institusi atau organisasi untuk beradaptasi kembali terhadap perubahan dan tantangan lingkungan melalui pencarian isu atau faktor strategis dengan menggunakan teknik-teknik manajemen, agar kemajuan dapat dipertahankan dengan kinerja yang semakin optimal.
4. Pembangunan perkebunan adalah identik dengan revitalisasi perkebunan yaitu upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, jumlah produktivitas tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan mitra usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan manajemen strategik untuk mengungkap isu-isu strategik secara intensif, mendalam dan komprehensif, untuk kemudian ditemukan strategi yang tepat bagi pengembangan kebijakan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton dengan menggunakan teknik analisa matriks SWOT.

B. Populasi dan Teknik Penentuan Informan

Sebagai populasi dari penelitian ini adalah kelompok tani/gapoktan komoditas jambu mete, mitra usaha, pihak pemerintah .

Untuk penentuan informan penelitian digunakan teknik Snowball Sampling. Berdasarkan teknik snowball sampling maka pertama-tama ditentukan informan dari pemerintah yang mampu menjelaskan strategi kebijakan diimplementasikan dalam pengembangan komoditas jambu mete di Kabupaten Buton. Informan selanjutnya akan dikembangkan berdasarkan informasi dari informan awal yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Sedangkan informan dari unsur petani akan ditentukan oleh informan awal yang dipandang paling mengetahui tentang pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton berdasarkan kebijakan pemerintah dalam 3 tahun terakhir. Kemudian akan dikembangkan pula oleh informan dari unsur mitra

usaha/pengusaha yang dipandang paling mengetahui dan terlibat dalam pengembangan komoditas jambu mete di Kabupaten Buton.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara diberikan kepada Kepala Sub Dinas sektor perkebunan, kelompok tani/gapoktan yang menangani perkebunan jambu mete, mitra usaha maupun pengusaha. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara mendalam yaitu dengan wawancara dengan informan kunci (*key Informant*).
2. Pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk melihat dan membandingkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara.

E. Metode Analisa Data

Alat analisis yang digunakan dalam memecahkan isu atau faktor strategis adalah analisis SWOT (*Strength Weakness Opportunity Threat Analysis*), sehingga dapat diketahui struktur serta tingkat strategis dari faktor-faktor tersebut. Dengan Matriks SWOT ini dapat diketahui isu atau faktor-faktor strategis yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang dalam pengembangan sektor perkebunan.

Teknik analisa Matriks SWOT merupakan tahap awal dalam menemukan isu strategis pengembangan sektor Perkebunan di Kabupaten Buton. Diagram Matriks SWOT dapat digambarkan pada bagan 3 berikut ini :

IFAS  EFAS 	KEKUATAN (S) Identifikasi Kekuatan	KELEMAHAN (W) Identifikasi Kelemahan
PELUANG (O) Identifikasi Kesempatan	STRATEGI (SO) Menggunakan Kekuatan Untuk Menangkap Kesempatan	STRATEGI (WO) Mengatasi Kelemahan Dengan Mengambil Kesempatan
ANCAMAN (T) Identifikasi Ancaman	STRATEGI (ST) Menggunakan Kekuatan Untuk Menghindari Ancaman	STRATEGI (WT) Meminimalkan Kelemahan Dengan Menghindari Ancaman

Sumber : Wahyudi, (1996 : 105)

Beberapa alternatif strategi yang dihasilkan dari analisa Matriks SWOT ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi SO (*Strength Opportunity Strategy*), yaitu strategi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada di lingkungan eksternal.
2. Strategi WO (*Weakness Opportunity Strategy*), yaitu strategi untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar.
3. Strategi ST (*Strength Threat Strategy*), yaitu strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar.

4. Strategi WT₁ (*Weakness Threay Strategy*), yaitu strategi yang digunakan dengan memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar.

Analisa yang digunakan ini akan dimulai pada analisa lingkungan internal dan eksternal yang merupakan penggambaran kondisi saat ini serta proyeksi yang akan datang untuk menentukan strategi pengembangan komoditas jambu mete di Kabupaten Buton. Inti dari strategi yang terumuskan secara baik adalah kesesuaian yang tepat antara peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan atau organisasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Dalam mengevaluasi isu-isu strategis yang terpilih tersebut, maka Bryson (1995 : 123) menyarankan untuk menggunakan perangkat evaluasi isu *Litmus Test*. *Litmus Test* itu terdiri dari lima belas pertanyaan yang harus dijawab dengan isu strategis yang dipilih. Jawaban yang diperoleh kemudian ditetapkan skor rata-rata antara 1 sampai 3, dimana semakin tinggi nilai total skor suatu isu akan semakin strategis isu tersebut. Sebaliknya semakin rendah nilai total skornya, maka akan semakin tidak strategis isu yang kemudian dapat diartikan bahwa isu tersebut merupakan isu yang operasional dimana penyelesaiannya dapat dilakukan melalui kegiatan rutin saja.

Adapun daftar pertanyaan *Litmus Test* tersebut dapat tergambar pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Daftar Pertanyaan dan Skor Litmus Test

Pertanyaan	Operasional ← → Strategis		
	Skor = 1	Skor = 2	Skor = 3
1	2	3	4
1. Apakah isu tersebut merupakan/termasuk dalam agenda yang dipikirkan oleh dewan pengambil kebijakan di organisasi?	Tidak	-	Ya
2. Apakah isu tersebut merupakan/termasuk dalam agenda "chief executive" organisasi?	Tidak	-	Ya
3. Bilamana/kapan isu strategis tersebut akan menjadi tantangan/peluang kepada organisasi?	Saat ini	Tahun depan	Dua tahun atau lebih dari saat ini
4. Seberapa luas dampak isu tersebut terhadap organisasi?	Satu unit atau bagian	-	Seluruh organisasi
5. Apakah besar resiko/peluang finansial bagi organisasi	Kecil (10% anggaran)	Sedang (10%-15% anggaran)	Besar (>25% anggaran)
6. Apakah strategi bagi pemecahan isu tersebut memerlukan/mensyaratkan?			
a. Pengembangan tujuan dan program pelayanan yang baru?	Tidak	-	Ya
b. Perubahan yang nyata dalam hal sumber pajak/pembiayaan?	Tidak	-	Ya
c. Perubahan yang nyata dalam hal peraturan perundang-undangan	Tidak		Ya
d. Penambahan atau perubahan (modifikasi) fasilitas utama?	Tidak	-	Ya
e. Penambahan staf yang nyata?	Tidak	-	Ya
7. Seberapa jauh dapat dilakukan pendekatan yang terbaik bagi pemecahan isu tersebut?	Siap dilaksanakan	Parameter terlalu luas	Sangat terbuka
8. Seberapa rendah tingkat manajemen yang dapat memutuskan cara pemecahan isu tersebut?	Supervisor, staf lini	Kabag/Kasi	Pimpinan Organisasi
9. Konsekuensinya apakah yang mungkin terjadi jika tidak menghiraukan isu tersebut?	Inefisiensi	Pelayanan yang tidak terarah, kehilangan pendapatan	Ketidak terarahan pelayanan dalam jangka panjang dan terjadinya biaya tinggi

10. Seberapa banyak organisasi/departemen lain dipengaruhi oleh isu tersebut, dan harus dilibatkan dalam pemecahan ?	Tidak ada	1 sampai 3 organisasi/departemen	4 atau lebih
11. Seberapa sensitifikasi isu tersebut terkait dengan nilai-nilai masyarakat, sosial, politik, keagamaan dan budaya ?	Lemah/kurang sensitif	Agak sensitif/berpengaruh	Sangat sensitif/berdampak luas

Sumber : Bryson (1995:126)

Pembagian skor menurut tabel di atas bertujuan untuk menilai tingkat kestrategisan dari isu-isu yang diperoleh, adapun pengelompokan isu itu berdasarkan skor yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. 0,01 – 1,00 kelompok isu tidak strategis/operasional
2. 1,00 – 2,00 kelompok isu cukup strategis
3. 2,01 – 3,00 kelompok isu sangat strategis

Berdasarkan uraian isu strategis dan analisa SWOT di atas diperoleh beberapa isu strategis yang kemudian dipilih dan ditetapkan untuk dievaluasi dengan tujuan memperoleh isu yang benar-benar strategis. Untuk lebih memudahkan penyusunan skala prioritas mengenai isu strategis maka dibuat satu tabel susunan prioritas seperti tabel berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 2. Susunan Prioritas Isu kebijakan Strategis Dalam Rangka Strategi Kebijakan Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete di Kabupaten Buton

Isu Strategis	Skor	Tingkat Prioritas *
1	2	3
1. Penguatan Kelembagaan, teknik budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil.	-	Pertama
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang antisipasi datangnya iklim ekstrim.	-	Kedua
3. Penguatan Modal Usaha untuk pengembangan komoditas/agribisnis komoditas unggulan daerah.	-	Ketiga
4. Pengembangan sentra produksi sektor unggulan daerah.	-	Keempat

Keterangan : * relatif sesuai dengan nilai skor

Tahap akhir dari proses perumusan manajemen strategis adalah dengan merumuskan rencana langkah-langkah strategis, alternatif-alternatif kebijakan yang dipandang dapat menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dan di evaluasi pada tahap sebelumnya. Pendekatan yang digunakan untuk merencanakan langkah-langkah strategis ini adalah menggunakan *The Five Step Process* yakni proses lima langkah yang direkomendasikan oleh Bryson (1995:139), yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Menginventarisir alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia untuk mengarahkan dan menjawab isu-isu strategis yang telah ditetapkan.
2. Mencermati hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam mewujudkan alternatif kebijakan tersebut.
3. Merumuskan usulan-usulan program dan tindakan utama yang harus diambil untuk mewujudkan alternatif-alternatif kebijakan sekaligus menghilangkan hambatan.
4. Merumuskan tindakan utama yang harus dilakukan dalam 1 atau 2 tahun ke depan untuk mengimplementasikan usulan-usulan kebijakan utama tersebut.
5. Merumuskan langkah-langkah khusus yang harus dilakukan dalam 6 bulan kedepan untuk mengimplentasikan usulan-usulan kebijakan serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Dengan menggunakan teknik analisis yang telah diuraikan diatas, diharapkan dapat mengetahui bagaimana strategi dan rencana strategik apa yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan untuk menjaga obyektifitas data, bagi data-data yang diperoleh dilakukan *triangulasi data*, yaitu mengkonfirmasi data pada berbagai sumber.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Buton

Kabupaten Buton terletak di jazirah tenggara pulau Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara $4,96^{\circ}$ – $6,25^{\circ}$ LS dan membentang dari barat ke timur diantara $120,00^{\circ}$ - $123,34^{\circ}$ BT, meliputi sebagian Pulau Muna dan Pulau Buton.

Kabupaten Buton disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, disebelah selatan berbatas dengan laut Flores, disebelah timur berbatas dengan Kabupaten Wakatobi dan sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Bombana.

Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas $\pm 2.488,71$ km² atau 248.871 Ha dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas $\pm 21.051,69$ km² dengan jumlah Kecamatan di Kabupaten Buton berjumlah 21 kecamatan.

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki land form yang datar, bergelombang, berbukit serta bergunung. Diantara gunung dan berbukit tersebut terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk perkembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah ada juga yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500 m diatas permukaan laut dengan kemiringan mencapai 40 derajat. Solum tanah bervariasi yaitu tanah yang memiliki solum dangkal sampai dalam, tekstur tanah bervariasi terdiri dari tekstur kasar sampai halus sedangkan struktur tanah terdiri dari struktur pasir, lempung, debu dan liat. Adapun jenis tanah

yang ada di Kabupaten Buton bervariasi pula terdiri dari calciustolls, dystropepts, eutropepts, haplustalfts, hydraquents, rendolls, tropaquepts, tropaudalfts, tropoudulfts dan ustisaments.

Kabupaten Buton memiliki beberapa sungai besar yang ada di beberapa Kecamatan. Sungai-sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sumber tenaga, irigasi dan kebutuhan rumah tangga. Sungai-sungai tersebut seperti sungai Sampolawa di Kecamatan Sampolawa, sungai Winto dan Tondo di Kecamatan Pasarwajo, sungai Malaoge, Tokulo, dan sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu.

Kabupaten Buton dilihat dari sudut Oceanografi memiliki perairan laut yang masih luas, yaitu diperkirakan sekitar 21.054,69 km². Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Beberapa jenis ikan hasil perairan laut Kabupaten Buton yang banyak ditangkap oleh nelayan di daerah ini adalah cakalang, teri, layang, gembung, udang dan jenis ikan lainnya. Disamping ikan, juga terdapat hasil laut lainnya seperti teripang, agar-agar, japing-japing, lola, mutiara, dan lainnya yang semua ini dapat menunjang perekonomian di daerah ini.

Adapun keadaan musim di Kabupaten Buton pada umumnya sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia dimana mempunyai dua musim, yakni musim hujan dan kemarau. Musim hujan terjadi diantara bulan Desember sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya. Pada saat tersebut angin darat bertiup dari Benua Asia serta

lautan Pasifik banyak mengandung uap air. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan November, pada bulan-bulan tersebut angin Timur bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Khusus pada bulan April dan Mei di daerah Kabupaten Buton arah angin tidak menentu, demikianlah pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal sebagai musim Pancaroba.

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan monografi, dan perputaran pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan lokasi stasiun pengamat. Rata-rata curah hujan selama tahun 2008 berkisar antara 188 mm (Kapontori) sampai 3.387 mm (Pasarwajo). Sedangkan hari hujan yang paling tinggi berada di Kecamatan Batauga yaitu 189 hari hujan, menyusul Kecamatan Pasarwajo sebanyak 168 hari hujan, Lasalimu Selatan 132 hari hujan, dan yang paling tersedikit hari hujannya adalah Kecamatan Lakudo yang hanya sebanyak 94 hari hujan.

B. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Buton

Kedudukan Dinas Pertanian merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanian Kabupaten Buton selain dipengaruhi kebijakan instansi lintas sektoral di Pusat dan Daerah, pengembangan komoditas pertanian juga sangat dipengaruhi oleh respon pelaku usaha petani dan swasta lainnya terhadap kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta partisipasi kelembagaan lain terkait dengan pembangunan pertanian seperti : lembaga penggerak swadaya masyarakat,

lembaga akademik, media massa, lembaga sosial budaya serta unsur lain terkait, hingga konsumen aneka produk yang dihasilkan dari komoditas tersebut.

Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Buton. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan outcome dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan serta Susunan Organisasi

a. Kedudukan

Dinas pertanian merupakan salah satu unsur satuan kerja perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Buton melalui Sekretaris Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah dan Peraturan Bupati Buton Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton.

b. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pertanian Kabupaten Buton adalah : Membantu Bupati Buton dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan.

c. Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka fungsi Dinas Pertanian adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis, di sub dinas pertanian, peternakan, perkebunan, dan hortikultura ;
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. Pelaksanaan pengamanan teknis pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura;
4. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan dan pemasaran usaha pertanian, peternakan, perkebunan, dan hortikultura;
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
6. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian

Secara rinci tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan pada lingkup dinas pertanian yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum dan perlengkapan, humas dan protokol, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan serta evaluasi dan pelaporan. disamping itu sekretariat Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perencanaan program dinas;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta pendidikan dan pelatihan;

- c. Pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
- d. Pelaksanaan urusan umum, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Sekretariat dinas membawahi 3 Sub Bagian :

1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program dinas, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program serta melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan arsip, rumah tangga, melaksanakan urusan kehumasan dan protokol, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, perumusan rancangan peraturan dan produk hukum serta urusan pendidikan dan pelatihan.
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran serta pengelolaan perlengkapan.

2. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan usaha peningkatan produksi padi dan palawija, pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan, alat dan mesin pertanian tanaman pangan, rehabilitasi dan konservasi lahan, peningkatan kelembagaan dan tata guna air, perlindungan tanaman dan

pengawasan pestisida, pembinaan teknologi produksi, pembinaan teknis kelembagaan perbenihan usaha pengolahan dan pengawasan hasil pertanian, pengembangan teknologi hasil produksi pertanian, pengawasan dan pengendalian, melakukan promosi, analisa usaha tani dan pencatatan informasi pasar hasil pertanian tanaman pangan. Disamping itu juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi padi dan palawija, pengembangan rehabilitasi dan konservasi lahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran Pertanian Tanaman Pangan, penyiapan program Pertanian Tanaman Pangan, pelaksanaan perizinan usaha pertanian;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan perbenihan dan tata guna air;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengembangan dan peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;
- f. Pelaksanaan pembinaan pengembangan alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan rehabilitasi, konservasi lahan dan tata guna air;
- h. Pelaksanaan pembinaan perlindungan tanaman dan pengawasan pestisida;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi produksi pertanian;
- j. Pelaksanaan promosi, informasi dan analisa usaha tani bidang pertanian;

- k. Pemberian pertimbangan teknis kekayaan usaha harga komoditas pertanian tanaman pangan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Tanaman Pangan membawahi 3 seksi :

1. Seksi Produksi dan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data dan menyusun rencana/target produksi dan pengembangan pertanian, meningkatkan mutu produksi pertanian serta melakukan pengembangan produksi pertanian, rehabilitasi, dan konservasi lahan tata guna air dan perlindungan tanaman;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data, menyusun rencana dan pengembangan sarana dan prasarana, produksi, alat dan mesin pertanian;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data dan menyusun rencana pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pembinaan manajemen usaha, kelembagaan usaha dan teknologi pengolahan hasil pertanian, ekonomi petani dan permodalan, pelayanan izin usaha pertanian, penerapan standarisasi pengawasan mutu dan hasil pertanian serta pemantauan informasi pasar.

3. Sub Dinas Peternakan

Sub Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan kebijakan operasional di Sub Dinas Peternakan yang meliputi : penyebaran dan pengembangan ternak perbibitan dan pakan, pemanfaatan dan

penerapan teknologi peternakan, pengembangan alat dan mesin serta sarana produksi peternakan, pengamatan dan penyelidikan penyakit hewan, pengendalian dan pencegahan serta pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Disamping itu juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana program dan kegiatan peningkatan serta pengembangan produksi peternakan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengaturan serta pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan teknologi dan kaji terap peternakan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan, pengawasan alat dan mesin serta sarana produksi peternakan;
- e. Perumusan kegiatan pembibitan ternak, bimbingan pengawasan, persedaran dan penggunaan pakan;
- f. Pengawasan terhadap penyebaran dan pengembangan ternak;
- g. Pelaksanaan pembinaan teknis kelembagaan perbenihan, puskesmas, kelembagaan kelompok ternak dan kelembagaan lainnya;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengamatan, penyelidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta pembuatan peta penyakit hewan;
- i. Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- j. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

k. Pelaksanaan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat veteriner;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Peternakan membawahi 3 seksi :

1. Seksi Produksi dan Pengembangan Produksi Ternak mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang teknis ketatalaksanaan pengembangan produksi peternakan yang meliputi survei dan identifikasi lokasi budidaya, menyiapkan lokasi penyebaran ternak, menyebarkan ternak dan mengembangkan kawasan peternakan, bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak, pengelolaan administrasi peternakan serta melakukan standarisasi redistribusi ternak dan tata laksana pemeliharaan ternak.
2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis kesehatan hewan, memberikan bimbingan terhadap pengamatan penyidikan dan epidemiologi, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pelayanan pada Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU), membuat peta penyakit hewan, memantau peredaran dan penggunaan obat hewan, mengawasi hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, melakukan pemantauan perlindungan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
3. Seksi Perbibitan dan Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dibidang perbibitan dan pengembangan sarana dan

prasarana peternakan yang meliputi bibit ternak, pakan, pelayanan Inseminasi Buatan (IB) serta perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana peternakan.

4. Sub Dinas Perkebunan

Sub Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Sub Dinas Perkebunan yang meliputi : pembinaan, pelaksanaan kegiatan produksi, perbenihan, budidaya tanaman, melakukan penetapan lokasi, luas areal, komoditi perkebunan, melakukan pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penanganan alat dan mesin serta pupuk dan pestisida perkebunan.

Disamping itu juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembinaan teknis manajemen usaha serta pengawasan terhadap pengelolaan benih/penangkar tanaman perkebunan;
- b. Pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan kegiatan intensifikasi, rehabilitasi/peremajaan, diversifikasi dan ekstensifikasi/pelebaran tanaman perkebunan;
- c. Pengkoordinasian pemetaan luas areal tanaman perkebunan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan budidaya tanaman serta pengembangan produksi tanaman perkebunan;
- e. Pengelolaan dan pemanfaatan bahan tanaman, alat dan mesin tanaman perkebunan, pupuk dan pestisida serta melaksanakan pengembangan teknologi peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan serta pengawasan pestisida;

- g. Pelaksanaan dan pengkoordinasian konflik dan bencana alam dibidang perkebunan;
- h. Pelaksanaan promosi, analisa usaha dan informasi pasar komoditi perkebunan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Perkebunan membawahi 3 seksi :

1. Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya dalam rangka peningkatan produksi tanaman perkebunan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi/peremajaan, ekstensifikasi/peluasan areal tanaman perkebunan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penanggulangan konflik dan bencana alam di bidang perkebunan, pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi dan optimalisasi lahan tanaman perkebunan sesuai dengan daya dukung lahan serta melakukan koordinasi areal tanaman perkebunan.
2. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengelola dan memanfaatkan bahan tanaman, alat dan mesin perkebunan (Alsinbun), melakukan percobaan dan pengujian alat mesin, melaksanakan pengembangan teknologi alat dan mesin dalam rangka peningkatan produksi perkebunan serta pengelolaan pupuk, usaha perlindungan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT),

pengawasan pestisida dan pembinaan kelembagaan perbenihan dalam rangka peningkatan produksi perkebunan.

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data, melaksanakan pembinaan dan pembinaan teknis, melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, promosi dan standarisasi mutu, pemantauan informasi harga, analisa usaha perkebunan, pembinaan manajemen dan pengembangan usaha perkebunan serta pemberian pertimbangan teknis harga dasar komoditas perkebunan.

5. Sub Dinas Hortikultura

Sub Dinas Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan kebijakan operasional pada komoditas hortikultura yang meliputi usaha perbenihan/pembibitan, pengembangan budidaya, perlindungan tanaman terhadap serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), penanganan alat/mesin hortikultura, penanganan pupuk dan pestisida, penetapan lokasi dan jenis komoditas serta penanggulangan konflik sosial dan bencana alam, penerapan teknologi pascapanen serta pengolahan dan pemasaran hortikultura. Disamping itu juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana program dan kegiatan peningkatan dan pengembangan produksi hortikultura;
- b. Pembinaan teknis dan manajemen usaha, pengawasan pengolahan balai benih, petani/penangkar benih/bibit hortikultura;

- c. Pembinaan teknis budidaya, perlindungan tanaman terhadap serangan OPT, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil;
- d. Pembinaan dan pemantauan intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi, konservasi dan optimasi penggunaan lahan;
- e. Pembinaan dan pemantauan bahan tanaman (benih/bibit), pupuk, pestisida dan alat mesin hortikultura;
- f. Pembinaan dan pengawasan peredaran benih/bibit, pupuk dan pestisida;
- g. Pengkoordinasian rencana perluasan areal, pemetaan komoditas, penanggulangan konflik sosial, bencana alam, pengendalian OPT serta pengolahan dan pemasaran komoditas;
- h. Pelaksanaan kegiatan analisa usahatani, informasi pasar, promosi dan pertimbangan teknis harga dasar komoditas;
- i. Pelaksanaan pengamatan dan pemetaan lokasi serangan OPT;
- j. Pelaksanaan pengendalian serangan OPT bila terjadi eksplorasi;
- k. Pelaksanaan evaluasi kerja terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengembangan produksi hortikultura;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Hortikultura membawahi 3 seksi :

1. Seksi Produksi dan Pengembangan Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data, menyusun rencana pengembangan hortikultura, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi/peremajaan, ekstensifikasi/pelebaran areal tanaman hortikultura, melakukan pembinaan, pemantauan dan promosi

- penerapan teknologi budidaya, pembinaan teknis usaha pengendalian OPT, pemanfaatan lahan, konservasi dan optimasi lahan serta pengolahan air.
2. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data dan rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengelola dan memanfaatkan bahan tanaman (benih/bibit), pupuk, pestisida, alat dan mesin, melakukan uji coba teknologi baru, mengkoordinasi pemantauan dan pengawasan peredaran benih/bibit, pupuk dan pestisida, penanggulangan konflik sosial, bencana alam, melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai benih/penangkar benih/bibit hortikultura serta koordinasi sertifikasi benih/bibit.
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha pasca panen, pengembangan teknologi, pembinaan penerapan standarisasi dan pengawasan mutu, melakukan promosi produk, menganalisa dan menyebarkan informasi pasar serta melakukan pertimbangan teknis harga dasar komoditas.

C. Gambaran Umum Sektor Perkebunan

Provinsi Sulawesi Tenggara umumnya dan Kabupaten Buton khususnya memiliki daratan yang terdiri dari pulau dan kepulauan dengan topografi umumnya bergunung, berbukit dan bergelombang dengan kondisi tanah yang sangat potensial untuk usaha perkebunan. Perkembangan komoditas perkebunan dari tahun ketahun meningkat. Hasil pembangunan perkebunan di daerah ini telah terbukti memberikan

peranan sangat penting bagi kemajuan daerah baik dari aspek ekonomi, sosial maupun pelestarian keseimbangan lingkungan.

Walaupun selama ini kontribusi hasil perkebunan telah dirasakan cukup penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, akan tetapi disadari bahwa pengelolaan pembangunan sub sektor perkebunan memiliki beberapa kelemahan yang perlu segera mendapat perhatian diantaranya adalah : (1) potensi sumber daya lokal belum dimanfaatkan secara optimum untuk mendukung pembangunan perkebunan; (2) pemanfaatan hasil perkebunan masih terbatas pada produk inti saja, padahal produk ikutan/produk sampingannya bila dikelola dengan baik dapat memberikan hasil nilai tambah yang cukup besar; (3) kurangnya aliran investasi untuk mendukung usaha agribisnis perkebunan.

Permasalahan yang terjadi pada usaha perkebunan di Kabupaten Buton secara umum sebagai berikut : (1) kelembagaan petani masih sangat lemah; (2) produktivitas dan mutu hasil masih rendah; (3) tingkat pengetahuan dan keterampilan petani maupun petugas masih relatif terbatas; (4) umur tanaman sebagian besar sudah relatif tua; (5) masih lemahnya kemampuan permodalan petani; (6) serangan organisme pengganggu tanaman masih cukup tinggi; (7) sebagian besar masih diusahakan secara subsistem; (8) daya dukung lahan cenderung menurun; (9) masih lemahnya dukungan lembaga penunjang. Menyadari kelemahan kebijakan pembangunan dimasa lalu, maka paradigma pembangunan perkebunan di Sulawesi Tenggara ke depan diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat perkebunan khususnya di Kabupaten Buton.

1. Renstra Perkebunan

Berdasarkan capaian dari hasil-hasil pelaksanaan pembangunan pertanian / perkebunan pada tahun-tahun sebelumnya , maka secara umum pembangunan pertanian di masa mendatang akan senantiasa melanjutkan pembangunan yang telah ditetapkan dengan senantiasa mempertimbangkan kondisi realistis yang ada serta berdasarkan analisa lingkungan strategis yang dimiliki saat ini.

Dari hasil kajian pembangunan pertanian saat ini, mengindikasikan bahwa sektor perkebunan sangat potensial untuk dikembangkan pada masa yang akan datang mengingat sektor ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Disamping itu, bahwa kegiatan ekonomi sektor perkebunan umumnya berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan tidak tergantung pada import, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, sehingga pembangunan sektor perkebunan diyakini bahwa kegiatan ekonomi pada sektor ini memiliki nilai yang kuat jika dikelola secara produktif dan berdaya saing dalam mendukung perekonomian daerah maupun nasional. Untuk itu pembangunan ekonomi kerakyatan perlu pemberdayaan sektor pertanian khususnya perkebunan harus menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Buton dalam jangka panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ada komitmen bersama untuk menumbuhkan pusat-pusat aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah potensial melalui reformasi pembangunan ekonomi yang mampu mengembangkan sumberdaya lokal dan menggerakkan rakyat yang lebih produktif dan bersaing.

2. Komoditas Perkebunan Unggulan Jambu Mete

Jambu Mete (*Anacardium occidentale L.*) merupakan salah satu tanaman komoditas unggulan daerah Kabupaten Buton dari beberapa tanaman perkebunan lainnya seperti pala, kelapa, cengkeh, jarak pagar, lada, kopi, kakao. Komoditas jambu mete memiliki nilai strategis dalam pembangunan agribisnis perkebunan. Selain berperan sebagai komoditas perkebunan, reboisasi atau konservasi lahan dan perdagangan, terkait juga dengan perkembangan industri. Produk jambu mete juga dapat digunakan sebagai bahan baku pada berbagai industri seperti otomotif (rem, serbuk friksi, campuran ban), industri konstruksi (anti karatan peralatan/bahan di darat dan laut), industri kimia (cat, dempul dan cat lak), makanan dan minuman sehat, farmasi, kosmetik, pestisida nabati dan makanan ternak.

Pangsa pasar jambu mete sangat luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia saat ini hanya mampu mensuplai 6 persen dari kebutuhan jambu mete dunia. Oleh karena itu program pengembangan jambu mete harus senantiasa diarahkan pada aspek produktivitas, dengan dukungan oleh kemampuan teknologi untuk meningkatkan mutu produk secara efisien, sesuai kebutuhan industri dan mampu bersaing di pasar global.

Kacang mete sebagai komoditas andalan Kabupaten Buton dalam pasar dunia termasuk salah satu produk kacang-kacangan yang paling banyak diperdagangkan dan termasuk dalam kategori komoditi mewah dibandingkan dengan kacang tanah atau kacang almond. Kegunaannya terutama untuk kudapan (snack) dan campuran pada industri roti, permen dan makanan kecil lainnya. Selain itu hasil ikutannya yang berupa minyak laka atau *cashew nut sheel liquid (CNSL)* dari kulit jambu mete,

merupakan bahan baku berbagai industri dan memiliki daya tarik industri hilir di masa depan. Minyak laka memiliki nilai yang tinggi sebagai bahan baku pada industri otomotif, konstruksi dan pestisida nabati. Apalagi kegunaan pestisida nabati ini menjadi bahan yang menonjol dan menjadi tren sehubungan dengan isu hidup secara alami atau *back to nature* dengan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan. Kondisi pertanaman jambu mete di lapangan saat ini sangat mengawatirkan akibat tingkat produktivitasnya yang makin menurun, dengan ukuran gendong buah yang makin kecil dan meningkatnya serangan hama dan penyakit. Beberapa pabrik pengolahan jambu mete di beberapa sentra pengolahan jambu mete ditutup akibat kekurangan bahan baku berupa jambu mete gelondong.

Peningkatan pendapatan usahatani makin rendah disamping karena sistem perdagangan dan tata niaganya yang belum banyak berpihak kepada petani. Petani jambu mete juga dalam menerapkan teknologi masih rendah. Hal ini menjadi tantangan dalam penyebar luasan dan proses difusi teknologi pembudidayaan, diversifikasi produk dan perdagangan.

3. Luas Lahan Perkebunan Komoditas Unggulan Jambu Mete

Luas lahan jambu mete sebagai sektor unggulan Jambu Mete di Kabupaten Buton menurut Statistik Perkebunan (2009) mencapai 22.575Ha dengan produksi 7,208 ton dan melibatkan sekitar 15,362 KK petani jambu mete yang tersebar pada beberapa Kecamatan yaitu : di Kecamatan Mawasangka seluas 2,755 Ha (12.19%), Kecamatan Gu seluas 2,576 (11.40%), Kecamatan Lakudo seluas 2,484 (10.99%), Kecamatan Batanga seluas 2,266 (10.03), Kecamatan Mawasangka Tengah seluas 2,182.69Ha (9.66%), Kecamatan Siotapina seluas 1,898 Ha (8.40%), Kecamatan

Lasalimu Selatan seluas 1,842 Ha (8.15%), Kecamatan Pasarwajo seluas 1,640 Ha (7.26%), Kecamatan Wolowa seluas 899.70 Ha (3.98%), Kecamatan Lasalimu seluas 797.50 Ha (3.53%), Kecamatan Wabula seluas 686 Ha (3.04%), Kecamatan Sampolawa seluas 628.50 Ha (2.78%), Kecamatan Kapontori seluas 532.24 Ha (2.36%), Kecamatan Lapandewa seluas 435 Ha (1.93%), Kecamatan Mawasangka Timur seluas 344 Ha (1.52%), Kecamatan Batuatas seluas 310.17 Ha (1.37%), Kecamatan Talaga Raya seluas 169 Ha (0.75%), Kecamatan Sangia Wambulu seluas 83 Ha (0.37%), Kecamatan Siompu seluas 53.50 Ha (0.24%), Kecamatan Kadatua seluas 5.70 Ha (0.03%) dan Kecamatan Siompu Barat seluas 5 Ha (0.02%).

Dari 22.593 Ha tanaman jambu mete di Kabupaten Buton terdapat tanaman belum menghasilkan seluas 3,131 Ha (13.86%), tanaman menghasilkan seluas 18,022 Ha (79.77%) dan sisanya merupakan tanaman tua renta seluas 1,440 Ha (6.37%), yang perlu segera diremajakan. Produktivitas rata-rata jambu mete di Kabupaten Buton sebesar 441 kg/ha/tahun.

4. Sarana dan Prasarana Perkebunan

Pengembangan komoditas unggulan jambu mete seharusnya diikuti oleh pemenuhan akan sarana dan prasarana, demikian pula sebaliknya pembangunan sarana dan prasarana di lokasi tertentu akan merangsang tumbuhnya diversifikasi produk dan aktivitas ikutan lainnya. Tersedianya sarana dan prasarana dasar akan berimplikasi pada pengembangan komoditas jambu mete ke arah yang lebih baik.

Teknologi untuk pengembangan agribisnis jambu mete mulai dari teknologi produksi sampai pengolahan hasil cukup tersedia di Kabupaten Buton namun jumlahnya terbatas serta aplikasi penggunaannya juga masih terbatas. Oleh karena

itu faktor ketersediaan teknologi belum menjadi kendala atau pembatas dalam pengembangan agribisnis jambu mete di Kabupaten Buton. Dengan demikian untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan jambu mete maka diperlukan kebijakan pemerintah yang mampu memacu agribisnis jambu mete. Dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial dan budaya mendorong kegiatan usaha perkebunan jambu mete dari hulu hingga hilir.

Adapun alat dan mesin yang berkaitan dengan pengolahan jambu mete sebagai penunjang komoditas unggulan daerah yang telah disebar pada beberapa kelompok tani di sentra wilayah komoditas mete antara lain alat pengolah jambu mete bebas CNSL masing-masing 1 paket di Desa Wanulea, Walando, Bombonawulu Kecamatan GU yang disebar tahun 2006, kemudian alat pengolah jambu mete dilengkapi dengan bangunannya di Desa Lolibu Kecamatan Lakudo yang disebar tahun 2008 dana dari APBN. Selain alat pengolahan tersebut juga ada bantuan non fisik (BANSOS) dana dari APBN berupa Pengelolaan Lahan Perkebunan berupa dana pinjaman langsung masyarakat sebanyak 30 kelompok dengan dana Rp. 900.000.000,- TA. 2006 yang meliputi Kecamatan GU, Lakudo, Mawasangka dan Batauga. Perluasan Areal tanaman mete 100 Ha satu paket dengan jalan usaha tani 2 km T.A. 2006 di Desa Metere Kecamatan Lakudo, kemudian pendampingan pasca panen jambu mete Rp. 120.000.000,- TA. 2007 di Desa Mone dan Desa Metere Kecamatan Lakudo.

D. Temuan dan Pembahasan

1. Analisa Isu Strategis

a. Pengembangan Sektor Perkebunan di Kabupaten Buton

Ada beberapa komoditas sektor perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Buton seperti yang tertera dalam daftar tabel berikut :

Tabel 3. Komoditas Sektor Perkebunan Yang Dikembangkan di Kabupaten Buton

No.	Komoditas	Luas Lahan (Ha)			Produksi (ton)		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1.	Kakao	2.933	2.933	2.953	593	597	420.90
2.	Jambu Mete	22.575	22.573	22.571	6.675	6.655	352.26
3.	Kelapa Dalam	3.624	3.624	3.632	1.253	1.273	977.92
4.	Kelapa Hybrida	208	208	208	96	71	58.96
5.	Kopi	809	827	850	175	185	154.18
6.	Kapuk	450	450	450	128	135	87.52
7.	Asam Jawa	100.05	100	100	411	418	162.64
8.	Kemiri	517	519	523	126	135	113.16
9.	Lada	66	73	73	12	13	12.11
10.	Enau	40	43	44	-	13	8.50
11.	Cengkeh	33	435	435	9	10	6.86
12.	Pala	9	44	44	-	2	2
13.	Vanili	-	5	5	-	-	-
14.	Jarak Pagar	284	331	331	130	150	105

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tahun 2010

Dalam pola dasar pembangunan Kabupaten Buton ditetapkan bahwa pengembangan komoditas perkebunan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan produktivitas, jumlah dan keragaman produk olahan serta meningkatkan pelayanan informasi pasar. Hal ini berarti bahwa kita harus mampu meningkatkan produksi, mutu, jumlah hasil jambu mete dengan mengikuti petunjuk teknis/mengadopsi teknologi yang ada serta kerja keras dari petani, disamping itu kita harus mampu menciptakan keragaman produk olahan jambu

mete yang dikembangkan oleh masyarakat untuk mendapatkan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan petani.

- 2). Meningkatkan peranan kelembagaan petani dan meningkatkan peran serta lembaga penunjang agribisnis. Hal ini berarti kita harus mampu meningkatkan dinamika lembaga tani baik itu kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Dengan terbentuknya memperbaiki dinamika kelompok tani maka diharapkan petani dapat saling berinteraksi dan mempunyai dampak saling membutuhkan, Selain itu dapat menjadi wadah proses belajar sehingga akan dapat memecahkan berbagai permasalahan menyangkut usaha agribisnis komoditas jambu mete yang sedang dikembangkan.
- 3). Meningkatkan pelayanan di bidang perkebunan. Hal ini berarti bahwa akses pelayanan yang diberikan kepada petani oleh para petugas teknis pertanian baik itu Penyuluh Pertanian Lapangan maupun Kepala Pertanian Kecamatan dapat ditingkatkan sehingga masyarakat petani maupun petugas saling membutuhkan.
- 4). Meningkatkan kemampuan SDM petugas dan petani. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam pengembangan agribisnis jambu mete di Kabupaten Buton sekaligus sebagai faktor penentu keberhasilan. Setiap pembangunan harus berorientasi pada peningkatan SDM agar mampu mencapai tingkat terampil, maju, dinamis dan mandiri sebagai pelaku utama pembangunan guna mencapai sasaran yang diinginkan. Masyarakat pekebun/petani yang ada di Kabupaten Buton memiliki sumber daya manusia yang bervariasi sehingga adopsi teknologi, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki juga bervariasi

sehingga hal ini berakibat dalam penerimaan maupun pelaksanaan informasi dan teknologi kurang maksimal.

b. Visi

Berdasarkan analisis lingkungan strategis serta kebijakan pemerintah Kabupaten Buton, maka ditetapkan visi dan misi pembangunan sektor pertanian Kabupaten Buton oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buton.

Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Buton, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat (utamanya) di wilayah Kabupaten Buton.

Sektor pertanian merupakan pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian daerah Kabupaten Buton, sehingga sudah seharusnya menjadi sektor utama dalam perekonomian daerah, dan berdasarkan kaidah demokrasi ekonomi maka sewajarnya menjadi pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari proses pembangunan ekonomi. Untuk itu Dinas Pertanian dituntut memiliki keunggulan koperatif yang berkelanjutan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka dirumuskan visi pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Buton sebagai berikut :

Terwujudnya swasembada pangan yang berbasis pewilayahan komoditas secara proposional dan berkeadilan sesuai potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Berdasarkan pernyataan visi tersebut, dapat memberikan pengertian bahwa : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berasal dari komoditas unggulan daerah sektor perkebunan yang cukup setiap saat, sehat dan halal dan dikelola secara agribisnis yang proposional dan berkeadilan dengan menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, serta berkembangnya usaha pertanian

yang kompetitif dan menghasilkan berbagai produk perkebunan dan nilai tambah dan daya saing tinggi serta meningkatnya kontribusi pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Pernyataan visi tersebut memberikan petunjuk kearah mana organisasi akan dituju, dan seperti apa keadaan organisasi yang diinginkan dan bagaimana untuk mencapai tujuan.

e. Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Pertanian Kabupaten Buton yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi yang akan dilakukan sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian (tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan Hortikultura) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2). Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sektor pertanian dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik dan peningkatan produktivitas usaha pertanian.
- 3). Meningkatkan nilai tambah produk pertanian pada sentra-sentra produksi sehingga memiliki keunggulan kooperatif dan kompetitifitas serta memenuhi permintaan pasar.
- 4). Mengembangkan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan akses terhadap informasi, pasar, teknologi, permodalan serta infrastruktur pendukung lainnya.
- 5). Memantapkan kelembagaan petani serta mengembangkan sinergi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian.

d. Analisis SWOT dalam Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete di Kabupaten Buton.

SWOT merupakan salah satu metode analisis dalam pengembangan komoditas unggulan jambu mete guna mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam pengembangan agribisnis jambu mete di Kabupaten Buton dihadapkan pada peluang dan tantangan yang ada. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Untuk memperoleh hasil yang optimal dari analisa SWOT, maka fenomena lingkungan eksternal perlu dikemukakan untuk memperoleh details dan dimensi yang nantinya berguna untuk mengetahui faktor ancaman yang datangnya dari lingkungan eksternal maupun peluang yang diberikan oleh lingkungan eksternal itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa faktor-faktor eksternal yang perlu dan strategis diperhitungkan adalah faktor politik yang terjadi, faktor perkembangan ekonomi, perkembangan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, dan yang terakhir adalah perkembangan dan kemajuan terjadi pada lingkungan eksternal itu.

Pada analisa lingkungan eksternal ini akan diidentifikasi berbagai peluang (*opportunities*) yang perlu dikembangkan pada sektor perkebunan yang berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah di Kabupaten Buton, serta berbagai ancaman (*threats*) yang perlu diantisipasi dan dicari jalan keluarnya pada masa yang akan datang.

Adapun lingkungan eksternal yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu faktor eksternal yang menjadi peluang antara lain adanya dukungan kebijakan pemerintah, pengolahan produk jambu mete, dukungan dan kerjasama kemitraan, kondisi agroklimat, permintaan pasar yang tinggi, adanya jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi tantangan adalah timbulnya serangan organisme pengganggu tanaman, adanya janji-janji politik serta pemilihan kepala Desa dan adanya iklim ekstrim.

a. Aspek Politik

Aspek politik mencakup perkembangan lingkungan politik yang terjadi dalam hal ini menyangkut kebijakan-kebijakan politik yang terkait langsung dengan proses pembangunan yang terjadi di daerah, undang-undang tersebut antara lain Undang-undang nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 72 Tahun 2004, Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimensi politik ini akan berdampak atau menghasilkan konsekwensi sebagai peluang ataupun sebagai ancaman. Aspek politik yang menjadi peluang dalam pengembangan komoditas unggulan jambu mete antara lain adanya dukungan kebijakan pemerintah seperti yang tercantum di atas, adanya jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat sedangkan yang menjadi ancaman dalam aspek politik

antara lain adanya janji-janji politik terhadap masyarakat petani, pemilihan Kepala Desa serta tidak adanya jaminan keamanan.

Melihat perkembangan akhir-akhir ini, setelah arus reformasi yang melanda negeri ini, maka implikasi yang terjadi adalah masa penyesuaian atau transisi dari suatu kondisi masyarakat yang sebelumnya terkekang menjadi masyarakat yang memiliki kebebasan.

Kaitannya dengan aspek politik informan penelitian memberikan penjelasan sebagai berikut :

Faktor politik yang dianggap dominan dalam mendukung upaya peningkatan komoditas unggulan jambu mete adalah adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam mendukung administrasi legalitas izinnya sampai kebijakan memperoleh anggaran, termasuk jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (Hasil wawancara dengan Kepala Sub Dinas Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Buton, tanggal 20 Agustus 2010).

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton memberikan penjelasan sebagai berikut :

Faktor politik yang dianggap paling dominan dalam mendukung upaya peningkatan komoditas unggulan adalah adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam mendukung administrasi legalitas pengembangan komoditas unggulan jambu mete (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton, tanggal 13 Agustus 2010).

Hal tersebut berarti dalam rangka pengembangan komoditas unggulan jambu mete pemerintah senantiasa memberi kemudahan dalam bentuk kemudahan perizinan, pengurusan dokumen pajak dan ekspor, import barang modal dan pembebasan pajak (*tax holiday*).

Selain peluang tersebut faktor politik yang penting adalah faktor ketertiban dan keamanan sebagaimana yang dikatakan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton sebagai berikut :

Kondisi otonomi daerah saat ini membuat masyarakat semakin bebas mengeluarkan pendapat baik itu pendapat terkendali atau tidak. Namun yang dibutuhkan dunia usaha agribisnis saat ini adalah mengenai jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan semestinya. (Hasil wawancara tanggal 20 Agustus 2010)

UU N0.32 tahun 2004 beserta UU No. 25 tahun 2004, pelaksanaan otonomi daerah yang luas merupakan peluang bagi daerah untuk pengembangan dan kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat secara penuh, sesuai dengan kebutuhan aspirasi yang berkembang. Hal ini tentu berlaku juga pada sektor pengembangan perkebunan yang berpotensi dikembangkan sebagai andalan bagi pemasukkan kas daerah dalam bentuk PAD, sekaligus sektor ini bermanfaat bagi pergerakan ekonomi daerah yang nantinya dapat menjadi tumpuan bagi penyediaan lapangan pekerjaan masyarakat di Kabupaten Buton.

Selanjutnya Informan juga mengatakan bahwa :

Pengaruh pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Buton khususnya pada sentra komoditas jambu mete dalam hal ini yang menjadi oposisi Kepala Desa terpilih dominan menjadi masalah dalam menyukseskan kegiatan pemerintah khususnya tentang program pengembangan komoditas unggulan daerah. Selain hal tersebut di atas janji-janji politik pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang tidak terlaksana akan juga mempengaruhi kegiatan pengembangan komoditas unggulan jambu mete. (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian tanggal 20 Agustus 2010).

Pernyataan Informan tersebut sering terjadi hampir semua wilayah di Kabupaten Buton dimana dalam rangka melaksanakan program-program pemerintah ditingkat Desa senantiasa mengalami kendala dan hambatan. Kerap sekali oposisi dari Kepala Desa terpilih dan orang-orang dekatnya menghalangi program-program pemerintah dengan alasan yang kurang logis sehingga program-program tersebut terhambat. Dengan adanya faktor di atas menimbulkan

menurunnya kinerja kelompok tani dalam menyukseskan program-program pemerintah.

Selain itu juga terjadi janji-janji politik pada pemilihan Kepala Daerah yang tidak terlaksana sehingga membuat lembaga tani dalam pertanian secara luas tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Hal ini sejalan dengan pandangan Qudrat (2007 : 3.10) mengemukakan bahwa lingkungan politik dan/hukum dapat mencerminkan bagaimana interaksi yang terjadi antara organisasi dan pemerintah, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Tindakan pemerintah baik pusat maupun daerah, dapat mempengaruhi sifat perubahan persaingan di dalam industri dan pemberian pelayanan jasa. Keadaan politik dan/hukum yang pada akhirnya dapat memperbesar peluang atau ancaman atau kedua-duanya sekaligus. Misalnya mengenai peraturan tenaga kerja, perpajakan, kebijakan regulasi/deregulasi pemerintah. Kemudian kestabilan politik suatu Negara tentu akan memberikan pengaruh besar terhadap ketenteraman penyelenggaraan pemberi layanan jasa organisasi/perusahaan publik.

b. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi berhubungan dengan keterkaitan ekonomis sektor perkebunan di Kabupaten Buton dimana permintaan pasar pada sektor komoditas andalan ini mengalami peningkatan baik di pasar lokal, regional maupun pasar dunia. Kontribusi jambu mete Indonesia pada pasar Internasional masih relatif rendah dan berpotensi untuk ditingkatkan terutama untuk pasar mete gelondongan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya jumlah perdagangan antar pulau dimana komoditas mete memiliki jumlah yang besar permintaannya

Dengan demikian pasar jambu mete baik di dalam maupun di luar negeri terbuka lebar dan ini merupakan peluang yang sangat besar bagi pengembangan sektor unggulan daerah jambu mete di Kabupaten Buton.

Tabel 4. Data Permintaan Pasar Komoditas Perkebunan Kabupaten Buton Tahun 2010

No.	Jenis Komoditi	Volume (Ton)	Nilai (Rp.000)
1.	Kopra	1.435,25	7.606.825
2.	Mete Gelondongan	432,37	6.200.274
3.	Kacang Mete	85,75	3.961.650
4.	Kakao	253,24	3.976.166
5.	Biji Kapuk	25,33	5.066
6.	Kemiri Kupas	62,48	93.720
7.	Kopi	12,30	142.680
8.	Pinang Biji	3,70	20.720

Sumber Data : Kabupaten Buton Dalam Angka Tahun 2009

Data tersebut di atas memperlihatkan bahwa dari beberapa komoditas yang ada, komoditas jambu mete masih mendominasi nilai perdagangan antar pulau sebesar 7.606.825 ribu rupiah (34,57%), mete gelondongan 6.200.273,80 ribu rupiah (28,17 %) dan Kakao 3.976.166,00 ribu rupiah (18,07 %).

Pada aspek ekonomi secara keseluruhan di Indonesia, memang terlihat bahwa kinerja perekonomian nasional belumlah memadai akibat krisis ekonomi moneter yang berkepanjangan itu sejak tahun 1997. Namun bagaimanapun juga sektor agribisnis masih tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik khususnya pada tingkat tenaga kerja.

Hasil wawancara dengan informan pengaruh kontribusi ekonomi pada sektor perkebunan :

Sektor perkebunan sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Buton, ini dibuktikan dengan adanya PDRB yang lumayan dari sektor ini, adanya potensi sumber daya lahan yang

besar, ketersediaan benih unggul lokal yang siap diolah, adanya integrasi antara tanaman komoditas unggulan jambu mete dengan ternak, adanya permintaan pasar yang tinggi, olahan jambu mete yang berlimpah, adanya dukungan kerjasama dan kemitraan serta dukungan dari agroklimat yang sesuai. Tapi untuk 2 tahun terakhir produksi dari komoditas jambu mete produksinya mengalami penurunan yang disebabkan adanya iklim ekstrim (Hasil wawancara dengan Mitra Usaha Dinas Pertanian, tanggal 18 Agustus 2010).

Ketua Kelopoktani Nelayan Andalan, Gapoktan memberikan penjelasan, sebagai berikut :

Sektor perkebunan sudah pasti mempunyai kontribusi yang positif terhadap perekonomian di Kabupaten Buton. Hal ini antara lain disebabkan kita memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan komoditas unggulan jambu mete ini, seperti terdapatnya dan dukungan kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait, meningkatnya permintaan pasar, adanya kondisi agroklimat yang sesuai dengan kondisi sentra produksi, tingginya aktifitas masyarakat yang mengelola komoditas unggulan jambu mete. (Hasil wawancara dengan ketua KTNA, Gapoktan Makmur, tanggal 14 Agustus 2010).

Pada sentra produksi Jambu mete di Kabupaten Buton banyak hal yang diandalkan dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi di Kabupaten Buton. Hal-hal tersebut antara lain seperti yang disebutkan dalam wawancara dengan Kepala Dinas serta beberapa mitrausaha dan kelompok tani antara lain adanya potensi sumber daya alam yang merupakan modal besar untuk dikembangkan, terdapatnya benih/bibit unggul lokal yang tersebar pada sentra produksi, besarnya permintaan pasar, pengolahan jambu mete yang berlimpah serta adanya dukungan kerjasama dan kemitraan yang ditunjang dengan agroklimat yang sesuai.

Faktor ancaman yang muncul dalam rangka peningkatan komoditas jambu mete ini dalam aspek ekonomi yaitu permainan harga oleh para tengkulak/pengusaha baik dari dalam maupun luar daerah dengan alasan-alasan

antara lain mutu yang kurang diterima pasar sehingga akan merugikan masyarakat/petani.

Faktor peluang lain yang sekaligus merupakan ancaman dalam pengembangan komoditas unggulan daerah sektor perkebunan di Kabupaten Buton adalah kondisi agroklimat dimana kondisi agroklimat Kabupaten Buton khususnya pada sentra produksi mete sangat sesuai untuk pengembangan komoditas jambu mete terutama curah hujan, suhu, penyinaran dan kelembaban udara. Tanaman jambu mete tidak menghendaki curah hujan yang terlalu tinggi karena dapat menghambat pembungaan sedangkan udara yang terlalu kering juga dapat menggagalkan pembuahan. Ancaman lain yaitu tingginya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang disebabkan munculnya iklim agroklimat berubah-ubah terutama curah hujan tinggi pada saat jambu mete (iklim ekstrim) yang mengakibatkan kerusakan buah/gugurnya buah jambu mete.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian , mengatakan bahwa

Kondisi agroklimat Kabupaten Buton khususnya di daerah sentra produksi jambu mete (Kecamatan Lakudo, Gu, Mawasangka Tengah, Mawasangka) sangat sesuai dengan kondisi pengembangan komoditas unggulan jambu mete terutama curah hujan, suhu, penyinaran dan kelembaban udaranya. Akan tetapi kondisi ini merupakan juga ancaman yang selama ini dialami oleh petani jambu mete pada sentra produksi yaitu kondisi perubahan iklim yang tiba-tiba seperti tingginya curah hujan pada saat tanaman ini berbuah sehingga bunganya gugur mengakibatkan kerusakan dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang mengakibatkan kegagalan jambu mete. Komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton pada awalnya sekitar tahun 1975 ditanami sebagai tanaman konservasi dengan tidak memperhitungkan faktor teknis sehingga semakin lama semakin rapat sehingga produksinya menurun. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan

petani dari segi ekonomi, selain itu juga serangan organisme pengganggu tanaman juga mengalami peningkatan (Hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Buton, tanggal 10 Agustus 2010)

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya preventif dan kuratif dalam mengatasi permasalahan organisme pengganggu tanaman dan dampak buruknya dapat diukur.

Pada awalnya tanaman jambu mete di Kabupaten Buton ditanam sebagai tanaman konservasi/reboisasi tanpa memperhitungkan aspek teknis jarak tanam dan penanaman sehingga pada awalnya tanaman ini memberikan produksi yang baik untuk ekonomi masyarakat. Semakin lama tanaman ini semakin rapat sehingga mengurangi ruang udara dan penyinaran matahari yang mengakibatkan bercokolnya organisme pengganggu tanaman dan terjadinya persaingan pemanfaatan sumberdaya (unsur hara dan cahaya) sehingga pada akhirnya mempengaruhi produksi tanaman.

Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Buton pada sektor perkebunan sampai akhir Desember tahun 2010 memperlihatkan serangan OPT pada sentra produksi komoditas unggulan daerah bahwa luas serangan sebesar 11.240 Ha (50%). Adapun jenis OPT antara lain penggerok daun, *Imperata cylindrical*, *Chromoleana adorata*, dengan tingkat serangan tergolong ringan, sehingga pengendaliannya rata-rata masih menggunakan pengendalian mekanis. Munculnya permasalahan juga disebabkan oleh kondisi agroklimat yang berfluktuasi pada saat pembungaan/pembuahan dan kurang pemeliharaan.

Kondisi agroklimat wilayah komoditas unggulan sangat sesuai sekaligus juga merupakan suatu ancaman dengan kondisi iklim yang tiba-tiba berubah sehingga

meningkatnya OPT, disamping itu juga disebabkan oleh kondisi kelembagaan tani yang belum berjalan sesuai yang diharapkan dengan belum berjalannya fungsi-fungsi kelembagaan tani seperti wadah kerjasama, wahana pendidikan, tempat memecahkan permasalahan, yang dialami petani baik teknis maupun usaha peningkatan perekonomian dan kesejahteraan petani.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Iwan (2008 : 85-86) bahwa perekonomian pada waktu sekarang dan dimasa yang akan datang dapat mempengaruhi keberuntungan dan strategi organisasi. Faktor-faktor ekonomi spesifik yang dianalisis dan didiagnosis kebanyakan perusahaan/organisasi termasuk : (1) Tahapan siklus bisnis. Perekonomian dapat digolongkan ke dalam keadaan depresi, resesi, kebangkitan atau kemakmuran; (2) Gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa. Jika inflasi sangat tajam, mungkin diadakan pengendalian upah dan harga; (3) Kebijakan keuangan, suku bunga; (4) Kebijakan fiskal; tingkat pajak untuk perusahaan dan perseorangan; (5) Neraca pembayaran. Setiap segi ekonomi dapat membantu atau menghambat upaya pencapaian tujuan perusahaan/organisasi dan menyebabkan keberhasilan ataupun kegagalan strategi. Selanjutnya Qudat (2007 : 3.8-3.9) memberi pandangan bahwa lingkungan ekonomi adalah arah dan ciri dari suatu perekonomian dimana organisasi akan bersaing dan bagaimana harus bersaing secara sehat dalam lingkungan industrinya. Setiap faktor ekonomi dapat merupakan peluang ataupun ancaman yang bisa menyebabkan keberhasilan ataupun kegagalan strategi organisasi.

c. Aspek Sosial dan Budaya

Aspek sosial terlihat adanya keinginan dari masyarakat pada sentra produksi di Kabupaten Buton untuk terlibat dan mengembangkan sektor perkebunan (jambu mete). Hal ini didasarkan atas pengalaman yang dialami bahwa komoditas unggulan ini dapat memberikan kehidupan dan pendapatan yang lebih baik jika dikelola secara baik.

Menurut data dari Dinas Pertanian Kabupaten Buton besarnya keinginan masyarakat untuk mengembangkan komoditas jambu mete ini dibuktikan dengan besarnya petani pekebun jambu mete yaitu tahun 2008 sampai tahun 2010 berjumlah 15.362 orang.

Masyarakat Kabupaten Buton yang ada di sentra produksi merupakan masyarakat yang dinamis dan ulet sebagaimana masyarakat Jawa/luar Jawa yang ada di transmigrasi yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Tanaman jambu mete yang merupakan tanaman tahunan yang sesuai dikembangkan di daerah marginal dan beriklim kering, menambah semangat petani setempat untuk mengembangkannya, karena pemeliharaan yang intensif masih memberikan pendapatan tambahan jika pengembangan jambu mete yang disertai aplikasi teknologi budidaya dan manajemen yang tepat akan meningkatkan nilai tambah hasil yang diperoleh.

Hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :

Rata-rata masyarakat yang ada di sentra produksi merupakan masyarakat yang ulet dan telaten disebabkan oleh karakter lahan kering dan marginal, namun masyarakat juga memiliki kelemahan yaitu cepat puas dengan hasil yang dicapai dan gampang terpengaruh dengan usaha lain. Kemudian kaitannya dengan yang dilakukan masyarakat dalam program pembangunan yang

dilakukan pemerintah daerah untuk pengembangan komoditas unggulan jambu mete adalah sangat direspon baik oleh masyarakat asal program tersebut sinergis dengan kondisi sentra produksi seperti keinginan masyarakat untuk : menjarangkan tanaman jambu mete mereka yang sudah tua, adanya benih unggul, adanya Diklat petani tentang peningkatan mutu tanaman, peningkatan ketersediaan sarana prasarana, serta pengembangan sentra produksi. (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton, tanggal 20 Agustus 2010).

Selanjutnya Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian

mengemukakan bahwa:

Yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan antara lain adalah kebiasaan masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan tani, mereka aktif jika ada bantuan yang diberikan pemerintah, kalau tidak ada bantuan mereka pasif. Kemudian kebiasaan lain adalah sifat bosan dan tidak fokus pada satu komoditas. Sehingga untuk mengatasi hal ini adalah dengan penguatan kelembagaan tani. Kebiasaan masyarakat yang kurang sejalan dengan upaya pengembangan komoditas unggulan daerah sektor perkebunan di Kabupaten Buton adalah sebagian kearifan lokal masyarakat yang berbeda waktu tentang jadwal tanam dengan petunjuk teknis yang ada serta adanya budaya malas khusus masyarakat lokal pada sentra produksi. Peolakan yang dilakukan masyarakat dalam program pengembangan komoditas jambu mete kita ketahui bahwa program yang diluncurkan oleh pemerintah sangat baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan petani. Namun ada beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti Bantuan Sosial (BANSOS) yang tidak direspon oleh masyarakat karena dilakukannya dengan tidak melibatkan petani/masyarakat (Hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Buton, tanggal 10 Agustus 2010).

Perilaku masyarakat di sentra produksi komoditas unggulan sangat beragam yang kadangkala merugikan mereka. Salah satu cara mengatasi perilaku sosial masyarakat tersebut adalah dengan peningkatan dinamika kelembagaan tani. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Buttner dalam Qudrat (2007 : 3.13) yang mengatakan bahwa segmen sosial dan budaya terpusat pada perilaku sosial dan nilai budaya dalam masyarakat yang terwujud ke dalam perubahan gaya hidup yang mempengaruhi permintaan

terhadap produk/jasa ataupun yang mempengaruhi cara organisasi berhubungan dengan tenaga kerjanya. Salah satu contoh perubahan segmen ini adalah kecenderungan banyaknya kaum perempuan saat ini yang memilih berwiraswasta.

Lebih lanjut lagi Purwanto (2008 : 87) mengungkapkan bahwa rangkaian terakhir dari faktor sosial ekonomi terpusat pada nilai dan sikap orang, pelanggan dan karyawan yang dapat mempengaruhi strategi. Nilai-nilai ini terwujud ke dalam perubahan gaya hidup yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara organisasi berhubungan dengan karyawan/masyarakat.

d. Aspek Teknologi

Aspek teknologi adalah merupakan tuntutan dari perkembangan dunia modern dengan ketersediaan peralatan pertanian pada era globalisasi dan penerapan perdagangan bebas dunia yang harus diantisipasi sejak awal, supaya pengoptimalan sumber daya untuk memenangkan kompetisi yang ada dapat dilakukan.

Menurut data dari Dinas Pertanian khususnya sektor perkebunan terdapat beberapa adanya bantuan alat dan mesin pengolahan komoditas unggulan jambu mete sebagai berikut :

Tabel 5. Bantuan Alat Dan Mesin Pengolahan Komoditas Jambu Mete

No.	Nama Alat & Mesin	Tahun	Kecamatan/Desa	Ket.
1.	Pengolahan Mete Bebas	2006	Gu	2 Unit
2.	Oven biji mete	2008	Lakudo	1 Unit
3.	Oven biji mete	2009	Mawasangka	1 Unit

Data : Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tahun 2010

Data tersebut memperlihatkan bahwa teknologi alat pengolahan jambu mete telah ada pada sentra produksi jambu mete sekalipun sangat terbatas jumlahnya.

Penerapan teknologi di sektor perkebunan pada kenyataannya merupakan hal yang tak terhindari lagi (*inevitable*). Kemajuan teknologi baik dari segi peralatan maupun dari segi varietas tanaman yang tersedia memberikan peluang bagi pengembangan sektor perkebunan, khususnya yang berlaku di Kabupaten Buton.

Teknologi tentunya berkaitan dengan metode, cara atau teknik pengolahan pertanian yang dimiliki dan dikerjakan oleh para petani yang terlibat secara langsung dalam pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Buton. Teknik pekerjaan ini tentu berkaitan dengan tingkat produktivitas yang diperoleh atau dihasilkan oleh para petani pada komoditas andalan perkebunan yang menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang ada di Kabupaten Buton dan wilayah sekitarnya.

Hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :

Dengan adanya bantuan-bantuan teknologi pada sentra produksi direspon baik oleh masyarakat hanya yang menjadi permasalahan adalah rendahnya tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat yang disebabkan rendahnya SDM

masyarakat terhadap bantuan-bantuan yang diberikan masyarakat. Disamping hal tersebut yang paling dipermasalahkan adalah daya listrik pada sentra produksi belum mampu untuk menggerakkan mesin-mesin bantuan pemerintah selain itu juga disebabkan oleh biaya operasional yang tinggi. (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton, tanggal 22 Agustus 2010).

Selanjutnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian kaitannya dengan teknoknologi mengungkapkan bahwa :

Mengenai peralatan maupun metode teknologi pertanian yang diperkenalkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buton khususnya mengenai mesin pengolahan pasca panen, itu sangat baik terhadap pengembangan komoditas jambu mete karena semua itu dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan komoditas unggulan kita. Hanya yang perlu dilaksanakan demi keberhasilannya, saya kira butuh penerapan teknologi oleh kelompok tani penerima bantuan. (Hasil wawancara dengan Kasubdin Perdagangan dan Industri Kabupaten Buton, tanggal 29 juli 2010).

Teknologi yang telah diadakan oleh Dinas Pertanian baik itu melalui APBD maupun tugas pembantuan yang ada di lokasi pengembangan komoditas unggulan terkesan mubasir, hal ini disebabkan antara lain masih kurangnya SDM dan sarana penunjangnya. Sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan pengetahuan inovasi dan teknologi oleh masyarakat maupun petugas pertanian. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Qudrat (2004 : 3.11) yang menyatakan bahwa perubahan disektor ilmu pengetahuan dan khususnya teknologi , dapat memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan hasil dan tujuan, atau mengancam kedudukan organisasi. Hal ini terjadi karena perubahan teknologi akan mempengaruhi bahan baku, proses produksi, dan produk organisasi itu sendiri. Dengan perubahan teknologi yang pesat, suatu organisasi dituntut untuk

mampu melakukan inovasi dan menggunakan teknologi yang ada dengan berbagai cara baru.

3. Analisa Lingkungan Internal

Dalam analisa lingkungan internal yang akan menjadi titik perhatian adalah tiga aspek utama yaitu sumber daya apakah yang dimiliki oleh Kabupaten Buton dalam sektor perkebunan khususnya pada sentra produksi sektor andalan, strategi apa sajakah yang dilakukan oleh institusi yang berkompeten, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam hal ini Dinas Pertanian, dan yang terakhir adalah kinerja apa sajakah yang sudah dicapai selama ini sebagaimana tercantum pada uraian di bawah ini.

Tabel 6. Data Dinas Pertanian tentang Sumber daya komoditas jambu mete yang dimiliki Kabupaten Buton Tahun 2010.

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Jml.Petani (KK)	Keterangan
1.	Lasalimu	790,00	67,50	747	
2.	Lasalimu Selatan	1.516,00	-	1.188	
3.	Siotapina	389,00	15,92	645	
4.	Pasarwajo	1.626,00	1,50	1.923	
5.	Wabula	676,00	-	432	
6.	Wolowa	890,00	23,00	597	
7.	Sampolawa	622,00	-	1.695	
8.	Batu Atas	4,00	-	12	
9.	Lapandewa	431,00	1,85	320	
10.	Batauga	2.241,00	50,00	2.200	
11.	Siompu	53,00	-	122	
12.	Siompu Barat	2,00	-	5	
13.	Kadatua	5,00	-	28	
14.	Kapontori	540,00	-	703	
15.	GU	2.496,00	8,00	1.804	
16.	Sangia Wambulu	75,00	-	130	
17.	Lakudo	3.754,00	47,73	490	
18.	Mawasangka	3.810,00	87,50	1.886	
19.	Mawasangka Timur	341,00	42,00	120	
20.	Mawasangka Tengah	2.164,00	5,00	210	
21.	Talaga Raya	168,00	2,26	110	

Data tersebut di atas memperlihatkan bahwa jumlah luas lahan komoditas unggulan jambu mete yang dimiliki Kabupaten Buton tahun 2010 seluas 22.593,00 ha, tahun 2009 seluas 22.595,00 ha dan tahun 2008 seluas 22.575,00 ha. Untuk produksi memperlihatkan bahwa produksi jambu mete tahun 2010 sebesar 352,26 ton sedangkan tahun 2009 sebesar 7.208,00 ton dan produksi tahun 2008 adalah sebesar 6.676,00 ha. Sedangkan besarnya jumlah petani pekebun mete untuk tahun 2010 adalah sebesar 15.362,00 kk sama dengan jumlah petani tahun 2009 dan tahun 2008.

Kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian selama kurun tiga tahun terakhir khususnya mengenai pengembangan komoditas unggulan jambu mete adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Data Kinerja Tentang Komoditas Unggulan Jambu Mete Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buton Dalam Kurun Waktu Tiga Tahun Terakhir.

No.	Jenis Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Tahun Pelaksanaan
1.	Pembuatan Kebun Induk Jambu Mete 7 Ha	Swakelola Dinas	Kec. Mawasangka	2008
2.	Pengadaan Oven biji mete 1 unit	Lombe Jaya	Kec. GU	2008
3.	Pengadaan Oven biji mete 1 unit	Pecintai lolibu	Kec. Lakudo	2008
4.	Bantuan Sosial Perluasan Areal jambu mete 100 Ha	Sinar Matahari	Kec. Lakudo	2008
	Pengadaan bibit jambu mete 25.000 anakan	Cahaya Matahari 1, c Cahaya Matahari 2	Kec. Batauga	2009
		Lolibu Mekar, Karya Mandiri, Pecinta Tei Lolibu, Peduli Pantai Lolibu, Tongkuno	Kec. Lakudo	

		Wataeo, Kadolo Balano, La Bantu	Kec.Mawasangka	
5.	Pengadaan Oven Biji Mete 1 unit	Bagea	Kec.Mawasangka	
6.	Optimasi Lahan Mete	Sumber Rezeki	Kec. GU	2009
7.	Reklamasi Lahan Mete	Bangun Karya	Kec.GU	2009
8.	Rehabilitasi jambu mete	Sumber Rezeki, Bangun Karya	Kec. GU	2010
		Mone, Pecintai Lolibu	Kec. Lakudo	
		Matara, Tunas Muda	Kec.Mawasangka	

Sumber Data : Sektor Perkebunan Dinas Pertanian Kab. Buton

Data di atas memperlihatkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Buton sebagai instansi pemberi bantuan fisik kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani selama ini telah melaksanakan kegiatan tersebut di atas dengan realisasi 100%, hanya yang menjadi kendala adalah kurang bermanfaatnya kelembagaan tani sehingga kegiatan yang diberikan belum memanfaatkan sesuai yang diharapkan. Kendala lain juga yang dialami oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buton adalah mengenai jumlah alat dan mesin yang sangat terbatas jumlahnya pada setiap sentra produksi.

a. Faktor - faktor Kekuatan Internal

1. Sumber daya

Berbicara mengenai sumber daya yang dimiliki dalam rangka analisa stratejik manajemen, maka yang akan dianalisa adalah sumber daya yang menentukan dalam

rantai nilai (*value chain*) yang dianggap berpengaruh secara positif terhadap perkembangan sektor perkebunan Kabupaten Buton.

Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tahun 2010 memperlihatkan bahwa ada beberapa sumber daya yang ada dalam pengembangan komoditas unggulan jambu mete antara lain : besarnya luas lahan yang dimanfaatkan sebesar 22.593 Ha dengan potensi pengembangan lahan masih ada sekitar 11.265 Ha, besarnya masyarakat/petani komoditas jambu mete sekitar 15.362 KK.

Sumber daya lahan adalah termasuk kekuatan yang dimiliki Kabupaten Buton dalam mengembangkan komoditas unggulan daerah dilihat dari ketersediaan lahan untuk kemungkinan ekstensifikasi. Dengan demikian potensi sumber daya lahan merupakan salah satu kekuatan untuk pengembangan agribisnis jambu mete di Kabupaten Buton.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya penentu keberhasilan pengembangan agribisnis jambu mete di Kabupaten Buton baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Faktor tenaga kerja bukanlah masalah dalam pengembangan jambu mete bahkan merupakan unsur kekuatan karena dari semua jumlah petani kebun di Kabupaten Buton tahun 2010 sebanyak 38.961,35 KK, petani yang mengusahakan jambu mete sebesar 15.362 KK selebihnya merupakan rumah tangga pertanian yang mengusahakan tanaman semusim dan hortikultura. Oleh karena itu faktor sumber daya manusia akan mampu mendukung pengembangan agribisnis jambu mete di Kabupaten Buton, apa lagi bila dapat dilakukan integrasi terpadu antara pengembangan jambu mete dan tanaman semusim.

Sumber daya manusia pada sentra produksi komoditas unggulan masih tergolong rendah sehingga sebenarnya ke depan perlu dilakukan hal-hal: pemberdayaan petani, pengkajian SDM pertanian, pendidikan petani mandiri, pemagangan petani potensial, penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis dan lain-lain.

Ketersediaan benih dan bibit unggul di Kabupaten Buton merupakan faktor sumber daya dimana umumnya benih dan bibit berasal dari lokasi setempat atau lokal, yang telah mengalami adaptasi terhadap kondisi lingkungan setempat. Benih lokal dapat dijadikan sebagai benih unggul spesifik lokasi selama dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam sistem pengadaannya menggunakan sistem blok penghasil tinggi. Artinya biji jambu mete yang disiapkan sebagai benih dipanen dari blok areal pertanaman dengan potensi produksi tinggi, bukan dari pohon tanaman yang secara individual tinggi. Benih klon unggul lokal ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pengadaan benih dan bahan tanam unggul. Ada beberapa tanaman blok penghasil tinggi di Kabupaten Buton yaitu terdapat di Kecamatan Batauga, Kecamatan Lakudo dan Kecamatan GU. Blok penghasil tinggi tersebut sampai saat ini belum memiliki sertifikasi dari lembaga perbenihan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perkebunan Terpadu merupakan pengembangan perkebunan terpadu berbasis komoditas unggulan jambu mete yang sangat dimungkinkan di Kabupaten Buton terutama integrasi dengan ternak sapi. Pengembangan usaha terpadu juga dapat dilakukan dengan tanaman semusim sumber bahan makanan terutama saat tanaman jambu mete belum berproduksi secara penuh. Kegiatan ini akan menambah

pendapatan usaha tani dan merupakan unsur kekuatan dalam pengembangan agribisnis jambu mete di Kabupaten Buton.

Strategi yang akan dilakukan oleh Kabupaten Buton dalam melaksanakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete ini yaitu (a) pengembangan sentra produksi sector unggulan jambu mete, (b) peningkatan kemampuan SDM melalui penelitian, penyuluhan dan Diklat, (c) introduksi dan pengadaan benih unggul jambu mete dari BPTP, (d) peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam, (e) peningkatan mutu gelondongan mete, (f) integrasi usaha perkebunan jambu mete dengan ternak.

Kinerja yang dicapai selama ini dalam usaha pengembangan komoditas unggulan jambu mete yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan yang berkaitan dengan sumberdaya menyatakan bahwa :

Sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Buton khususnya SDA sudah memadai dalam rangka menganalisis strategi kebijakan komoditas unggulan jambu mete. Kita ketahui bahwa SDA yang dimiliki oleh Kabupaten Buton sangat besar sekali, hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan kering yang sangat cocok sekali dengan pengembangan sektor unggulan jambu mete, tidak hanya luas lahan tapi sifat fisik dan kimia tanahnya sangat cocok yang memungkinkan komoditas unggulan ini dapat bertahan dan meningkat produksinya diluar faktor-faktor pembatas lain seperti SDM dan sarana penunjang lainnya. (Wawancara disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton, tanggal 22 Agustus 2010).

Selanjutnya Informan oleh mitra usaha Dinas Pertanian Kabupaten Buton

Bahwa :

SDA yang dimiliki Kabupaten Buton khususnya pada sentra produksi komoditas unggulan jambu mete sangat besar yang meliputi hampir semua Kecamatan di Kabupaten Buton dengan iklim yang sangat cocok untuk pengembangan jambu mete, hanya kurun waktu tiga tahun terakhir

memperlihatkan iklim ekstrim. Mengenai SDM petani sangat bervariasi, khusus petani rata-rata memiliki SDM rendah sehingga dalam mengadopsi teknologi dan informasi juga sangat rendah. (Wawancara disampaikan oleh Mitra Usaha Dinas Pertanian Kabupaten Buton, tanggal 18 Agustus 2010).

Potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Buton sangat besar khususnya potensi lahan pengembangan jambu mete yang ada pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Buton. Sumber daya ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang baik untuk mengelolanya disamping dibutuhkan sarana penunjang lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Suripin, (2004 : 1) bahwa Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang paling fundamental yang dimiliki manusia. Tanah merupakan media utama dimana manusia bisa menghasilkan bahan pangan, sandang, papan, tambang dan tempat dilaksanakannya berbagai aktifitas lainnya. Penghargaan manusia terhadap tanah sudah berlangsung sejak manusia menghuni bumi ini, bahkan sampai sekarang kebanyakan penduduk bumi adalah peladang dan menggunakan alat sederhana untuk memproduksi makanan.

b. Faktor-faktor Kelemahan Internal

1. Masih rendahnya adopsi teknologi di sentra produksi

Tingkat adopsi teknologi budidaya rujuran dalam pengembangan jambu mete di Kabupaten Buton khususnya pada sentra produksi unggulan daerah relatif masih rendah. Selain karena keterbatasan modal dan tingginya harga input pertanian seperti obat-obatan, pupuk dan pestisida juga kekompakan internal dalam kelompok tani rata-rata tidak terjalin.

Data Dinas Pertanian khususnya sektor perkebunan memperlihatkan bahwa ada beberapa bantuan teknologi pengembangan komoditas unggulan mete di

Kabupaten Buton tidak dapat dimanfaatkan yaitu mesin oven biji mete yang diberikan pada kelompok Bagea Kecamatan Mawasangka dengan anggota 30 orang, begitu pula dengan bantuan oven biji mete di kelompok Pecintai Lolibu di Kecamatan Lakudo dan Sinar Matahari di Kecamatan Gu masing-masing jumlah anggota 30 orang. Bantuan ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena rendahnya pengetahuan (adopsi teknologi) tentang penggunaan mesin tersebut.

2. Sarana dan prasarana produksi yang terbatas.

Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang produksi di Kabupaten Buton dapat menjadi kelemahan dan kekurangan dalam pengembangan agribisnis jambu mete seperti jalan, jembatan dan sarana transportasi pada agribisnis hulu dan pasokan tenaga listrik pada industri hilir pengolahan jambu mete.

Menurut data statistik tahun 2010 mengenai sarana dan prasarana penunjang pengembangan komoditas unggulan daerah jambu mete seperti sarana listrik jumlah pelanggan sebanyak 18.877 pelanggan, dari jumlah tersebut yang terbesar adalah rumah tangga sekitar 95,74% dari jumlah pelanggan PLN disusul pelanggan sosial sebanyak 2,17%, dari sektor bisnis sebesar 1,48%, jawatan pemerintah 0,48% dan yang terkecil di sektor industri sebesar 0,04%. Untuk angkutan transportasi pada tahun 2009 total panjang jalan di Kabupaten Buton mencapai 867,52 km yang terdiri dari jalan negara 88,30 km (10,18%), jalan provinsi 135,98 km (15,67%) dan jalan Kabupaten sepanjang 643,24 km (74,15%). Jika dilihat dari permukaan jalan, tahun 2009 untuk jalan yang diaspal tercatat sepanjang 744,27 km (85,79%) dan sisanya 123,25 km (14,21%) adalah

jalan yang tidak diaspal. Dari total panjang jalan yang tidak diaspal 66,46 km adalah jalan kerikil, 32,21 km jalan tanah dan 24,68 km tidak dirinci.

Untuk sarana angkutan terdiri dari angkutan darat, angkutan laut dan angkutan Ferry. Pada 2008, jumlah kendaraan roda empat yang ada di Kabupaten Buton tercatat 140 buah, terdiri dari mikrolet sebanyak 86 buah, bus 6 buah, truk sebanyak 36 buah.

Angkutan laut di Kabupaten Buton masih mempunyai peran yang sangat penting dan dominan untuk menunjang kelancaran angkutan barang dan perdagangan antar pulau hasil perkebunan. Kunjungan kapal di Kabupaten Buton pada tahun 2009 yaitu pelayaran rakyat 207 kunjungan, pelayaran perintis 29 kunjungan, pelayaran umum 55 kunjungan. Sedangkan untuk angkutan ferry. Pada tahun 2009 jumlah trip penyeberangan dipelabuhan Waara sebanyak 2.040 trip dan 156 trip dipelabuhan ferry Mawasangka.

3. Jarak tanaman yang rapat

Pada lokasi pengembangan komoditas unggulan dominan memiliki jarak tanam yang rapat dalam pembudidayaannya mengakibatkan produksi tanaman terhambat. Hal ini disebabkan karena pada awalnya penanaman jambu mete ditujukan untuk konservasi lahan kritis dengan jarak tanam yang rapat dengan mengabaikan teknis budidaya. Tanaman dengan jarak tanam rapat ini seharusnya secara berkala dilakukan penjarangan. Hambatan yang timbul dalam proses melakukan penjarangan adalah petani merasa sayang untuk melakukan penjarangan. Akibat dari tanaman yang rapat ini menyebabkan tanaman saling

menaungi dan meningkatkan persaingan sebagai tempat bercokolnya hama penyakit pada tanaman tersebut dan akhirnya produksi rendah.

Tabel 8. Data Luas Lahan Tanaman Jambu Mete Dengan Jarak Tanam Rapat

No.	Komoditas	Tahun	Luas Lahan (Ha)	Jarak Tanam Rapat (Ha)
1.	Jambu Mete	2008	31.480,46	29.232
2.	Jambu Mete	2009	32.064,80	28.859
3.	Jambu Mete	2010	32.217,55	28.996

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tahun 2010

Data di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2010 luas jarak tanam rapat sebesar 28.996 ha dari luas lahan 32.217,55 ha, tahun 2009 luas jarak tanam rapat sebesar 28.859 dari luas lahan 32.064,80 ha, tahun 2008 luas jarak tanam rapat seluas 29.232 ha dari luas lahan 31.480,46 ha.

4. Panen Dini

Panen yang dilakukan pada saat jambu mete belum matang panen akan berakibat pada rendahnya rendemen kacang mete dan menurunnya bobot gelondong. Petani biasanya melakukan panen meskipun buah semu belum besar atau berubah warna. Keadaan ini dapat menurunkan produksi dan kualitas jambu mete sehingga merupakan kelemahan internal dalam pengembangan komoditas unggulan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Dinas Pertanian dan Badan Informasi Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Buton menyatakan bahwa :

Respon dari pihak-pihak terkait terhadap peralatan yang diperkenalkan oleh pemerintah adalah respon sangat bagus hanya yang menjadi kendala adalah adopsi teknologi sangat rendah untuk mengoperasionalkan bantuan teknologi

tersebut. Selanjutnya dikatakan juga bahwa yang menjadi kelemahan dalam pengembangan sektor unggulan adalah jarak tanam yang begitu rapat pada sentra produksi, panen dini serta terbatasnya benih unggul yang berlabel dan bersertifikat. (Wawancara pada tanggal 20 Agustus 2010)

Selanjutnya mitra usaha Dinas Pertanian Kabupaten Buton memberikan pernyataan bahwa :

Mengenai tanggapan dan kepuasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam program pemerintah dalam rangka pengembangan komoditas unggulan jambu mete sangat bervariasi, untuk masyarakat yang melaksanakan sungguh-sungguh program dari pemerintah maka mereka merasa puas dan serius memeliharanya, ada juga yang kurang puas dan cenderung menjadi profokator karena kecemburuan sosial tidak mendapatkan bantuan karena lembaga/keompok yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. (Hasil wawancara dengan Mitra Usaha Pertanian, tanggal 18 Agustus 2010)

Respon masyarakat yang ada pada sentra produksi sangat besar mengenai peralatan yang diperkenalkan oleh pemerintah hanya yang menjadi permasalahannya adalah adopsi teknologi masyarakat masih tergolong rendah untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Selain respon tersebut yang menjadi permasalahan lain pada sentra pengembangan adalah jarak tanam yang begitu rapat, panen dini serta terbatasnya benih unggul. Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan kelembagaan tani yang aktif. Hal ini sesuai dengan pandangan Mardianto, (1993 : 256) bahwa kelembagaan tani itu dibentuk mempunyai fungsi sebagai tempat ; pendidikan petani, penyampaian inovasi dan teknologi, pemecahan masalah petani, perubahan perilaku, sebagai tempat menjual inovasi, sebagai tempat bekerjasama.

Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Buton tahun 2010 sektor perkebunan memiliki data produksi tanaman jambu mete yang di panen dini sebagai berikut :

Tabel 9. Data Produksi Tanaman Jambu Mete Yang Di Panen Dini

No.	Komoditas	Tahun	Data Produksi (Ton)	Panen Dini (Ton)
1.	Jambu Mete	2008	6.676,00	668
2.	Jambu Mete	2009	7.208,00	721
3.	Jambu Mete	2010	352,26	35

c. Matriks SWOT dan Isu Strategis

Dari keseluruhan hasil analisa yang dilakukan dengan bertolak dari teknik analisa SWOT dan penerapan alur berpikir manajemen strategik, maka dapat disusun isu-isu strategis yang ditemukan, serta rangkuman strategi yang dapat diambil dari analisa SWOT tersebut. Berdasarkan pengkajian dan analisa terhadap fakta yang ada dan berdasarkan asumsi yang dibangun dari kerangka berpikir manajemen strategik, maka diperoleh strategi-strategi yang tepat untuk digunakan di masa yang akan datang dalam upaya pengembangan komoditas unggulan daerah sektor perkebunan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 10. Ringkasan Matriks SWOT

Faktor-faktor Internal	Faktor-faktor Eksternal
Kekuatan (S) 1. Potensi sumber daya lahan 2. Potensi sumber daya manusia (SDM) 3. Ketersediaan benih dan bibit unggul lokal 4. Pengembangan perkebunan dengan ternak	Peluang (O) 1. Adanya dukungan kebijakan pemerintah 2. Pengolahan produk jambu mete 3. Dukungan dan kerjasama kemitraan 4. Kondisi agroklimat yang sesuai 5. Permintaan pasar yang tinggi 6. Adanya jaminan keamanan dan ketertiban
Kelemahan (W) 1. Adopsi teknologi masih rendah 2. Benih unggul terbatas 3. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi 4. Jarak tanaman yang rapat 5. Panen Dini	Ancaman (T) 1. Timbulnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) 2. Adanya janji-janji politik serta pemilihan Kepala Desa. 3. Adanya Iklim Ekstrem

Sumber : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton (Informan Kunci)

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 11. Matriks SWOT Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete Di Kabupaten Buton

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan kebijakan pemerintah. 2. Pengolahan produk jambu mete. 3. Dukungan dan kerjasama kemitraan. 4. Kondisi agroklimat yang sesuai 5. Permintaan pasar yang tinggi 6. Adanya jminan kemandirian dan Ketertiban masyarakat 	<p>Tantangan (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Timbulnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) 2. Adanya janji-janji politik serta pemilihan Kepala Desa. 3. Adanya Iklim Ekstrim
<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi sumber daya lahan 2. Potensi sumber daya manusia (SDM) 3. Ketersediaan benih dan bibit unggul lokal. 4. Pengembangan perkebunan dengan ternak. 	<p>Strategi Memanfaatkan Kekuatan & Mengisi Peluang (S-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sentra produksi sektor unggulan daerah. 2. Peningkatan kemampuan SDM melalui penelitian, penyuluhan dan Diklat. 3. Introduksi dan pengadaan benih unggul jambu mete dari BPTP. 4. Peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam. 5. Peningkatan mutu gelondongan mete. 6. Integrasi usaha perkebunan jambu mete dengan ternak. 	<p>Strategi Memanfaatkan Kekuatan & Mengatasi Ancaman (S-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis kebutuhan bagi pengembangan komoditas unggulan jambu mete. 2. Optimalkan pengembangan komoditas jambu mete melalui kajian pendukung di daerah. 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan produksi komoditas jambu mete. 4. Penguatan kelembagaan. 5. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang antisipasi datangnya iklim ekstrim.
<p>Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adopsi teknologi masih rendah. 2. Benih unggul terbatas 4. Jarak Tanam Rapat 5. Panen Dini 	<p>Strategi mengatasi kelemahan & Mengisi Peluang (W-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri pengolahan buah mete. 2. Pemanfaatan sumber daya lokal guna mengantisipasi kebutuhan pasar. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan pasar. 4. Penguatan modal usaha untuk pengembangan komoditas jambu mete. 5. Rehabilitasi Lahan komoditas Jambu mete 	<p>Strategi Mengatasi Kelemahan & Menghadapi Ancaman (W-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan Teknologi dan sarana prasarana Penunjang bagi peningkatan produksi komoditas jambu mete. 2. Pengendalian OPT secara preventif dan kuratif. 3. Meningkatkan mutu genetik dengan dukungan teknologi melalui kebijakan instansi terkait. 4. Memberikan keahlian kepada petani untuk lebih meningkatkan keterampilan dan memecahkan

		permasalahan yang ada. 5. Meningkatkan pemahaman & pengetahuan terhadap ancaman iklim ekstrim.
--	--	---

Adapun penjabaran dari ringkasan isu strategis hasil analisa matriks SWOT adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan sentra produksi sektor unggulan jambu mete , dimana sektor unggulan jambu mete di Kabupaten Buton masih membutuhkan pengembangan baik dari aspek teknologi, budidaya maupun pengembangan teknis lainnya.
2. Peningkatan kemampuan SDM melalui penelitian, penyuluhan dan Diklat. Peningkatan SDM ditingkat petani/masyarakat sangat diharapkan karena selama ini masyarakat rata-rata memiliki SDM yang bervariasi utamanya dalam mengadopsi anjuran teknologi yang diberikan yang nantinya akan meningkatkan produktivitas lahannya melalui teknik penyuluhan, penelitian maupun diklat oleh petugas.
3. Introduksi dan pengadaan benih unggul jambu mete dari BPTP.
Benih unggul pada kawasan sentra produksi sangat tersedia melalui blok penghasil tinggi ataupun pohon yang memiliki produksi tinggi yang tersebar pada kawasan sentra produksi sekalipun belum disertifikasi/legalitas dari BPTP ataupun lembaga yang berkompeten.
4. Peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam.

Berdasarkan hasil dan sumber daya lahan yang ada dan dalam rangka memenuhi kebutuhan/permintaan pasar yang tinggi maka dibutuhkan peningkatan mutu produksi serta perluasan areal pada lahan-lahan yang belum dimanfaatkan yang sesuai dengan kondisi komoditas unggulan daerah.

5. Peningkatan mutu gelondongan mete.

Gelondongan mete yang berlimpah disentra produksi harus ditunjang dengan peningkatan mutu gelondongan terutama pada saat pasca panen baik itu waktu panen maupun pada saat pengeringan kelondongan.

6. Integrasi usaha perkebunan jambu mete dengan ternak.

Kebiasaan masyarakat yang berada pada sentra produksi yaitu mengintegrasikan tanaman mereka dengan ternak yang mereka pelihara baik itu sapi, ayam dan lain sebagainya dengan harapan peningkatan pendapatan mereka selaligus merawat tanaman dan ternak mereka.

7. Melakukan analisis kebutuhan bagi pengembangan komoditas unggulan jambu mete.

Masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatannya harus menganalisis kebutuhan akan pengembangan komoditas unggulan sehingga nantinya pengembangan komoditas ini lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan.

8. Optimalkan pengembangan komoditas unggulan jambu mete melalui kajian pendukung di daerah.

Diharapkan bagi kelompoktani yang mengembangkan komoditas unggulan jambu mete agar selalu mengikuti informasi-informasi yang diberikan oleh petugas terkait khususnya yang berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan

jambu mete sehingga nantinya komoditas jambu mete kita berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

9. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan produksi jambu mete.

Hal ini berkaitan dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat baik secara teknis maupun informal dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola usahataniya sehingga nantinya akan meningkatkan produksinya dan pada akhirnya meningkatkan pendapatannya.

10. Penguatan kelembagaan, teknik budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil.

Kelembagaan tani seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani seharusnya dikuatkan kembali dengan jalan menginventarisasi kembali kelompok tani/gapoktan yang ada kemudian mengintensifkan petugas yang ada untuk peribinaannya. Dengan dikuatkannya kembali lembaga-lembaga tani tersebut maka dengan sendirinya akan menjawab segala tantangan utamanya yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan teknik budidaya yang ada, pemecahan permasalahan tentang pengolahan hasil sekaligus pemecahan pemasaran hasil masyarakat.

11. Meningkatkan pemahaman & pengetahuan terhadap ancaman iklim ekstrim.

Masyarakat harus memahami dan meningkatkan pengetahuannya tentang iklim ekstrim yang kadang-kadang muncul dalam musim produksi jambu mete. Masyarakat juga harus siap dan antisipatif jika iklim tersebut muncul sehingga ada alternatif usaha lainnya jika iklim ekstrim tersebut membawa kerugian bagi para petani jambu mete.

12. Pengembangan industri pengolahan buah semu.

Perhanya pengembangan industri pengolahan buah semu oleh masyarakat di kawasan pengembangan, hal ini sangat perlu karena berlimpahnya buah semu pada sentra produksi khususnya pada saat panen. Jika buah semu ini diolah dengan baik maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat diluar pendapatan biji gelondongan.

13. Pemanfaatan sumber daya lokal guna mengantisipasi kebutuhan pasar.

Sumber daya lokal untuk mengantisipasi kebutuhan pasar sangat membantu, termasuk di dalamnya termanfaatkannya tenaga kerja, skiil masyarakat dalam pengolahan jambu mete baik pengolahan manual maupun non manual serta sumber daya lokal lainnya. Hal ini tidak lepas dari mengantisipasi fluktuasi pasar yang tidak menentu.

14. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan pasar.

Luasnya lahan pengembangan komoditas unggulan jambu mete yang ada disentra produksi harus dioptimalkan fungsinya baik itu dalam bentuk optimasi lahan, reklamasi lahan, rehabilitasi lahan dan lain sebagainya. Kesemua kegiatan pemanfaatan lahan di atas adalah untuk pengoptimalkan lahan-lahan masyarakat dan jika lahan ini sudah optimal pemanfaatannya dengan sendirinya maka produksi akan meningkat sehingga pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan pasar.

15. Penguatan Modal Usaha untuk pengembangan komoditas unggulan jambu mete.

Penguatan modal usaha pada sentra produksi komoditas unggulan jambu mete sangat dibutuhkan khususnya yang berkaitan dengan pasca pengolahan mete dalam hal ini usaha agribisnis pengacipan biji mete yang merupakan budaya masyarakat. Disamping memelihara tanaman, masyarakat juga berusaha mengacip mete yang dibeli kepada masyarakat lain yang kemudian hasil olahan itupun dijual pada pengumpul dengan harga yang lebih mahal dibanding hanya gelondongan.

16. Rehabilitasi Lahan

Lahan-lahan yang berada pada kawasan produksi komoditas unggulan jambu mete umumnya merupakan tanaman yang tua dan memiliki jarak tanam rapat (tidak sesuai petunjuk teknis budidaya) karena awal penanamannya dijadikan sebagai tanaman konservasi, sehingga pada saat ini sangat dibutuhkan rehabilitasi baik, optimasi lahan, reklamasi lahan maupun pengembangan lahan kearah yang lebih baik.

17. Meningkatkan ketersediaan teknologi dan sarana prasarana penunjang bagi peningkatan produksi komoditas unggulan jambu mete.

Lembaga-lembaga tani yang sudah terbina dengan baik dan intensif tidak akan sulit mendapatkan sarana dan prasarana karena lewat kelembagaan yang menerapkan kaidah kelompok tani maka akan mudah bermitra dengan instansi terkait minimal informasi bagaimana untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang ada.

18. Pengendalian OPT secara preventif dan kuratif.

Diharapkan lembaga tani yang ada pada sentra produksi dapat memperkuat kelompok tani yang ada sehingga proses pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman ini merupakan tugas bersama anggota kelompok tani untuk berperan mengatasi OPT tersebut. Oleh karena itu dengan aktifnya anggota kelompok tani maka dengan sendirinya permasalahan khususnya mengenai OPT merupakan tugas bersama dalam kelompok.

19. Meningkatkan mutu genetik dengan dukungan teknologi melalui kebijakan instansi terkait.

Pemilihan varietas/benih unggul melalui dukungan teknologi atau kebijakan dari instansi terkait sangat dibutuhkan untuk pengembangan komoditas unggulan jambu mete.

20. Memberikan keluasaan kepada petani untuk lebih meningkatkan keterampilan dan memecahkan permasalahan yang ada.

Petani yang tergabung dalam lembaga kelompok tani/gapoktan bebas berekspresi untuk meningkatkan keterampilannya dan memecahkan permasalahan yang ada. Hal ini adalah merupakan tujuan berkelompok, sebab adanya permasalahan yang timbul dapat dipecahkan secara bersama-sama.

21. Mempelajari bagaimana pasca panen yang baik dan memiliki pemahaman dalam mengatasi timbulnya iklim yang ekstrim yang dapat merugikan masyarakat di kawasan pengembangan komoditas unggulan jambu mete.

d. Identifikasi Isu Strategis

Tabel 12. Matriks SWOT Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete Di Kabupaten Buton

Faktor Eksternal	Peluang (O) 1. Adanya dukungan kebijakan pemerintah. 2. Pengolahan produk jambu mete. 3. Dukungan dan kerjasama kemitraan. 4. Kondisi agroklimat yang sesuai 5. Permintaan pasar yang tinggi	Tantangan (T) 1. Timbulnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) 2. Adanya janji-janji politik serta pemilihan Kepala Desa. 3. Adanya iklim Ekstrem
Faktor Internal		
Kekuatan (S) 1. Potensi sumber daya lahan 2. Potensi sumber daya manusia (SDM) 3. Ketersediaan benih dan bibit unggul lokal. 4. Pengembangan perkebunan dengan ternak.	Strategi Memanfaatkan Kekuatan & Mengisi Peluang (S-O) Pengembangan sentra produksi sektor unggulan mete.	Strategi Memanfaatkan Kekuatan & Mengatasi Ancaman (S-T) Penguatan kelembagaan
Kelemahan (W) 1. Adopsi teknologi masih rendah. 2. Benih unggul terbatas 4. Jarak Tanam Rapat 5. Panen Dini	Strategi mengatasi kelemahan & Mengisi Peluang (W-O) Penguatan modal usaha untuk pengembangan komoditas /agribisnis komoditas unggulan mete.	Strategi Mengatasi Kelemahan & Menghadapi Ancaman (W-T) Meningkatkan pemahaman & pengetahuan terhadap ancaman iklim ekstrim.

Dari keseluruhan hasil analisis telah ditemukan dua puluh satu isu strategis berdasarkan temuan fakta yang ada. Dari semua isu tersebut, akan dianalisa beberapa isu yang merupakan isu dominan yang sangat strategis terhadap pengembangan komoditas unggulan daerah sektor perkebunan di Kabupaten Buton.

Beberapa isu dominan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 13. Susunan Prioritas Isu Strategis menurut skor Litmus Tets

Isu Strategis	Skor	Tingkat Prioritas *
1	2	3
1. Penguatan Kelembagaan	2,53	Pertama (sangat strategis)
2. Meningkatkan pemahaman & pengetahuan terhadap ancaman iklim ekstrim.	2,46	Kedua (sangat strategis)
3. Penguatan Modal Usaha untuk pengembangan komoditas unggulan jambu mete.	2,0	Ketiga (cukup strategis)
4. Pengembangan sentra produksi sektor unggulan Jambu mete.	1,93	Keempat (cukup strategis)

Keterangan : * relatif sesuai dengan nilai skor

1. Memanfaatkan kekuatan dan Mengisi Peluang (S-O)

Isu strategis yang dominan digunakan dari level (S-O) ini adalah pengembangan sentra produksi sektor unggulan daerah.

Penggunaan isu strategik ini sebagai isu dominan pada level memanfaatkan kekuatan dan mengisi peluang dengan alasan bahwa ke lima isu lainnya dapat terlaksana jika pengembangan sentra produksi sektor unggulan daerah dapat terlaksana dengan baik maka strategi lain dapat terwujud seperti adanya introduksi dan pengadaan benih unggul jambu mete, peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui peningkatan produksi dan perluasan areal tanam, mengadakan peningkatan SDM lewat penelitian, penyuluhan maupun diklat termasuk mengintegrasikan usaha perkebunan jambu mete dengan ternak.

2. Memanfaatkan kekuatan dan mengatasi masalah (S-T)

Isu strategik yang dominan yang digunakan dalam level S-T ini adalah penguatan kelembagaan dalam memecahkan permasalahan. Penggunaan isu tersebut sebagai isu dominan karena isu penguatan kelembagaan ini dianggap sangat penting pada sentra produksi dalam usaha pengembangan sektor unggulan jambu mete. Kelembagaan tani yang ada pada sentra produksi sangat berperan dalam terbinanya SDM petani, sebagai wahana pengetahuan dan kerjasama petani, sebagai tempat memecahkan masalah petani. Dengan kuatnya kelembagaan maka akan lebih mewujudkan elemen strategik yang lain seperti dalam rangka mengoptimalkan pengembangan komoditas unggulan daerah, melakukan analisis kebutuhan bagi pengembangan agribisnis komoditas unggulan, mengembangkan kelembagaan, teknik budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan produksi komoditas unggulan jambu mete.

3. Mengatasi kelemahan dan mengisi peluang (W-O)

Isu strategik dominan yang dipakai dalam level W-O ini adalah penguatan modal usaha untuk pengembangan agribisnis komoditas unggulan daerah. Alasan mengajukan strategik ini sebagai isu dominan karena penguatan modal ini pada sentra produksi sangat diharapkan dibanding strategik lain yang ada seperti pemanfaatan sumber daya lokal guna mengantisipasi kebutuhan pasar, pengembangan industri pengolahan buah semu agar jambu dipanen masak, mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan pasar dan pemangkasan serta penjarangan tanaman.

Penguatan modal usaha pada sentra produksi sangat diharapkan oleh masyarakat sebab dengan adanya modal usaha petani dapat melanjutkan usaha mereka sebagai pengolah mete serta untuk memenuhi kebutuhan lain sebagai penunjang pengembangan komoditas unggulan jambu mete.

4. Mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman (W-T)

Isu strategik yang dominan yang digunakan dalam level W-T ini adalah Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap ancaman iklim ekstrim. Hal yang menjadi kendala atau ancaman pada masyarakat dalam mengembangkan komoditas unggulan jambu mete adalah datangnya iklim ekstrim yang dapat membawa akibat buruk terhadap hasil/produksi jambu mete. Iklim ekstrim ini datangnya diluar jadwal iklim yang selama ini terjadi sehingga merubah perencanaan masyarakat terhadap pasca panen yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Iklim ekstrim ini terjadi sudah dua musim tanam , sehingga menurunkan hasil produksi jambu mete yang biasanya melimpah.

e. Strategi Kebijakan Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete

Tujuan akhir dari penerapan manajemen strategik, baik pada tataran mikro organisasi maupun pada tataran makro, proses pembuatan dan implementasi kebijakan pembangunan adalah menemukan strategi kebijakan yang tepat, jitu dan handal untuk mengatasi perubahan lingkungan (internal maupun eksternal) yang tepat dan yang bersifat turbulensi. Setelah dilakukan analisa isu strategik melalui analisa matriks SWOT sebagaimana yang telah dilakukan tersebut di atas, maka akan disampaikan strategi kebijakan pengembangan sektor unggulan jambu mete di Kabupaten Buton.

Hasil wawancara yang ditujukan kepada Mitra Usaha Pertanian mengemukakan bahwa :

Mengenai tanggapan dan kepuasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam program pemerintah dalam rangka pengembangan komoditas unggulan jambu mete sangat bervariasi, untuk yang melaksanakan sungguh-sungguh program dari pemerintah maka mereka merasa puas dan serius memeliharanya, ada juga yang kurang puas dan cenderung menjadi profokator karena kecemburuan sosial tidak mendapatkan bantuan karena lembaga/kelompok yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. (Wawancara dengan Mitra Usaha Pertanian, tanggal 18 Agustus 2010)

Selanjutnya gabungan kelompok tani menyatakan bahwa :

Pendapat kami mengenai kepuasan dan tanggapan-tanggapan pihak-pihak yang terlibat dalam program yang dibuat pemerintah daerah dalam rangka pengembangan komoditas jambu mete adalah untuk bantuan-bantuan mesin pengolahan mete agar diadakan pihak pemerintah jangan hanya mengadakan tapi kalau bisa ada pembelajaran teknologinya agar bantuan tersebut tidak mubazir. Kemudian untuk bantuan-bantuan selanjutnya pemerintah menyertakan pendampingan kepetani sebelum mandiri dalam melaksanakannya. (Wawancara dengan gapoktan, tanggal 29 juli 2010)

Strategi yang dijalankan oleh Dinas Pertanian pada sentra pengembangan komoditas unggulan jambu mete belum berjalan sesuai yang diinginkan, dimana sebenarnya kembali tertuju kepada kesungguhan/SDM pelaku kegiatan dalam memanfaatkan dan menjalankan program-program yang diberikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Salusu dalam Husba, (1986 : 1-2) yaitu unsur-unsur yang merupakan faktor yang menentukan atau determinan strategi, yaitu : *pertama*, tujuan dan sasaran. Tujuan (*objektif*) berbeda dengan sasaran (*goal*). Sasaran organisasi (*organizational*) adalah keinginan yang hendak dicapai, sedangkan tujuan organisasi adalah pernyataan yang sudah mengarah ke kegiatan untuk mencapai goals; *kedua* adalah lingkungan (*environment*). Sasaran organisasi senantiasa berhubungan dengan lingkungan yang bisa mengubah sasaran. Sebaliknya, sasaran organisasi dapat

mengontrol lingkungan. Lingkungan di sini adalah lingkungan eksternal dan kendala-kendala eksternal. Peluang eksternal meliputi faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, hukum, dan teknologi yang menyediakan ruang gerak bagi organisasi; *ketiga*, yaitu kapabilitas internal. Faktor ini meliputi struktur dan besarnya organisasi, sumber daya, program, kegiatan, kepemimpinan, iklim, dan lain-lain yang selalu memperhitungkan kekuatan dan kelemahan. Dengan demikian organisasi dapat menentukan bagaimana ia harus berkompetisi di dalam lingkungan eksternal; *keempat*, adalah komunikasi. Strategi bisa berhasil baik apabila komunikasi berjalan dengan baik. Bagaimanapun juga, informasi haruslah dikomunikasikan sebab hanya dengan berkomunikasi yang efektif peluang yang ada dalam lingkungan sekitar dapat bermanfaat bagi organisasi, karena peluang yang ada dalam lingkungan sekitar dapat bermanfaat bagi organisasi, karena peluang tidak setiap saat ada dan tidak akan berada disana sepanjang waktu.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton pada sentra produksi pengembangan komoditas unggulan jambu mete selama ini terkesan dipaksakan kepada masyarakat, hal ini antara lain dibuktikan dengan banyaknya alat teknologi pasca panen yang tidak digunakan dengan alasan tidak bisa dioperasikan. Selain itu juga terdapat program bantuan yang salah tempat yang pada umumnya jatuh pada kelompok tani pasif sehingga selamanya program ini gagal dilaksanakan.

Strategi kebijakan yang tepat dan handal yang diperoleh dari analisa terhadap isu-isu strategis yang ditemukan melalui analisa matriks SWOT adalah sebagaimana paparan berikut berdasarkan skore tertinggi pada isu strategis:

1. Penguatan Kelembagaan

Strategi kebijakan yang dapat dikerjakan adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan dinamika lembaga tani oleh instansi terkait.
- b) Peningkatan pendidikan dan latihan serta pendampingan petani pada sentra produksi komoditas unggulan jambu mete.
- c) Pemberdayaan petani pada sentra produksi komoditas unggulan jambu mete melalui penumbuhan kelembagaan tani dan kelembagaan usaha.
- d) Penataan kelembagaan melalui fasilitasi lembaga keuangan pedesaan, pengembangan dan pemantapan jejaring pemasaran, pemantapan pola pengembangan kelembagaan tani.

2. Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Terhadap Ancaman Iklim Ekstrim.

Strategi kebijakan yang dapat dikerjakan adalah sebagai berikut :

- a) Adanya dukungan pemerintah terhadap antisipasi masyarakat tentang datangnya iklim ekstrim.
- b) Adanya perencanaan alternatif terhadap datangnya iklim ekstrim.
- c) Dibutuhkan kesiapan masyarakat yang ada di sentra produksi tentang datangnya iklim ekstrim.
- d) Mengaktifkan pertemuan-pertemuan kelompok tani tentang antisipasi jika datang iklim ekstrim.

3 Penguatan Modal Usaha Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan Jambu Mete.

Strategi kebijakan yang dapat dikerjakan adalah sebagai berikut :

- a) Membangun kerjasama dan kemitraan usaha lintas sektoral.
- b) Dibutuhkan kreasi dan inovasi dari instansi terkait untuk menggali sumber-sumber dana lain yang memungkinkan.
- c) Memberikan kemudahan kepada para investor/pengusaha dalam berusaha (perizinan) sehingga sub sistem pemasaran dari sistem agribisnis dapat berjalan dengan lancar.
- d) Diaktifkannya kembali lembaga koperasi pedesaan sebagai tempat mikro ekonomi pada sentra produksi komoditas unggulan daerah.

4. Pengembangan Sentra Produksi Sektor Unggulan Jambu Mete.

Strategi kebijakan yang dapat dikerjakan adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi tanaman, perluasan areal, rehabilitasi maupun diversifikasi usaha.
- b) Pemberdayaan petani melalui pengelolaan dana bantuan sosial, penumbuhan kelembagaan tani, peningkatan keterampilan petani.
- c) Pengolahan dan Pemasaran hasil melalui pengembangan diseminasi teknologi pengolahan dan pemasaran, peningkatan mutu hasil, pemanfaatan limbah komoditas jambu mete, peningkatan dan pemantapan kelembagaan pemasaran, pengembangan sarana dan prasarana.
- d) Pemantapan infrastruktur melalui peningkatan sarana listrik dan komunikasi, peningkatan jalan usaha tani dan jalan produksi, peningkatan sarana gudang dan lantai jemur.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penerapan strategis kebijakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton ternyata belum menunjang pengembangan komoditas unggulan jambu mete secara baik, karena strategi kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi lingkungan fisik daerah Kabupaten Buton dilihat dari kondisi iklim, wilayah, sosial, budaya belum dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Buton. Selain itu strategi kebijakan pemerintah belum diatur dalam aturan formal yang dapat mengikat masyarakat dalam implementasi kebijakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton, antara lain kemampuan pemerintah dalam menganalisis kebijakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada sentra produksi komoditas unggulan jambu mete.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dipandang perlu mengemukakan saran sebagai berikut :

Dalam perumusan kebijakan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton seharusnya menggunakan pendekatan button up dan perlunya peningkatan kapasitas pemerintah Kabupaten Buton dalam melakukan analisis kebijakan, sehingga kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi pengembangan komoditas unggulan jambu mete bagi masyarakat di Kabupaten Buton.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Ilmiah

- Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ary, dkk. (1982). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. (terj.) Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Azahari, (2000). Kemitraan Agribisnis Tiga Tungku, Jakarta, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 7 (2), 15-17.
- Bryson, M.John. (1999). *Strategic Planning For Public & Non Profit Organization*. USA : Jossey-Bass Inc.
- Denhard, Robert. B. (1984). *Public Administration An Action Orientatio*. California : University of Colorado at Denver.
- Dunn, W. N. (1998). *Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Gibson, James. L. (1996). *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta : Erlangga.
- Islamy, I. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Istianda, Meita, (2008). *Studi Mandiri*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hariyoso, Agus. et.al. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta : UGM.
- Hari Purnomo, Setiawan. & Zulkieflimansyah. (2003). *Manajemen Strategi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Khotijah, Siti. (2004). *Smart Strategi of Marketing*. Bandung : Alfabeta.
- Kismartini, dkk. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Kuntoro. (1987). *Analisa Keputusan Pendekatan Sistem dalam Manajemen Usaha dan Proyek*. Bandung : Ganesa Exact Bandung.
- Qudrat, Muhammad. (2007). *Manajemen Strategik Organisasi Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Irawan, Prasetya. (2007). *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.

- Islamy, I. A. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mubyarto. (1987). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : LP3ES.
- Naisbitt, J. (1984). *Megatrends*. New York : Warner Books.
- Nawawi, H. Hadadi. (2000). *Manajemen Strategik : Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan; Dengan Aplikasi Di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Osborne, David. & Ted, Gaebler. terj. Abdul, Rosyid. (1996). *Mewirauahakan Birokrasi*. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Perroux, F. (1988). *The Pole of Development'New Place in a General Theory of Economic Activity*. In B Higgins & D.J.Sovoic (Eds). Boston : Regional Economic Development.
- Purwanto, Iwan. (2008). *Manajemen Strategi*. Bandung : Yrama Widya.
- Rangkuty, Freddy. (1997). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis : Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta : Gramedia.
- Riduwan. (2008). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung : Alfabeta.
- Sahusu. J. (1996). *Pengambilan Keputusan Strategik : Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Samuelson, Paul. A. & Nordhaus, William. D. (1996). *Economics, McGraw Hill.Inc., Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Siagian, Sondang. P. (1995). *Managemen Strategik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekartawi. (2001). *Agribisnis : Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Raja Grafindo Persada.
- Surwarsono. (1994). *Manajemen Strategik, Konsep, alat Analisa dan Konteks*. Jakarta: UPP AMP YKPN.
- Setiawan. dkk. (1999). *Manajemen Strategi : Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: LP-FEUI.
- Stoner. James, A.F. & Freeman, Gilbert. (1995). *Management*.New York : Addison Wesley Publisher.
- Sutarto. (2000). *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

- Suseno, Frans, Magnis. (1999). *Pemikiran Karl Max, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Todaro, M.P. (2000). *Economic Development. Seventh Edition. New York : Addition Wesley Longman, Inc.*
- Warsito, Utomo. (2005). *Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal*. Yogyakarta : UGM.
- Wahyudi. & Sri, Agustinus. (1996). *Manajemen Strategis : Pengantar Proses Berpikir Strategik* Jakarta : Binarupa Aksara.
- Wahab. & Solichin, Abdul. (1990). *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

B. Artikel Jurnal

- Aswandi, dkk. (2002). Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan; Studi Empiris di Kalimantan Selatan. Fakultas Ekonomi. Universitas Gajah Mada, *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia*, 11(1), 33-39.
- Tambunan. Mangarah. & Ubaidillah. (2003). *Pasar Global, Apakah Ancaman atau Tantangan Bagi UKM?, dalam Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi*. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

C. Buku, kelompok penulis, institusi pemerintah sebagai penerbit

- Badan Pusat Statistik,(2008). *Produk Domestik Bruto Kabupaten Buton*. Kabupaten Buton: Kerjasama Badan Perencanaan Daerah dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton.
- Badan Pusat Statistik, (2008). *Kabupaten Buton Dalam Angka*. Kabupaten Buton: Badan Pusat Statistik.
- Dinas Perkebunan dan Hortikultura. (2009). *Statistik Perkebunan*. Kendari: Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Hariyoso, Agus. et.al. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta : UGM.
- Roadmap. (2007). *Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian Kabupaten Buton*. Kendari : Dinas Pertanian Kabupaten Buton kerjasama dengan LPSM-Canopy.

- Statistik Perkebunan. (2007). *Pembakuan Statistik Perkebunan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Suripin. (2004). *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Yogyakarta : UGM
- Syafaat. & Supeno. (2000). *Analisis Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja dan Identifikasi Komoditas Andalan Sektor Pertanian di Wilayah Sulawesi*. Bogor : BPPT.
- Syafruddin. dkk. (2004), *Penataan Sistem Pertanian dan Penetapan Komoditas Unggulan Berdasarkan Zona Agroekologi di Sulawesi Tenga*. Sulteng : BPPT.

D. Makalah yang dipresentasikan

- Badjuri, A. & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Dapamerang. (2003). *Analisa Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditi Unggulan Jambu Mete di Kabupaten Sumba Barat*. NTT.
- Grace, Nani. (1998). *Potensi dan Komoditi Unggulan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Habibie, Arifin. Nono, R. & Anwar, Wardhani. (1995). *Pengembangan Tenaga Kerja Off Farm Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Pedesaan*, Makalah disajikan pada *Seminar Nasional Liberalisasi Ekonomi tanggal 3 Juni 2002*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Hendriana, Refi. (2003). *Studi Pola Ruang Aliran Komoditas Pertanian Unggulan Antarawilayah di Provinsi Banten*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Isnaini. (2009). *Analisis Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Agribisnis Berbasis Perkebunan di Kabupaten Serang Bagian Timur*. Maluku.
- Royat, Sujana. (1996). *Pengembangan Ekonomi Regional dan Upaya Memunjang Pertumbuhan KAPET Dalam Kaitannya Dengan Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat*.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (1995). *Pengembangan Kawasan dan Pengentasan Kemiskinan*, Makalah disajikan pada *Seminar Nasional Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan Kemiskinan, Penyelenggara Cides dan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3KP) tanggal 26 Mei 1995*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Wahyudi, Deden. (2009). *Pemahaman Tentang Otonomi Daerah Dan Problematikanya*. Artikel Leave a Reply.

E. Tesis yang tidak dipublikasikan

Damiri, (2001). *Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Wonogiri Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Tarmizi, Ismail. (2002). *Strategi Pemerintah Kabupaten Solok Dalam Rangka Kembali Ke Pemerintahan Nagari Menuju Otonom Desa Yang Demokratis (Kasus Kabupaten Solok, Sumatera Barat)*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

F. Dokumen dari Internet, halaman Web

Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, (2004). *Tata cara Perencanaan Pengembangan Kawasan : Untuk Percepatan Pembangunan Daerah*, Bappenas. Diambil 29 Juli 2010 dari web : <http://www.kawasan.or.id>.

Dwiyana, Rusman. (2008). *Akuntabilitas Adminitrasi dan Hukum atas Keputusan Administrasi Pejabat Pemerintah*, Jakarta. Diambil 17 September 2010, dari situs World wide web: http://www.madina.sk.com/index.php?option=com_content&task=view&id

Hafsah, Jafar. (1995). *Peran Strategi Pertanian*, Diambil dari 24 Oktober 2010 situs World Wide Web <http://indomaritimeinstitute.org/wp-content/uploads/jafar-hafsa.pdf>.

Kartasasmita, Ginanjar. (2007). *Revitalisasi Administrasi Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Diambil 23 Juli 2010, dari situs World wide web <http://www.ac.id/artikel/Ginanjar.pdf>.

Warella, Yacob. (2005). *Materi Kuliah Reformasi Administrasi Negara*, Diambil 12 Agustus 2010, dari situs World wide web [http://rahmatmh.com/eksmnng/adminitrasi Pembangunan & Reformasi Administrasi.pdf](http://rahmatmh.com/eksmnng/adminitrasi%20Pembangunan%20&%20Reformasi%20Administrasi.pdf).

LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1

PANDUAN WAWANCARA

Visi : Pertanyaan ditujukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Buton

1. Apakah visi kebijakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete sudah sesuai dengan kondisi, tantangan dan kebutuhan daerah ? Jelaskan

Misi : Pertanyaan ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Mitra Usaha Sarana Pertanian.

2. Apakah misi yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan komoditas unggulan jambu mete sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Buton? Jelaskan

Sumber daya : Pertanyaan ditujukan kepada Dinas Pertanian, mitra usaha dan pengusaha

3. Menurut pendapat anda, apakah sumber daya yang dimiliki Kabupaten Buton sudah memadai dalam rangka menganalisis strategi kebijakan komoditas unggulan jambu mete? Jelaskan

Kinerja yang telah diperoleh : Ditujukan kepada anggota koperasi, pengusaha atau para petani

4. Menurut pendapat anda, apakah kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Dinas Pertanian) sudah memadai dalam upaya pengembangan komoditas unggulan jambu mete? Jelaskan

Strategi yang digunakan : Pertanyaan ditujukan kepada pengurus koperasi, pengusaha atau para petani.

5. Otonomi Daerah dapat diukur dari kemandirian daerah untuk mengatur rumah tangganya, menurut pendapat anda, program manakah yang kurang mengena dalam rangka pengembangan komoditas unggulan jambu mete? Jelaskan

Strategi yang digunakan : Pertanyaan ditujukan kepada pengurus koperasi, pengusaha atau para petani.

6. Implementasi otonomi daerah diharapkan mampu memuaskan kebutuhan masyarakat, bagaimana pendapat anda mengenai kepuasan dan tanggapan pihak-pihak yang terlibat dalam

program yang dibuat pemerintah daerah dalam rangka pengembangan komoditas unggulan jambu mete? Jelaskan.

Aspek Politik : Pertanyaan ditujukan kepada Dinas Pertanian

7. Faktor politik apakah yang dianggap dominan dalam mendukung upaya peningkatan komoditas unggulan jambu mete, Jelaskan
8. Dengan adanya peningkatan suhu politik di pemerintah pusat, adakah pengaruh terhadap upaya pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton ? Jelaskan

Aspek Ekonomi : Pertanyaan ditujukan kepada pengurus koperasi, pengusaha dan Dinas Pertanian.

9. Apakah sektor perkebunan mempunyai kontribusi yang positif terhadap perekonomian di Kabupaten Buton ? Jelaskan

Aspek Sosial : Pertanyaan ditujukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Buton

10. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan semua kebutuhan dan aspirasi petani dapat dipenuhi, faktor sosial apakah yang bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan ? Jelaskan
11. Adakah kebiasaan masyarakat yang kurang sejalan dengan upaya pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton ? Jelaskan
12. Adakah penolakan yang dilakukan masyarakat dalam program yang dilakukan pemerintah daerah untuk pengembangan komoditas unggulan jambu mete ? Jelaskan

Aspek Teknologi : Pertanyaan diajukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Buton

13. Diharapkan penerapan otonomi daerah menimbulkan keluwesannya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bagaimana respon dari pihak-pihak yang terkait terhadap peralatan maupun metode (teknologi) pertanian yang diperkenalkan Dinas Pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas komoditas unggulan jambu mete ? Jelaskan

Aspek Ekonomi : Pertanyaan ditujukan kepada Dinas Deperindag Kabupaten Buton.

14. Apakah sektor perkebunan memberikan kontribusi yang positif terhadap Peningkatan Perdagangan dan Industri di Kabupaten Buton ? Jelaskan

Aspek Sarana/Infrastruktur : Pertanyaan ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.

15. Sampai sejauh mana peran sektor perhubungan terhadap pengembangan komoditas unggulan jambu mete terutama mengenai sarana infrastruktur transportasi, baik transportasi laut maupun darat di Kabupaten Buton ? Jelaskan

Aspek Kelembagaan : Pertanyaan ditujukan kepada Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.

16. Apakah kelembagaan kelompok tani/Gapoktan khususnya yang bergerak dibidang usaha perkebunan berjalan sebagaimana mestinya ? Jelaskan

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2

**TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN MENGENAI
ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN
JAMBU METE DI KABUPATEN BUTON**

No.	Nama Informan	Hasil wawancara
1.	Ir. MAIYNU (49 Tahun) Kepala Dinas Pertanian (20 Agustus 2010)	<p>1. Visi kebijakan pengembangan komoditas jambu mete sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, sebab visi yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buton berdasarkan visi Kabupaten Buton yang bermuara pada penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kab.Buton tahun 2007-2011, dimana RPJM sudah melalui potensi dan kondisi riil yang ada di Kab.Buton. Berbicara visi kebijakan pengembangan perkebunan di Kabupaten Buton telah melalui proses yang telah dibicarakan dalam hal pengembangan perkebunan secara umum yang disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian Indonesia.</p> <p>Adapun visi yang diemban oleh Dinas Pertanian Kab.Buton yang telah disesuaikan dengan visi Kabupaten Buton yaitu Terwujudnya swasembada pangan yang berbasis pelayanaan komoditas secara proposional dan berkeadilan sesuai potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.</p> <p>2. Misi yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya pembangunan komoditas unggulan jambu mete belum semua menjawab kebutuhan masyarakat khususnya pada wilayah sektor unggulan daerah, tapi kita sebagai teknis pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar Misi yang ada dapat menjawab semua tantangan yang ada sehingga akan memudahkan dalam pembuatan program dan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun Misi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian antara lain; (a) meningkatkan produktivitas & daya saing sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan & hortikultura);(b) meningkatkan kualitas & kuantitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik & peningkatan produktivitas usaha pertanian;(c) menciptakan dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian pada sentra-sentra produksi sehingga memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif serta memenuhi permintaan pasar;(d) meningkatkan pelayanan prima untuk menciptakan usaha pertanian melalui peningkatan akses terhadap informasi pasar, teknologi, permodalan serta infrastruktur pendukung lainnya;(e) Memanfaatkan kelembagaan pertanian serta mengembangkan sinergi dengan unit kerja terkait &</p>

		<p>meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Buton khususnya SDA sudah memadai dalam rangka menganalisis strategi kebijakan komoditas unggulan jambu mete. Kita ketahui bahwa SDA yang dimiliki oleh Kabupaten Buton sangat besar sekali, hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan kering yang sangat cocok sekali dengan pengembangan sektor unggulan jambu mete, tidak hanya luas lahan tapi sifat fisik dan kimia tanahnya sangat cocok yang memungkinkan komoditas unggulan ini dapat bertahan dan meningkat produksinya di luar faktor-faktor pembatas lain seperti SDM dan sarana penunjang lainnya. 4. Rata-rata masyarakat yang ada di sentra produksi merupakan masyarakat yang ulet dan tekun disebabkan oleh karakter tanah kering dan marginal, namun masyarakat juga memiliki kelemahan yaitu cepat puas dengan hasil yang dicapai dan gampang terpengaruh dengan usaha lain.” 5. Kaitannya tentang yang dilakukan masyarakat dalam program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah untuk pengembangan komoditas unggulan jambu mete adalah sangat direspon baik oleh masyarakat asal program tersebut sinergis dengan kondisi sentra produksi seperti keinginan masyarakat untuk : menjarangkan tanaman tanaman jambu mete mereka yang sudah tua, adanya benih unggul, adanya Diklat petani tentang peningkatan mutu tanaman, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada, serta pengembangan sentra produksi. 6. Faktor politik yang dianggap dominan dalam mendukung upaya peningkatan komoditas unggulan jambu mete adalah adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam mendukung administrasi legalitas pengembangan komoditas unggulan jambu mete. 7. Dengan adanya suhu politik dipusat tidak berpengaruh nyata terhadap upaya pengembangan komoditas unggulan jambu mete kecuali suhu politik daerah setempat akan berpengaruh nyata terhadap kegiatan dilapangan salah satu contoh adanya janji-janji politik yang dilakukan pemerintah serta adanya pemilihan Kepala Desa yang kelompok oposisi cenderung menghambat pelaksanaan program di wilayah tersebut. 8. Dengan adanya bantuan-bantuan teknologi pada sentra produksi direspon baik oleh masyarakat hanya yang menjadi permasalahan adalah rendahnya tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat yang disebabkan rendahnya
--	--	--

2.	<p>LUKMAN (42 Tahun) Mitra Usaha Dinas Pertanian Kabupaten Buton. (18 Agustus 2010)</p>	<p>SDM masyarakat terhadap bantuan-bantuan yang diberikan masyarakat. Disamping hal tersebut yang paling dipermasalahkan adalah daya listrik pada sentra produksi belum mampu untuk menggerakkan mesin-mesin bantuan pemerintah selain itu jga disebabkan oleh biaya operasional yang tinggi.</p> <p>9. Sektor pertanian secara luas termasuk perkebunan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di Kabupaten Buton, hal ini dibuktikan dengan prosentase PDRB yang mencapai 46,82% pada tahun 2007-2008 dibanding lapangan usaha lain.</p> <p>1. Misi yang dicetuskan pemerintah Kabupaten Buton itu sudah baik, yang menjadi permasalahan adalah apakah masyarakat sekarang ini mampu melaksanakan misi tersebut. Yang terjadi dilapangan yaitu kelompok tani sdh pasif, aktif jika ada bantuan setelah itu pasif lagi sehingga perlunya kekompakan petani dalam menerima penyafuran saprodi dari mitra usaha.</p> <p>2. SDA yang dimiliki Kabupaten Buton khususnya pada sentra produksi komoditas unggulan jambu mete sangat besar yang meliputi kecamatan Lakudo, GU, Sangia Wambuhu, Mawasangka Tengah dan Mawasangka dengan iklim yang sangat cocok untuk pengembangan jambu mete. Mengenai SDM sangat bervariasi, khusus petani rata-rata memiliki SDM rendah sehingga dalam mengadopsi teknologi dan informasi juga sangat rendah.</p> <p>3. Kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Buton menurut kami sudah cukup memadai, hal ini kami rasakan sebagai mitra pertanian khususnya mengenai bantuan-bantuan sarana prasarana baik itu bibit tanaman, pupuk yang diberikan kepada petani untuk pengembangan komoditas unggulan jambu mete, hanya kembali lagi pada keseriusan kelompok tani/gapoktan dalam menangani kinerja yang diberikan oleh pemerintah.</p> <p>4. Menurut kami program yang kurang mengena dalam usaha pengembangan sektor unggulan jambu mete antara lain pemberian bantuan bibit yang dilakukan oleh provinsi dengan memanfaatkan penangkar dari luar, pada hal kita ketahui kita memiliki ketersediaan benih dan bibit unggul lokal, sehingga kedepan kita akan mendapatkan hasil produksi yang bervariasi dibanding dengan unggul lokal kita yang jauh lebih baik.</p> <p>5. Mengenai tanggapan dan kepuasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam program pemerintah dalam rangka</p>
----	--	--

<p>3. GAPOKTAN MAKMUR Kec.Mawasangka (Wawancara Group) (29 Juli 2010)</p>		<p>pengembangan komoditas unggulan jambu mete sangat bervariasi, untuk masyarakat yang melaksanakan sungguh-sungguh program dari pemerintah maka mereka merasa puas dan serius memeliharanya, ada juga yang kurang puas dan cenderung menjadi profokator karena kecemburuan sosial tidak mendapatkan bantuan karena lembaga/kelompok yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.</p> <p>6. Sektor perkebunan sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Buton, ini dibuktikan dengan adanya PDRB yang lumayan, adanya potensi sumber daya lahan, ketersediaan benih unggul lokal yang siap diolah, adanya integrasi antara tanaman komoditas unggulan dengan ternak, adanya permintaan pasar yang tinggi, olahan jambu mete yang berlimpah, adanya dukungan kerjasama dan kemitraan, dukungan agroklimat yang sesuai. (30 Juli 2010)</p> <p>1. Menurut kami kinerja yang dilakukan oleh pemerintah sudah baik tergantung dari kami masyarakat ini melaksanakannya dengan baik atau tidak, namun ada hal-hal yang perlu dijadikan masukan kepada pemerintah lewat Dinas Pertanian yaitu adanya petugas yang malas masuk dikebun kami. Pada hal adanya pembinaan dari petugas membuat kami bisa menggunkn mesin-mesin bantuan yang ada, mengetahui bagaimana cara mengatasi hama penyakit, bagaimana cara menanam yang baik supaya tanaman tidak rapat dan lain-lain.</p> <p>2. Menurut kami program yang kurang mengena dalam rangka pengembangan komoditas unggulan jambu mete adalah kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi mete yang ditangani oleh Provinsi dimana uangnya hanya numpang lewat direkening kami sementara kami tidak diberikan biaya pengangkutan atau biaya penanaman, padahal lokasi kebun kami jauh.</p> <p>3. Pendapat kami mengenai kepuasan dan tanggapan-tanggapan pihak-pihak yang terlibat dalam program yang dibuat pemerintah daerah dalam rangka pengembangan komoditas unggulan jambu mete adalah untuk bantuan-bantuan mesin pengolahan mete agar pihak pemerintah jagan hanya mengadakan tapi kalau bisa ada pembelajaran teknologinya agar bantuan tersebut tidak mubazir. Kemudian untuk bantuan-bantuan selanjutnya pemerintah menyertakan pendampingan kepetani sebelum mandiri dalam melaksanakannya.</p>
---	--	---

4.	<p>LA ODE MUSIDO (43 Tahun) Ketua kelompok tani Moko Usaha Kecamatan Lakudo. (3 Agustus 2010)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut saya kinerja yang dilakukan oleh pemerintah sudah bagus karena pemerintah ini kita lihat hampir setiap tahun memberikan bantuannya kekita baik itu modal, bibit, pupuk, Optimasi lahan yang patut kita syukuri. Kami akui bahwa saat ini kelompok tani sudah malas kecuali ada bantuan dan habis bantuan ikut juga tidak bekerja. Sehingga terus terang daya tanggap masyarakat terhadap teknik budi daya dan lain-lain sangat kurang. 2. Menurut saya mewakili kelompok bahwa program yang kurang mengena dalam rangka pengembangan komoditas unggulan jambu mete adalah bantuan bibit oleh provinsi yang menggunakan rekening kelompok karena kami tidak diberikan biaya pengangkutan bibit ke lokasi kemudian jadwal tanamnya tidak tepat. Selain itu juga mengenai bantuan mesin pengolahan yang sampai saat ini belum dijalankan karena kami tidak tau caranya. Usul kami supaya diadakan pendampingan untuk penggunaannya. 3. Pendapat saya mewakili kelompok tentang kepuasan dan tanggapan pihak-pihak yang terlibat dalam program yang dibuat oleh pemerintah adalah sepanjang program tersebut disertai petunjuknya maka akan lebih baik jika program tersebut tidak disertai petunjuk termasuk kegiatan yang sifatnya BANSOS harus disertai dengan petunjuk yang jelas supaya kami ini bisa menguasai teknologi yang diberikan, bisa mengetahui teknik penanaman yang baik, tidak panen dini serta bisa memanfaatkan buah semu mete supaya tidak berhamburan dibawah pohon.
5.	<p>LA KAOSI SIMON (40 Tahun) Ketua Gapoktan Gerak Makmur Desa Lakapera Kecamatan GU. (6 Agustus 2010)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapat kami selaku mewakili kelompok gerak makmur tentang kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya pengembangan komoditas unggulan jambu mete adalah menurut kami sudah baik tinggal ditambah dengan jumlah penyuluh pertanian dalam rangka supaya petani mau dalam mengadopsi teknologi yang ada, supaya tidak panen dini, agar pengolahan produk mete yang ada lebih baik, mengatasi jarak tanaman yang rapat. 2. Menurut kami program yang kurang mengena dalam rangka pengembangan komoditas unggulan jambu mete ini adalah program BANSOS yang ditangani oleh Provinsi. Hal ini berakibat justru kegiatan itu tdk memberdayakan masyarakat setempat, pada hal kalau kegiatan ini berjalan melibatkan msyarakat membuat meningkatnya kerjasama kelompok. 3. Menurut kami tidak ada, hanya perlu kami sampaikan bahwa yang terjadi di Desa kami khususnya dn Kecamatan GU umumnya memiliki beberapa permasalahan yang mungkin menjadi msukan buat pemerintah dan kita semua

6.	<p>LA SAMIRA (41) sebagai Ketua KTNA Kec.Mawasangka dan Kabupaten,Ketua kelompok tani dan Gapoktan serta Mitra Usaha Pertanian. (14 Agustus 2010)</p>	<p>yaitu antara lain sangat rendahnya informasi teknologi khususnya mengenai teknik atau cara penggunaan mesin-mesin pengolahan yang diberikan Dinas Pertanian, kurangnya benih unggul hasil penelitian, tanaman jambu mete ini jarak tanamnya sangat rapat sehingga produksi semakin lama semakin rendah dan menjadi tempat berkembang biaknya ham (OPT), terjadinya panen dini sehingga mutu olahan mete kurang baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pembangunan komoditas unggulan jambu mete belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini disebabkan antara lain instansi terkait sebagai pelaksana Misi belum berjalan sesuai yang diinginkan lembaga tani/usaha sehingga dengan sendirinya lembaga kelompok tani lemah dan tidak berjalan, adopsi akan teknologi belum maksimal, teknik budidaya belum juga berjalan sesuai yang diinginkan dan lain sebagainya. 2. Mengenai sumber daya lahan yang dimiliki Kabupaten Buton sangat besar tersedia yang siap dikelola secara teknis. Dengan besarnya SDA tersebut merupakan suatu kekuatan dari Kabupaten Buton selain itu juga kita memiliki SDM yang bervariasi sekalipun masih ditingkatkan, kita memiliki ketersediaan benih dan bibit unggul lokal serta budaya integrasi antara tanaman mete dengan usaha ternak. 3. Mengenai kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya memadai seperti yang saya jelaskan di Misi tadi. Alasan yang lain antara lain bantuan yang sudah diberikan tidak selamanya dievaluasi oleh petugas, tidak adanya pendampingan untuk masing-masing kegiatan dalam penerapan teknologi kepada masyarakat sehingga petani yang tergabung dalam kelompok tani bersifat pasif dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Program yang kurang mengena dalam rangka pengembangan komoditas unggulan jambu mete menurut saya antara lain penanganan kegiatan pemberdayaan yang tidak tepat, program pemerintah yang tidak disertai dengan informasi teknologi baik budi daya maupun pengolahan pasca panen. Disamping itu kegiatan yang ditangani oleh provinsi yang tidak sesuai petunjuk teknis. 5. Menurut saya kaitannya dengan kepuasan dan tanggapan pihak-pihak yang terlibat dalam program yang dibuat utamanya pada program misalnya pemanfaatan teknologi pengolahan mete merasa kurang puas yang disebabkan ketidak penguasaan teknologinya, adanya egoisme dari pengurus dalam kelompok yang menguasai kegiatannya sehingga tidak merata dalam kelompok. Merasa puas jika
----	---	---

		<p>dalam kelompok dapat mengatasi hal-hal sebagai berikut ; mengatasi akibat jarak tanaman yang rapat, mengatasi panen dini yang terjadi pada masyarakat, jika SDA yang ada sudah dimanfaatkan dengan baik dan lain sebagainya.</p> <p>6. Sektor perkebunan sudah pasti mempunyai kontribusi yang positif terhadap perekonomian di Kabupaten Buton. Hal ini antara lain disebabkan kita memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan komoditas unggulan jambu mete ini seperti terdapatnya dan dukungan kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait, meningkatnya permintaan pasar, adanya kondisi agroklimat yang sesuai dengan kondisi komoditas unggulan jambu mete, tingginya aktifitas masyarakat yang mengelola komoditas unggulan dan lain-lain.</p>
7.	<p>L.M. TAMRIN, SA g (45 Tahun) Kasubdin Perdagangan. (29 Juli 2010)</p>	<p>1. Komoditas unggulan jambu mete sangat memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan perdagangan dan Industri. Ini dapat dilihat dari beberapa hasil jenis perkebunan dengan nilai perdagangan masing-masing seperti kopra sebesar Rp.7.606.825 (34,57%), mete gelondongan Rp.6.200.273,80 (28,17%), dan kakao Rp. 3.976.166 (18,07%). Semakin tahun perdagangan mengalami peningkatan, hal ini berarti betapa pentingnya komoditas unggulan kita terhadap PDRB Kabupaten Buton, khusus mengenai pertanian secara umum memberikan kontribusi sebesar 5,48 %.</p> <p>2. Mengenai peralatan maupun metode teknologi pertanian yang diperkenalkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buton khususnya mengenai mesin pengolahan pasca panen, itu sangat baik terhadap pengembangan komoditas unggulan jambu mete karena semua itu dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan komoditas unggulan kita. Hanya yang perlu dilaksanakan demi keberhasilannya saya kira butuh penerapan teknologinya ke pada kelompok penerima bantuan.</p>
8.	<p>L.M. IDRIS, SP.MSi (47 tahun) Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Buton. (10 Agustus 2010)</p>	<p>1. penyusunan visi Dinas Pertanian Kabupaten Buton bermula pada penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kab. Buton tahun 2007-2011, dimana RPJM sudah melalui kondisi riil atau potensi yang ada di Kabupaten Buton. Berbicara visi kebijakan pengembangan komoditas unggulan daerah telah melalui proses yang telah dibicarakan dalam hal pengembangan perkebunan secara umum yang disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian Indonesia.</p> <p>2. Kita ketahui bahwa Misi merupakan penjabaran dari visi, dimana misi secara spesifik melihat tingkat indikator kinerja pada setiap SKPD sehingga misi diharapkan dapat</p>

		<p>menjawab semua tantangan yang ada sehingga nantinya dapat menyusun program dan kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Buton sangat memadai terutama sektor perkebunan, dimana kita ketahui pada sentra produksi memiliki tekstur tanah, kondisi agroklimat sangat sesuai. Disamping itu terdapatnya pengolahan mete yang hampir terdapat pada sentra produksi, ketersediaan benih, bibit unggul lokal dan lain sebagainya sehinggalah dibutuhkan pengembangan sentra produksi, peningkatan mutu gelondongan, integrasi usaha perkebunan dengan ternak masyarakat, peningkatan kemampuan SDM untuk mengelola SDA dengan baik. 4. Yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan antara lain adalah kebiasaan masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan tani adalah ada bantuan yang diberikan pemerintah baru mereka aktif, kalau tidak ada bantuan mereka pasif. Kemudian kebiasaan lain adalah sifat bosan dan tidak focus pada satu komoditas. Sehingga untuk mengatasi hal ini adalah dengan penguatan kelembagaan tani. 5. Kebiasaan masyarakat yang kurang sejalan dengan upaya pengembangan komoditas unggulan daerah sektor perkebunan di Kabupaten Buton adalah sebagian kearifan local masyarakat yang berbeda waktu tentang jadwal tanam dengan petunjuk teknis yang ada serta adanya budaya malas khusus masyarakat local pada sentra produksi. 6. Penolakan yang dilakukan masyarakat dalam program pengembangan komoditas unggulan jambu mete adalah kita ketahui bahwa program yang diuncurkannya oleh pemerintah sangat baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan petani. Namun ada beberapa program pemberdayaan masyarakat BANSOS yang tidak direspon oleh masyarakat karena dilakukan prosesnya dengan tidak melibatkan petani/masyarakat. 7. Politik yang dianggap dominan dalam mendukung upaya peningkatan pengembangan komoditas unggulan jambu mete yaitu Dukungan kebijakan pemerintah mulai dari bantuan-bantuan yang ada baik dari daerah maupun pusat sampai dengan dukungan kebijakan pemerintah untuk pengembangan komoditas unggulan jambu mete. Sedangkan tantangan dari sistem politik yang ada antara lain adanya janji-janji politik serta adanya pemilihan kepala desa dimana lawan cenderung oposisi yang menghambat program pemerintah terpilih.
--	--	---

9.	Ir. SADISU,MSi (43 Tahun) Kasubdin Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Buton (13 Agustus 2010)	<p>8. Kaitannya dengan peralatan dan teknologi yang ada sudah cukup baik tetapi masih belum merata pada semua desa yang mengembangkan tanaman komoditas unggulan daerah. Adapun penggunaannya dimasyarakat tidak berjalan secara kontinyu disebabkan antara lain SDM yang rendah dan tidak ada keseriusan untuk menggunakannya secara berkelompok. Selain tersebut keinginan masyarakat untuk mendapatkan/memiliki alat dan teknologi pasca panen ini sangat besar.</p> <p>9. Sektor perkebunan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Buton sekitar 5,48%.</p> <p>1. Visi kebijakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete sudah sesuai dengan kondisi, tantangan dan kebutuhan daerah. Hal ini disebabkan dalam penentuan visi tersebut mencerminkan kondisi yang terjadi disentra produksi.</p> <p>2. Misi yang dilakukan pemerintah daerah sudah memadai, hanya yang perlu dilakukan adalah kerjasama stake holder dalam menjabarkan misi yang diemban dalam pengembangan komoditas unggulan ini.</p> <p>3. Mengenai SDA yang ada di Kabupaten Buton sangat besar sekali dan sangat melimpah baik itu potensi sumber daya lahannya, potensi SDM yang bervariasi yang ada pada sentra produksi, ketersediaan benih maupun bibit lokal sehingga tinggal hanya direkomendasikan, keterampilan petani untuk mengolah komoditas unggulan yang ada. Oleh karena itu banyak hal yang harus dibutuhkan secara teknis agar hal-hal tersebut dapat dilestarikan dengan sebaik-baiknya.</p> <p>4. Mengenai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya pengembangan komoditas jambu mete belum seluruhnya memadai. Hal ini antara lain dibuktikan dengan kelembagaan tani baik itu kelompok tani ataupun gapoktan tidak berjalan sesuai yang diinginkan sehingga dalam merubah pengetahuan, keterampilan dan sikap tidak maksimal dilain pihak bantuan fisik dari pemerintah sangat besar.</p>
----	--	--

		<p>5. Program yang kurang mengena dalam rangka pengembangan komoditas unggulan jambu mete adalah adanya kegiatan yang tidak diikuti oleh petunjuk teknis seperti penyaluran bantuan teknologi pengolahan baik itu dari pusat maupun dari APBD. Kemudian ada lagi program yang tidak diminti oleh masyarakat yaitu program pemberdayaan dimana tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan kebutuhannya.</p> <p>6. Faktor Sosial Budaya yang bisa menghambat pelaksanaan pembangunan adalah kebiasaan bermalasan malasan masyarakat lokal kita dalam mengelola kebun mereka dibanding dengan masyarakat transmigrasi yang lebih baik menerapkan petunjuk teknis, adanya usaha masyarakat yang tidak terfokus satu kegiatan sehingga kebun mereka seakan diabaikan kecuali pada saat panen.</p> <p>7. Faktor penolakan yang dilakukan masyarakat dalam program yang diberikan pemerintah adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya Top down dimana program tersebut tidak sesuai kondisi wilayah setempat.</p> <p>8. Faktor politik yang dianggap dominan dalam mendukung upaya peningkatan komoditas unggulan jambu mete adalah adanya dukungan penuh kebijakan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengembangan komoditas jambu mete mulai dari legalitas izinnya sampai kebijakan memperoleh anggaran. Termasuk jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.</p> <p>9. Respon dari pihak-pihak terkait terhadap peralatan yang diperkenalkan oleh dinas pertanian adalah respon sangat bagus hanya yang menjadi kendala adalah adopsi teknologi yang rendah dari masyarakat. Selanjutnya dikatakan juga bahwa yang menjadi kelemahan dalam pengembangan sektor unggulan jambu mete adalah jarak tanam yang begitu rapat pada sentra produksi, panen dini serta terbatasnya benih unggul yang berlabel dan bersertifikat.</p> <p>10. Sektor perkebunan mempunyai kontribusi yang positif terhadap perekonomian di Kabupaten Buton, hal ini disebabkan oleh besarnya SDA perkebunan yang ada di Kabupaten Buton. selain itu banyaknya potensi-potensi yang ada seperti tingginya permintaan pasar,</p>
--	--	---

		dukungan dan kerjasama kemitraan, ketersediaan benih dan bibit unggul lokal, besarnya pengembangan perkebunan yang diintegrasikan dengan ternak didalamnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 3

**TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN MENGENAI
MATRIKS SWOT STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMODITAS
UNGGULAN JAMBU METE DI KABUPATEN BUTON**

No.	Nama Informan	Hasil wawancara
1.	Ir. MAIYNU (49 Tahun) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton. (22 Agustus 2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa faktor yang menjadi kekuatan internal dalam menentukan strategi kebijakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton antara lain besarnya potensi sumber daya lahan, adanya potensi sumber daya manusia yang mengusahan tanaman jambu mete pada beberapa sentra produksi jambu mete, ketersediaan benih dan bibit unggul lokal serta adanya pengembangan/integrasi tanaman perkebunan dengan ternak. 2. Beberapa faktor yang menjadi kelemahan internal dalam menentukan strategi kebijakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton antara lain terbatasnya benih unggul, terbatasnya sarana dan prasarana produksi. 3. Beberapa faktor yang menjadi peluang eksternal dalam menentukan strategi kebijakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton antara lain adanya dukungan kebijakan pemerintah, adanya jaminan keamanan dan ketertiban, permintaan pasar yang tinggi, kondisi agroklimat yang sesuai, besarnya pengolahan produk jambu mete. 4. Beberapa faktor yang menjadi ancaman eksternal dalam menentukan strategi kebijakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton antara lain adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), adanya iklim ekstrim dimana mengakibatkan produksi tanaman menurun/gagal.
2.	L.M. IDRIS, SP. (46 Tahun) Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton. (24 Agustus 2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menentukan strategi kebijakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton ada beberapa faktor yang menjadi kekuatan internal antara lain adanya benih unggul lokal yang ada pada petani, adanya integrasi antara tanaman perkebunan dengan ternak piaraan, besarnya sumber daya lahan yang masih tersedia.

		<ol style="list-style-type: none">2. Dalam menentukan strategi kebijakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton ada beberapa faktor yang menjadi kelemahan internal antara lain masih rendahnya adopsi teknologi di sentra produksi jambu mete, jarak tanam jambu mete yang rapat hampir semua lahan yang ada, adanya panen dini sehingga mutu hasil rendah.3. Dalam menentukan strategi kebijakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton ada beberapa faktor yang menjadi peluang eksternal antara lain dukungan dan kerjasama kemitraan, banyaknya pengolahan jambu mete, permintaan pasar yang tinggi, adanya jaminan keamanan, kondisi iklim yang sesuai untuk pertumbuhan jambu mete.4. Dalam menentukan strategi kebijakan pengembangan komoditas unggulan jambu mete di Kabupaten Buton ada beberapa faktor yang menjadi ancaman antara lain pada sentra penanaman mete khususnya terjadi adanya janji-janji politik serta pemilihan Kepala Desa (pro dan kontra) masyarakat dalam menyukseskan program pemerintah, sering munculnya iklim ekstrim yang berakhir dengan kegagalan panen, munculnya serangan OPT.
--	--	---

UNIVERSITAS TERBUKA